

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 9 No. 02 Januari - April 2020

ISSN 2089 - 0338
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor
21/E/KPT/2018

- Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat

Lutfi Amalia dan Palupi Lindiasari Samputra

- Program Peningkatan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur)

Oman Sukmana

- Upaya Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasaman Menanggulangi Kemiskinan

Hari Harjanto Setiawan

- Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat)

Sabinus Beni dan Blasius Manggu

- Pemberdayaan Kelompok Perempuan Menggunakan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa

Saftri Endah Winarti, Herawati, dan Fajar Sidik

- Peranan Penyuluh Sosial Masyarakat Sebagai Agen Perubahan dalam Pengembangan Masyarakat Lokal: Kasus Kota Banjarmasin

Sugiyanto dan Suradi

- Kerentanan Remaja Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Bandung

Santy Yanuar Pranawati, Adriana Soekandar Ginanjar, Rudolf Woodrow Matindas, dan Irwanto

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Akreditasi Kemenristekdikti Nomor 21/E/KPT/2018

ISSN 2089-0338, E-ISSN 2502-7921

Volume 09 Nomor 02 Januari - April 2020

Sebuah Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyajikan karangan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember.

SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari “Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial” yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 Jurnal Ilmiah "SOSIO KONSEPSIA" menggunakan *Open Journal System (OJS)*. Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di Sosio Konsepsia melakukan pengiriman naskah melalui *Open Journal System (OJS)* : <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>.

Edisi cetak diterbitkan oleh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI

Mitra Bestari/Peer Reviewers

1.	Prof. Adi Fahrudin, Ph.D.	Praktek dan Pendidikan Pekerjaan Sosial, Psikososial (Universitas Muhamadiyah Jakarta)
2.	Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D	Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (Universitas Indonesia)
3.	Prof. Bambang Shergi	Kebijakan dan Perencanaan Sosial (Universitas Indonesia)
4.	Dr. Chazali Situmorang	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Universitas Nasional, Jakarta)
5.	Dr. Bambang Rudito	Antropologi, Interkultural, Corporate Social Responsibility (Institut Teknologi Bandung)
6.	Dr. Santoso Tri Raharjo	Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Sosiologi (Univesitas Padjajaran Bandung)
7.	Makmur Sunusi, Ph.D	Pekerjaan Sosial (Universitas Muhamadiyah Jakarta)

Pembina

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Penanggungjawab

Kepala Bidang Penelitian Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Editorial Board

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Dr. Hari Harjanto Setiawan | 6. Drs. Muhtar, M.Si |
| 2. Drs. Setyo Sumarno, M.Si | 7. Sugiyanto, S.Pd, M.Si |
| 3. Badrun Susantyo, Ph.D | 8. Habibullah, S.Sos, M.Kesos |
| 4. Drs. B. Mujiyadi, M.SW | 9. Nyi R Irmayani, SH, MSi |
| 5. Lasarus Jehamat, S.Sos. MA | |

Journal Manager

Nyi R Irmayani, SH, M.Si

Diterbitkan oleh **Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**



Alamat

Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8017146, Fax (021) 8017126
Email : sosiokonsepsia@gmail.com Website: puslit.kemsos.go.id

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Volume 9, No. 02, Januari – April 2020

ISSN 2089-0338

E-ISSN 2502-7921

Akreditasi

Kemenristekdikti Nomor:

21/E/KPT/2018

DAFTAR ISI

HALAMAN

■ PENGANTAR REDAKSI

iii

- Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat

113 - 131

Lutfi Amalia dan Palupi Lindiasari Samputra

- Program Peningkatan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur)

132 - 146

Oman Sukmana

- Upaya Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasaman Menanggulangi Kemiskinan

147 - 161

Hari Harjanto Setiawan

- Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat)

162 - 170

Sabinus Beni dan Blasius Manggu

- Pemberdayaan Kelompok Perempuan Menggunakan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa

171 - 184

Saftri Endah Winarti, Herawati, dan Fajar Sidik

- Peranan Penyuluh Sosial Masyarakat Sebagai Agen Perubahan dalam Pengembangan Masyarakat Lokal: Kasus Kota Banjarmasin

185 - 197

Sugiyanto dan Suradi

- Kerentanan Remaja Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Bandung

198 - 212

Santy Yanuar Pranawati, Adriana Soekandar Ginanjar, Rudolf Woodrow Matindas, dan Irwanto

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teoretis, membentuk kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Peringkat 2 oleh Kemenristek Dikti No 21/E/KPT/2018. Pada Volume 9, No. 02, Januari – April 2020 lebih banyak memuat tentang kemiskinan dari berbagai aspek. Selain tentang kemiskinan juga memuat tentang disabilitas, penyuluhan sosial dan kerentanan remaja perempuan korban eksploitasi seksual.

Tulisan Luthfi Amalia dan Palupi Lindiasari Samputra yang melihat tentang ketahanan ekonomi keluarga miskin penerima bantuan sosial yang menguji pengaruh tempat tinggal, pendapatan perkapita, pembiayaan pendidikan, jaminan keluarga, aset dan liabilities terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan yang kuat. Tulisan Oman Sukmana mengemukakan tentang program peningkatan ketrampilan bagi penyandang disabilitas netra antara lain bimbingan fisik mental, bimbingan sosial, bimbingan ketrampilan, penempatan di komunitas dan pelatihan lebih lanjut. Diharapkan penyandang disabilitas netra mempunyai ketrampilan kerja dan bisnis setelah lulus dari institusi. Tulisan Hari Harjanto Setiawan mengenai upaya terpadu pemerintah Kabupaten Pasaman menanggulangi kemiskinan. Tulisan ini berisi tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “Saiyo” yang didirikan Kabupaten Pasaman dalam menanggulangi kemiskinan.

Selanjutnya tulisan Sabinus Beni dan Blasius Manggu tentang efektifitas program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan di perbatasan yang dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian Sarawak. Selanjutnya tulisan Saftri Endah Winarti, Herawati dan Fajar Sidik tentang pemberdayaan kelompok perempuan menggunakan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pada artikel ini menjelaskan kendala dalam pelaksanaan kemitraan antara kelompok perempuan (PKK) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penulis selanjutnya Sugianto dan Suradi mengemukakan tentang peranan penyluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat lokal. Penulis yang terakhir adalah Santy Yanuar Pranawaty, Adriana Sukandar Ginanjar, Rudolf Woodrow Matindas dan Irwanto tentang kerentanan remaja perempuan korban eksploitasi seksual komersial. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai faktor kerentanan yaitu pengaruh lingkungan keluarga, teman sebaya dan faktor sosial psikologis remaja.

Semoga artikel tersebut dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik bagi praktisi maupun akademisi yang mengkaji permasalahan ini. Kami menyadari bahwa terbitan kali ini

masih jauh dari sempurna, sesuai dengan pepatah “tidak ada gading yang tidak retak”. Oleh karena itu, kami berharap masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam terwujudnya terbitan jurnal ini, kami menyampaikan terima kasih.

Redaksi

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Lutfi Amalia dan Palupi Lindiasari Samputra (Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia)

STRATEGI KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MISKIN PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, hal: 113-131.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tempat tinggal, pendapatan per kapita, pembiayaan pendidikan, jaminan keluarga, aset dan liabilities terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Metode penelitian dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, dengan alat analisis regresi logistik. Data terdiri dari 100 sampel rumah tangga miskin di wilayah Kelurahan Tanah Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pendapatan per kapita dan jaminan keluarga terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Sedangkan kepemilikan tempat tinggal dengan aset dan liabilities secara bersamaan, dan pembiayaan pendidikan anak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Pendapatan per kapita makin tinggi meningkatkan peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi kuat sebesar 27,257 kali dibanding keluarga miskin yang berpendapatan per kapita rendah. Namun, ketergantungan terhadap jaminan keluarga yang bersumber sebagian besar dari bantuan pemerintah berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi keluarga miskin sebesar 0,420 kali dibanding keluarga miskin yang tidak bergantung pada jaminan keluarga yang bersumber dari pemerintah. Strategi menabung secara periodik, meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan kualitas hidup dan meningkatkan sumber penghasilan dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin. Penyuluhan dan kampanye tentang strategi ketahanan ekonomi keluarga menjadi sangat penting untuk disosialisasikan kepada keluarga miskin agar mereka terus mengingat dan berusaha meningkatkan kualitas hidup serta ketahanan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: *strategi, ketahanan ekonomi, keluarga miskin.*

STRATEGY OF ECONOMIC RESILIENCE OF POOR FAMILIES WHO RECEIVE SOCIAL ASSISTANCE FUNDS IN TANAH TINGGI CENTRAL JAKARTA

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, page: 113-131.

Abstract

This study aims to examine the influence of housing, per capita income, education funding, family security, assets and liabilities to the chances of poor families having strong economic resilience. The research method with the quantitative method uses a questionnaire as an instrument of data collection, with a logistic regression analysis tool. Data consists of 100 samples of poor households in the Tanah Tinggi Village area. The results of the study show that there is an influence of residence, per capita income and education funding on the opportunities of poor families that have strong economic resilience. While assets and liabilities and family guarantees do not have a strong influence on the economic resilience of poor families. Per capita

income and education funding have the highest contribution to the chances of poor families having strong economic resilience, each at 42,823 times and 9,278 times. The strategy of saving periodically, increasing income, optimizing and reducing quality of life and increasing sources of income can help strengthen the economic resilience of poor families. Counseling and campaigns on family economic resilience strategies are very important to be socialized to poor families so that they continue to remember and try to improve the quality of life and family economic security.

Keywords: *strategy, economic resilience, poor families.*

Oman Sukmana (Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang)

PROGRAM PENINGKATAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA

(Studi di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur)

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, hal: 132-146.

Abstrak

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan indera untuk waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesetaraan hak. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas adalah melalui pembinaan yang dilakukan oleh Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang. Pertanyaan penelitian ini adalah apa dan bagaimana program peningkatan kemampuan untuk penyandang disabilitas netra di RSBN Malang?. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana program peningkatan kemampuan untuk penyandang disabilitas netra di RSBN Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara purposif yaitu pengelola Panti RSBN Malang, yang meliputi Kasubag TU, Pekerja Sosial, dan instruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan keterampilan bagi penyandang disabilitas netra yang dilaksanakan di RSBN Malang meliputi: (1) bimbingan fisik mental; (2) bimbingan sosial; (3) Bimbingan keterampilan; (4) Penempatan di komunitas; dan (5) Pelatihan lebih lanjut, sehingga penyandang cacat netra (visual) memiliki keterampilan kerja dan bisnis setelah lulus dari suatu institusi. Secara umum program peningkatan keterampilan ini mampu membuat para penyandang disabilitas netra menjadi lebih mandiri dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari.

Kata Kunci: *program, keterampilan, disabilitas netra.*

SKILL IMPROVEMENT PROGRAM FOR PERSONS WITH VISUAL DISABILITY

(Study on Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra in Malang City, East Java)

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, page: 132-146.

Abstract

Persons with Disabilities are anyone who experiences physical, intellectual, mental and sensory limitations for a long time in interacting with the environment that can experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equal rights. One among efforts to increase the capacity of persons with disabilities is through coaching conducted by Rehabilitasi Sosial Nina Netra (RSBN) orphanages in Malang. The research question consist of what and how is the capacity building program for people with visual disability at the RSBN orphanages in Malang? This study aims to find out how the skill improvement program for people with visual disabilities at the RSBN orphanages in Malang. The study used a qualitative approach and qualitative descriptive research. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The subjects of the study were determined purposively

that covers the managers of the RSBN orphanages in Malang: administration staff, instructor, and social worker. The results showed that the skill improvement program for people with visual disabilities included: (1) mental physical guidance; (2) social guidance; (3) Skills guidance; (4) Placement in the community; and (5) advance coaching, so that people with visual disabilities have work and business skills after graduating from an institution. This skill improvement program is able to make clients' visual disabilities become independent in carrying out their lives.

Keywords: program, skill, visual disability.

Hari Harjanto Setiawan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

UPAYA TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN MENANGGULANGI KEMISKINAN

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, hal: 147-161.

Abstrak

Kemiskinan di Kabupaten Pasaman, saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan bersumber dari pemahaman dalam mengatasi masalah masih bersifat sektoral, belum terarah kepada sasaran dan belum berkelanjutan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) "SAIYO" sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Supaya dapat menggambarkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman dengan detail, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial penanggulangan kemiskinan. Informan yang berkontribusi dalam memberikan data secara langsung: penerima manfaat, petugas SLRT dan stake holders yang terlibat dalam SLRT. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, *focus group discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya terpadu Pemerintah Kabupaten Pasaman diselenggarakan melalui SLRT yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta menghubungkan dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan. SLRT sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi. Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: situasi kemiskinan di Kabupaten Pasaman, program penanggulangan kemiskinan, upaya terpadu menanggulangi kemiskinan dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu "SAIYO".

Kata Kunci: terpadu; penanggulangan kemiskinan; SLRT.

INTEGRATED EFFORTS OF THE GOVERNMENT OF PASAMAN DISTRICT TO POVERTY ALLEVIATION

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, page: 147-161.

Abstract

Poverty in Pasaman Regency, is still one among problems that needs attention. Poverty alleviation has not been optimally stemmed from an understanding in overcoming problems that are still sectoral, not targetted yet and not sustainable. The "SAIYO" Integrated Services and Referral System (SLRT) as an effort to tackle poverty. In order to describe poverty reduction efforts in Pasaman Regency in detail, this study uses a qualitative approach that is a research process and understanding based on methodology that investigates a social phenomenon of poverty alleviation. Informants who contribute in providing data cover: beneficiaries, SLRT officers and stake holders involved in SLRT. Data collection was carried out by interview, observation, *focus group discussion* (FGD) and documentatary study. The results of this study indicate that the integrated efforts of the Pasaman Regency Government were carried out through the SLRT which helped to identify the needs of the poor and vulnerable, and linked them to social protection

and poverty reduction programs according to their needs. SLRT as a front line that is engaged in direct social services, namely the accessibility of social services, social services for referral, social services for advocacy, as well as data and information providers. Specifically, this study aims to provide information about: the poverty situation in Pasaman District, poverty alleviation programs, integrated efforts to reduce poverty and the "SAIYO" Integrated Service and Referral System.

Keywords: integrated; poverty reduction; SLRT.

Sabinus Beni dan Blasius Manggu (Program Studi Kewirausahaan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Buana)

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERBATASAN (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat)

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, hal: 162-170.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian Sarawak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan Kemiskinan di daerah Perbatasan. Metode penelitian merupakan metode kuantitatif yang menggunakan desain non eksperimental. Permasalahan pokok penelitian adalah tingkat putus sekolah dan partisipasi pemeriksaan kesehatan oleh masyarakat Pra Sejahtera karena ketiadaan biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan di daerah perbatasan yang terlihat dari menurunnya angka putus sekolah, tingginya partisipasi mengunjungi fasilitas kesehatan baik untuk kegiatan posyandu maupun pemeriksaan kesehatan serta kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang bersumber dari penyisihan dana bantuan yang diterima. Walaupun, dari total penduduk miskin di Kecamatan Jagoi Babang berjumlah 882 Kepala Keluarga, sementara Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Jagoi Babang per tahun 2018 sebanyak 357 orang, artinya masih ada 527 keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan. Sebagai saran kepada pemerintah, sebaiknya dilakukan pembaharuan data secara terus menerus dalam Basis Data Terpadu dari data yang digunakan tahun 2015 serta adanya program pemberdayaan bagi masyarakat perbatasan dengan mendirikan Sekolah Lapangan yang dapat meningkatkan *Soft Skill* dan *Hard Skill* dalam ilmu Kewirausahaan agar masyarakat tidak selalu berorientasi untuk bekerja di Malaysia.

Kata Kunci: perbatasan, pemberdayaan, kemiskinan.

EFFECTIVENESS OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN IN POVERTY ALLEVIATION IN THE BORDER (Case Study of Jagoi Babang District, Bengkayang Regency, West Borneo)

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, page: 162-170.

Abstract

This research was conducted in Jagoi Babang District, Bengkayang Regency, West Kalimantan, which is borders area with the State of Sarawak, Malaysia. This study aims to see the effectiveness of the implementation of the Program Keluarga Harapan in alleviating Poverty in the Border area. The research method is a quantitative method that uses a non-experimental design. The main problems of the study are the level of school dropout and participation in health checks by the Prosperous community due to lack of funds. The results showed that the program keluarga harapan was very effective in alleviating poverty in the border areas as seen from the dropout rate, the high participation in visiting health facilities both for posyandu activities and health checks as well as the ability to meet basic needs stemming from the provision of aid funds received. Although, of the total number of poor people in Jagoi Babang Subdistrict, there are 882 families,

while beneficiary family in Jagoi Babang Subdistrict in 2018 is 357 beneficiary family, meaning that there are still 527 Poor Family who have not involved the program. As a suggestion to the government, it is better to do continuous data updating in the Integrated Database of data used in 2015 as well as an empowerment program for border communities by establishing Field Schools that can improve Soft Skills and Hard Skills in Entrepreneurship science so that the community is not always oriented working in Malaysia.

Keywords: borders, empowerment, poverty.

Saftri Endah Winarti, Herawati (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta)

Fajar Sidik (Program Studi Kebijakan Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta)

PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN MENGGUNAKAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, hal: 171-184.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan kemitraan antara kelompok perempuan (PKK) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Pemerintah Desa Ponggok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Penelitian kualitatif dengan pendekatan metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena pendirian dan pengembangan BUM Desa setelah kebijakan dana desa ditetapkan mulai tahun 2014 pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Hanya dalam beberapa tahun berjalan, jumlah BUM Desa yang berdiri meningkat signifikan, namun banyak BUM Desa yang tidak mampu aktif dan produktif dalam menjalankan bisnis usaha. Desa Ponggok menjadi desa berprestasi dan percontohan nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, sehingga dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk dipelajari lebih mendalam. Dalam konteks penelitian ini, BUM Desa dipahami dengan menggunakan teori *social enterprise* sesuai dengan kedudukan, peran, dan fungsinya sebagai lembaga sosial-ekonomi di pedesaan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Dalam kegiatan eksplorasi permasalahan, data primer dan sekunder dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dan sekunder yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, tim peneliti dalam penelitian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) berbasis BUM Desa dalam mengembangkan bisnis usaha kecil produk lokal khas desa di area desa wisata telah mampu meningkatkan pendapatan tambahan bagi kelompok-kelompok perempuan, namun faktanya menunjukkan hasil keuntungan bisnis usaha yang diperoleh masih cenderung didominasi oleh PKK induk (pusat) dari pada kelompok-kelompok perempuan yang dibina di tingkat paling bawah. Rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan/perbaikan bagi Pemerintah Desa Ponggok agar melakukan pemberdayaan masyarakat dari akar rumput, sehingga optimalisasi upaya untuk mereduksi masalah kemiskinan di pedesaan dapat diakselerasi dengan tindakan kongkret dan tepat sasaran.

Kata Kunci : pemberdayaan, kelompok perempuan, BUM Desa, kesejahteraan sosial, *social enterprise*, desa ponggok.

THE EMPOWERMENT OF WOMEN GROUPS USING THE VILLAGE-OWNED ENTERPRISE IN INCREASING VILLAGE COMMUNITY INCOME

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, page: 171-184.

Abstract

This article aims to explain the obstacles in implementing partnerships between women's groups (PKK) and

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) by the Ponggok Village Government to improve the welfare of the community in Ponggok Village, Klaten Regency. Qualitative research with a case study method approach is used to explore problems that occur in the field. This research is motivated by the phenomenon of the establishment and development of BUM Desa after the village funding policy was set to begin in 2014 during the administration of President Jokowi. In just a few years running, the number of BUM Desa that stands significantly increased, but many BUM Desa are unable to be active and productive in running a business. Ponggok Village has become a village of achievement and national pilot designation designated by the Central Government so that it is used as a research location for further study. In the context of this study, BUM Desa is understood by using Social Enterprise theory in accordance with its position, role and function as a socio-economic institution in rural areas. The study was conducted qualitatively with the case study approach method. In problem exploration activities, primary and secondary data are collected using interview, observation, and documentation techniques. Primary and secondary data obtained are then analyzed using qualitative data analysis techniques according to Miles and Huberman. Based on the results of data analysis that has been done, the research team in this study can conclude that the empowerment of BUM Desa-based women groups (PKK) in developing small businesses that are typical local products of villages in the tourist village area has been able to increase additional income for women's groups, however, the fact is that the results of the business profits obtained still tend to be dominated by the parent PKK (central) rather than the groups of women fostered at the lowest level. The recommendations that can be given from this research are: the results of this study can be used as input/improvements for the Ponggok Village Government to empower communities from the grassroots so that the optimization of efforts to reduce the problem of poverty in rural areas can be accelerated with concrete and targeted actions.

Keywords: *empowerment, women's group, BUM Desa, social welfare, social enterprise, ponggok village.*

Sugiyanto dan Suradi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

PERANAN PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL: KASUS KOTA BANJARMASIN

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, hal: 185-197.

Abstrak

Penyuluh sosial masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat lokal. Artikel ini membahas tentang peranan penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat lokal di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu penyuluh sosial masyarakat, penanggung jawab kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin, serta tokoh masyarakat. Data dihimpun dengan wawancara, dan diskusi kelompok terarah. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk naratif, sehingga diperoleh informasi tentang aktivitas penyuluh sosial masyarakat dan peranan mereka sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat lokal. Hasil penelitian, bahwa penyuluh sosial masyarakat telah melaksanakan peranannya sebagai agen perubahan, dan hasilnya sudah dirasakan oleh masyarakat lokal. Namun demikian, peranan yang dilaksanakan belum optimal disebabkan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur peranan mereka, masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengembangan masyarakat, dan terbatasnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar ada regulasi yang secara khusus mengatur tugas mereka, peningkatan kapasitas, serta pemberian dukungan sarana dalam pelaksanaan tugas mereka.

Kata kunci : *penyuluh sosial masyarakat, agen perubahan, pengembangan masyarakat lokal.*

ROLE OF COMMUNITY SOCIAL EXTENSION WORKERS AS AGENT OF CHANGE IN DEVELOPMENT LOCAL COMMUNITIES: CASE BANJARMASIN CITY

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, page: 185-197.

Abstract

Community social volunteers have an important role in the development of local communities. This article discusses the role of social extension workers as agents of change in the development of local communities in the city of Banjarmasin. This research uses descriptive method with qualitative approach. The data sources are the community social instructor, the person in charge of the activities of the South Kalimantan Provincial Social Service and the Banjarmasin City Social Service, and community leaders. Data collected by interview, and focus group discussions. The data that has been collected is processed and analyzed qualitatively in narrative form, so that information is obtained about the activities of community social volunteers and their role as agents of change in the development of local communities. The results of the study, that the social instructor community has carried out their role as agents of change, and the results have been felt by the local community. However, the roles implemented are not optimal due to the absence of regulations that specifically regulate their roles, the lack of knowledge and skills related to community development, and the limited infrastructure that supports the implementation of tasks. Based on the research findings, suggest that there are regulations that specifically regulate their tasks, capacity building, and providing support facilities in carrying out their duties.

Keywords: *community social volunteers, agents of change, local community development.*

Santy Yanuar Pranawati, Adriana Soekandar Ginanjar, dan Rudolf Woodrow Matindas (Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Irwanto (Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia)

KERENTANAN REMAJA PEREMPUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI BANDUNG

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, hal: 198-212.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam mengenai pengalaman hidup pada remaja korban eksploitasi seksual komersial. Di Indonesia kasus ini semakin menunjukkan kompleksitasnya. Remaja menjadi korban tidak hanya karena terjatuh di dalam lingkaran perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, akan tetapi juga terdapat remaja dengan pengalaman hidup yang membuatnya rentan untuk dieksploitasi secara seksual. Penelitian ini akan fokus pada remaja pada kelompok kedua. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Jumlah partisipan keseluruhan adalah 8 remaja perempuan yang berusia 17-24 tahun yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial sejak usia 14-17 tahun. Hasil penelitian menunjukkan terdapat berbagai faktor kerentanan, yaitu pengaruh lingkungan keluarga dan teman sebaya, serta faktor sosial-psikologis perkembangan tahap usia remaja. Selain itu, terdapat kondisi yang memperkuat kerentanan remaja, seperti perilaku seks bebas dan perasaan kehilangan harga diri, serta kebutuhan akan uang. Sedangkan dampak-dampak yang ditimbulkan meliputi dampak fisik, psikologis, dan pendidikan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pekerja sosial khususnya dalam bidang perlindungan anak dan remaja dalam upaya penanganan dan pencegahan remaja untuk menjadi korban eksploitasi seksual.

Kata Kunci: *remaja, rentan, pengalaman hidup, eksploitasi seksual komersial, kualitatif.*

THE VULNERABILITY OF FEMALE ADOLESCENTS AS VICTIMS OF COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION IN BANDUNG

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, April 2020, page: 198-212.

Abstract

This study was conducted to investigate the life experiences of adolescents who were sexually exploited. These cases show the complexity of the situation in Indonesia. Adolescents are victimized not only because they are subjected to threats or pressure from commercial sexual exploitation groups, but also due to previous life experiences that make them more vulnerable to sexual exploitation. In this study, we focused on the latter. We carried out a case study utilizing in-depth interviews, participant observation and non-participant observation. The participants of this study were eight girls (17 to 24 years old) who had been sexually exploited between the ages of 14 and 17. Our findings suggest that there are several factors that contribute to their vulnerability, such as the influence of family and peers, adolescent development as a socio-psychological factor, premarital sex, the loss of self-esteem, and the need for money. Moreover, this study also exposes the physical, psychological, and educational impacts of being involved in commercial sexual exploitation. An implication of this study would be to provide social workers with essential information, specifically regarding protection of children and adolescents and also to promote early intervention programs for those who are vulnerable to becoming victims of commercial sexual exploitation.

Keywords: *adolescent, vulnerable, life experience, commercial sexual exploitation, qualitative*

STRATEGI KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MISKIN PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT

STRATEGY OF ECONOMIC RESILIENCE OF POOR FAMILIES WHO RECEIVE SOSIAL ASSISTANCE FUNDS IN TANAH TINGGI CENTRAL JAKARTA

Lutfi Amalia dan Palupi Lindiasari Samputra

Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia

Jl. Salemba Raya No 4, Jakarta Pusat, Indonesia

E-mail: Lutfiamaliaadel@gmail.com

Diterima: 28 Juli 2019, Direvisi: 17 Maret 2020; Disetujui: 14 April 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tempat tinggal, pendapatan per kapita, pembiayaan pendidikan, jaminan keluarga, aset dan liabilities terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Metode penelitian dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, dengan alat analisis regresi logistik. Data terdiri dari 100 sampel rumah tangga miskin di wilayah Kelurahan Tanah Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pendapatan per kapita dan jaminan keluarga terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Sedangkan kepemilikan tempat tinggal dengan aset dan liabilities secara bersamaan, dan pembiayaan pendidikan anak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Pendapatan per kapita makin tinggi meningkatkan peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi kuat sebesar 27,257 kali dibanding keluarga miskin yang berpendapatan per kapita rendah. Namun, ketergantungan terhadap jaminan keluarga yang bersumber sebagian besar dari bantuan pemerintah berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi keluarga miskin sebesar 0,420 kali dibanding keluarga miskin yang tidak bergantung pada jaminan keluarga yang bersumber dari pemerintah. Strategi menabung secara periodik, meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan kualitas hidup dan meningkatkan sumber penghasilan dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin. Penyuluhan dan kampanye tentang strategi ketahanan ekonomi keluarga menjadi sangat penting untuk disosialisasikan kepada keluarga miskin agar mereka terus mengingat dan berusaha meningkatkan kualitas hidup serta ketahanan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: *strategi, ketahanan ekonomi, keluarga miskin.*

Abstract

This study aims to examine the influence of housing, per capita income, education funding, family security, assets and liabilities to the chances of poor families having strong economic resilience. The research method with the quantitative method uses a questionnaire as an instrument of data collection, with a logistic regression analysis tool. Data consists of 100 samples of poor households in the Tanah Tinggi Village area. The results of the study show that there is an influence of residence, per capita income and education funding on the opportunities of poor families that have strong economic resilience. While assets and liabilities and family guarantees do not have a strong influence on the economic resilience of poor families. Per capita income and education funding have the highest contribution to the chances of poor families having strong economic resilience, each at 42,823 times and 9,278 times. The strategy of saving periodically, increasing income, optimizing and reducing quality of life and increasing sources of income can help strengthen the economic resilience of poor families. Counseling and campaigns on family economic resilience strategies are very important to be socialized to poor families so that they continue to remember and try to improve the quality of life and family economic security.

Keywords: *strategy, economic resilience, poor families.*

PENDAHULUAN

Keluarga miskin merupakan keluarga yang memiliki penghasilan rendah, tidak memiliki pekerjaan tetap, pendidikan yang masih rendah bahkan tidak berpendidikan, tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak dapat memenuhi standar gizi minimal (Rejekiingsih, 2011). Keluarga miskin juga merupakan keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena keterbatasan sumber daya. Pemerintah mengkategorikan keluarga miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) (Cahyat A. , 2004). Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret 2018, standar Garis Kemiskinan (GK) bagi keluarga miskin yaitu memiliki nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori/kapita/hari. Selain itu, Badan Pusat Statistik berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret 2018 mengatakan bahwa pendapatan minimum yang harus dimiliki oleh keluarga Indonesia berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) nasional pada Maret 2018 adalah Rp401.220/kapita/bulan. Garis Kemiskinan (GK) nasional sebesar Rp401.220/kapita/bulan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yaitu Rp294.806/kapita/bulan ditambah dengan Garis Kemiskinan non makanan (GKNM) yaitu Rp106.414/kapita/bulan. Oleh karena itu, keluarga miskin yang memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 4,59 orang memerlukan pengeluaran agar dapat hidup layak sebesar Rp1,84 juta/keluarga miskin/bulan. Jika pengeluaran rumah tangga kurang dari Rp1,84 juta/keluarga miskin/bulan, maka keluarga tersebut termasuk dalam kategori keluarga miskin (Badan Pusat Statistik, 2018).

Garis kemiskinan (GK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) ternyata bersifat relatif dan akan terus mengalami peningkatan (Cahyat A. , 2007). Hal tersebut dilakukan agar pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Karena garis kemiskinan sejak bulan Maret 2015-Maret 2018 telah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,27% setiap semester. Oleh karena itu, pemerintah mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan.

Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa salah satu wilayah yang mengalami penurunan angka kemiskinan adalah wilayah Jakarta Pusat. Jika sebelumnya angka kemiskinan di wilayah Jakarta Pusat meningkat dari 33,62 ribu penduduk pada tahun 2013 menjadi 37,65 ribu penduduk pada tahun 2014 dan terus meningkat menjadi 38,01 ribu penduduk pada tahun 2015. Kini mengalami penurunan menjadi 35,82 ribu penduduk pada tahun 2016 dan terus mengalami penurunan menjadi 34,83 ribu penduduk pada tahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 2018).

Ternyata penurunan angka kemiskinan yang diumumkan pemerintah, bukan hanya disebabkan oleh peningkatan Garis Kemiskinan (GK) yang telah ditetapkan. Namun juga disebabkan oleh faktor lain yang salah satunya merupakan adanya pemerintah dalam menyalurkan dana Bantuan Sosial (bansos) bagi masyarakat miskin yang sangat berlebihan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Saat dilaksanakannya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2018, ternyata ada penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang terhitung naik signifikan hampir sebesar 87,6% pada akhir bulan Maret 2018. Penyaluran dana Bantuan Sosial (bansos) meningkat sangat signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu pada

tahun 2017 dan 2018. Anggaran dana bantuan sosial (bansos) pada tahun 2017 meningkat sebanyak 11,46% atau sebesar Rp55,3 Triliun dan pada tahun 2018 meningkat sebanyak 41,42% atau sebesar Rp78.2 Triliun. Karena sebelumnya anggaran dana bantuan sosial pada tahun 2016 menurun sebanyak 48,93% atau sebesar Rp49,61 triliun dari anggaran dana bantuan sosial pada tahun 2015 sebanyak Rp97.15 triliun. Oleh karena itu, jika anggaran dana bantuan sosial (bansos) dikurangi, maka jumlah penduduk miskin dikhawatirkan akan kembali mengalami peningkatan.

Kekhawatiran tentang adanya peningkatan kemiskinan kembali jika dana bantuan sosial dikurangi dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor yang pertama karena kebijakan pemerintah untuk memberikan dana bantuan sosial (bansos) belum sepenuhnya efektif menjadi solusi perentas kemiskinan. Karena secara psikologis keluarga yang diberikan dana bantuan sosial kemungkinan akan memiliki rasa ketergantungan terhadap dana tersebut dan dikhawatirkan tidak mau bekerja mencari nafkah tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Faktor yang kedua adalah kebijakan untuk menaikkan standar Garis Kemiskinan (GK) bagi keluarga miskin bukan merupakan solusi yang tepat, karena bagi keluarga miskin yang sudah mencoba bertahan dan mencoba keluar dari garis kemiskinan berdasarkan standar Garis Kemiskinan (GK) yang telah ditetapkan pada semester sebelumnya dapat tidak mampu bertahan mengikuti standar Garis Kemiskinan (GK) yang terbaru. Sehingga keluarga miskin yang sudah keluar dari Garis Kemiskinan (GK) maupun bagi yang sedang mencoba bertahan dan keluar dari Garis Kemiskinan (GK) menjadi kembali miskin dan tentunya dapat menaikkan angka kemiskinan kembali.

Faktor yang ketiga yaitu karena adanya kesalahan strategi pengelolaan pendapatan yang dimiliki oleh keluarga miskin karena adanya gejolak ekonomi yang mampu meningkatkan daya beli keluarga. Peningkatan daya beli keluarga menyebabkan kesalahan strategi dalam hal pengelolaan pendapatan yang dimiliki oleh keluarga miskin. Hal tersebut dapat mengakibatkan kondisi keluarga yang terus menerus akan merasa miskin, serba kekurangan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga. Sehingga strategi pengelolaan pendapatan bagi keluarga miskin diperlukan agar keluarga miskin dapat memiliki ketahanan dalam aspek ekonomi. Karena strategi menurut Rangkuti merupakan perencanaan utama yang menjelaskan sebuah institusi untuk mencapai tujuan berdasarkan misi yang telah direncanakan sebelumnya (Rangkuti, 2013).

Samputra mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak memiliki dampak langsung secara signifikan terhadap upaya menurunkan kemiskinan perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menentukan upaya pengetasan kemiskinan. Jika sebuah keluarga ingin memiliki hidup layak dan tidak kekurangan, diperlukan instrumen lain berupa dana bantuan sosial dan strategi dalam mengelola pendapatan yang dimiliki oleh keluarga dengan baik guna mencapai ketahanan dalam aspek ekonomi (Samputra & Munandar, 2019). Ketahanan ekonomi keluarga menurut Doriza dapat didefinisikan sebagai kemampuan keluarga dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan pembelian barang dan jasa serta kebutuhan uang yang diperlukan dalam keluarga (Doriza, 2015). Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pola pengelolaan, menganalisis pengaruh tempat tinggal, pendapatan perkapita, aset dan liabilities, pembiayaan pendidikan

anak, dan jaminan keluarga terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat.

Keluarga Miskin

Keluarga miskin didefinisikan sebagai keluarga yang memiliki kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga guna meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dari aspek keuangan dan aspek-aspek lainnya. Badan Pusat Statistik mendefinisikan keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan serta memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2018). World Bank (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan kesejahteraan (deprivation of well being). Karakteristik keluarga miskin yaitu 1) memiliki pendapatan yang masih rendah; 2) tidak memiliki pekerjaan tetap; 3) pendidikan yang rendah bahkan tidak berpendidikan; 4) tidak memiliki tempat tinggal; dan 5) tidak dapat memenuhi standar gizi minimal (Rejekiingsih, 2011). Sementara itu, kemiskinan menurut Spicker juga diartikan berdasarkan tiga kategori konsep yaitu miskin karena tidak memiliki sesuatu yang mereka butuhkan, miskin karena memiliki pendapatan yang rendah dan miskin karena masuk kedalam keadaan sosial yang miskin (Cahyawan & Machdum, 2019). Menurut Chambers kemiskinan juga terbagi kedalam 4 bentuk, yaitu (1) kemiskinan absolut bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar termasuk sandang, pangan dan papan; (2) kemiskinan relatif jika kondisi miskin dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; (3) kemiskinan kultural yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak mau berusaha, malas, pemboros dan tidak kreatif meskipun mendapatkan bantuan dari pihak lain; dan (4) kemiskinan struktural yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya pada sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tetapi menambah tingkat kemiskinan (Habibullah, 2019).

Faktor Penyebab Keluarga Miskin

Kemiskinan dalam keluarga didasari oleh kurangnya pendapatan yang dimiliki oleh keluargasehinggatidakmampuuntukmencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Terdapat dua faktor utama penyebab keluarga miskin yaitu 1) tingkat pendapatan nasional yang fluktuatif dan 2) adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan (Todaro & Smith, 2006). Ahli lain mengatakan bahwa faktor penyebab keluarga miskin adalah 1) keterbatasan sumber daya alam (SDA); 2) rendahnya tingkat pendidikan anggota keluarga; dan 3) rendahnya kesehatan yang dapat menghambat produktivitas keluarga (Amar, 2012).

Ukuran Kemiskinan keluarga

Ukuran kemiskinan keluarga menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ditentukan oleh Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) pada bulan Maret 2018 berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) yaitu minimum Rp401.220/kapita/bulan pendapatan yang harus dimiliki oleh keluarga. Garis Kemiskinan sebesar Rp401.220/kapita/bulan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp294.806/kapita/bulan dan Garis Kemiskinan non makanan (GKNM) yaitu Rp106.414/kapita/bulan. Hal tersebut menyebabkan keluarga miskin yang memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 4,59 orang memerlukan pengeluaran agar dapat hidup layak sebesar Rp1,84 juta/

keluarga miskin/bulan. Jika pengeluaran rumah tangga kurang dari Rp1,84 juta/keluarga miskin/bulan, maka keluarga tersebut termasuk dalam kategori keluarga miskin (Badan Pusat Statistik, 2018).

Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah konsep untuk mempertahankan keteraturan, kekuatan, kondisi dinamis dan kestabilan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari segala aspek yang dapat berpotensi terjadinya perubahan. Ketahanan nasional juga dapat didefinisikan sebagai kekuatan suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan dan ancaman (Usman, 2003). Pendapat lain mengatakan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi bermacam tantangan, hambatan dan ancaman guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (Suradinata, 2005).

Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga

Keberhasilan tujuan dalam hidup membutuhkan strategi untuk menjalankan visi dan misi kehidupan sesuai dengan yang telah direncanakan. Strategi merupakan cara untuk mencapai sebuah tujuan yang perlu dicapai. Menurut Tjiptono, strategi merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu (Tjiptono, 2006). Strategi juga merupakan rangkaian rencana untuk pengambilan keputusan dan tindakan pengelolaan guna menentukan keberhasilan pada suatu institusi dalam jangka panjang yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan cara dengan cara perencanaan jangka panjang, implementasi, evaluasi dan pengendalian (Purnomo, 1996).

Ketahanan berasal dari bahasa latin yaitu “*Resilire*” yang berarti melompat kembali

berkaitan dengan kemampuan pemulihan seseorang dengan cepat dari efek sumber masalah yang dialami. Ketahanan ekonomi keluarga merupakan sebuah kondisi dan kemampuan yang memungkinkan keluarga untuk pulih dan bangkit dari sumber masalah dalam aspek ekonomi (Briguglio, 2006). Ketahanan ekonomi bukan hanya tentang bagaimana keluarga mampu bertahan dari masalah keterpurukan dalam bidang ekonomi, namun juga tentang bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga (Center of Local Economis Strategis, 2016). Ketahanan ekonomi keluarga menurut Bank of International Settlements (BIS) merupakan kemampuan keluarga dalam bidang ekonomi untuk cepat pulih dari goncangan dan masalah yang merugikan dan mengandung dampak ketidakseimbangan dalam keuangan (Bank of International Settlements (BIS), 2016).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi ketahanan ekonomi keluarga adalah suatu rencana untuk pengambilan keputusan keluarga dalam bertahan dan menciptakan kondisi baru saat terjadi krisis ekonomi melalui observasi lingkungan, perencanaan jangka panjang berdasarkan sumber daya yang dimiliki, implementasi, evaluasi dan pengendalian guna mencapai keberhasilan tujuan untuk hidup layak dan mandiri.

Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan ekonomi keluarga dapat terlihat jika suatu keluarga dapat memenuhi syarat berdasarkan indikator ketahanan ekonomi keluarga yang telah ditentukan (Hasanah & Mariastuti, 2015). Indikator ketahanan ekonomi keluarga juga dapat menjadi acuan bagi keluarga untuk dapat hidup layak, mandiri dan tahan terhadap ancaman serta krisis ekonomi. Indikator ketahanan keluarga menurut

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki empat dimensi yaitu 1) ketersediaan tempat tinggal keluarga; 2) memiliki pendapatan perkapita perbulan keluarga; 3) pembiayaan pendidikan anak yang tercukupi; dan 4) memiliki jaminan keuangan keluarga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016). Sedangkan *Department of Family and Community Services Australia* mengatakan bahwa indikator ketahanan ekonomi keluarga adalah asset dan liabilities (Department of Family and Community Services, 2000).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan kuisioner. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan alat analisis kuantitatif deskriptif. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah *Statistical Package for The Sciences (SPSS)* (Ghazali, 2011). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sample penelitian. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Jumlah populasi KK di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat adalah 14.102 KK dari total 14 RW. Sehingga peneliti memberikan asumsi bahwa tiap RW memiliki jumlah bobot yang sama yaitu sebanyak 1007 KK per RW. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini berdasarkan jumlah 100 sampel yang terdiri dari masing-masing 25 sampel dari RW 08, RW 11 dan RW 12. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui observasi dan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terhadap buku, jurnal, dan artikel maupun dengan cara menelaah dokumen-

dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian dan relevan dengan penelitian (Bungin, 2005).

Pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan independen. Variabel independen pada penelitian ini adalah tempat tinggal, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, jaminan keluarga, aset dan liabilities. Variabel dependen pada penelitian ini adalah peluang ketahanan ekonomi keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan menggunakan *Statistical Package for The Sciences (SPSS)* untuk uji regresi logistik. Dalam metode regresi logistik, maka akan diukur dengan kategori 1 = responden tergolong memiliki ketahanan ekonomi yang kuat, jika memenuhi minimal tiga dari variabel independen (tempat tinggal, pendapatan perkapita, aset dan liabilities, jaminan keluarga dan pembiayaan pendidikan) dan 0 = responden tergolong memiliki ketahanan ekonomi yang tidak kuat, jika responden hanya memenuhi dua atau salah satu dari variabel independen (tempat tinggal, pendapatan perkapita, aset dan liabilities, jaminan keluarga dan pembiayaan pendidikan) (Cholilawati & Hasanah, 2015).

Persamaan regresi logistik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5$$

Ket:

y = probability terjadinya kejadian (1) dan sebaliknya (0)

1 = keluarga miskin yang memiliki ketahanan ekonomi tinggi atau kuat

0 = keluarga miskin yang memiliki ketahanan ekonomi yang tidak kuat

X_1 = Tempat Tinggal

(1 = memiliki rumah sewa atau memiliki rumah milik sendiri namun tidak memiliki

biaya perawatan rumah; 2= memiliki rumah sewa atau rumah milik sendiri namun memiliki biaya perawatan rumah 1000-10.000/bulan; 3= memiliki rumah milik sendiri namun memiliki biaya perawatan rumah 11000-20.000/bulan; 4= memiliki rumah milik sendiri dan memiliki biaya perawatan rumah >20.000/bulan)

X_2 =Pendapatan Perkapita (1 = pengeluaran perbulan memiliki selisih >50% dari jumlah pendapatan perbulan atau GK; 2 = pengeluaran perbulan memiliki selisih <50% dari pendapatan atau GK); 3 = antara pendapatan dan pengeluaran memiliki jumlah yang sama dengan jumlah GK; 4 = pendapatan jika dikurang pengeluaran perbulan memiliki sisa > GK)

X_3 = Aset dan Liabilities (1 = hutang perbulan memiliki selisih >50% dari aset atau pendapatan perbulan; 2 = hutang perbulan memiliki selisih <50% dari aset atau pendapatan); 3 = antara hutang dan aset memiliki jumlah yang sama; 4 = aset jika dikurang hutang perbulan memiliki nilai > dari pendapatan)

X_4 = Pembiayaan Pendidikan Anak
(1 = hanya mendapatkan bantuan biaya sekolah; 2= mendapatkan bantuan biaya sekolah dan perlengkapan sekolah anak; 3= mendapatkan bantuan biaya sekolah, perlengkapan sekolah anak, dan mampu memenuhi uang transport sekolah anak; 4= mendapatkan bantuan biaya sekolah, perlengkapan sekolah anak, mampu memenuhi uang transport sekolah anak, mendapatkan beasiswa, mampu memenuhi les tambahan untuk anak)

X_5 =Jaminan Keluarga (1= tidak memiliki tabungan dan tidak memiliki jaminan kesehatan; 2 = tidak memiliki tabungan namun memiliki jaminan kesehatan gratis dari pemerintah; 3= memiliki tabungan Rp10.000-100.000/bulan namun memiliki jaminan kesehatan gratis dari pemerintah

atau tidak memiliki tabungan namun mampu membayar iuran jaminan kesehatan; 4= memiliki tabungan >Rp100.000/bulan dan mampu membayar iuran jaminan kesehatan)

Data variable independen dengan skala ordinal diubah menjadi skala interval dengan metode MSI (Method of Succesive Interval). Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis regresi logistic. Langkah pertama dilakukan uji kecocokan model (*Goodness of Fit*) untuk menguji keselarasan antara model dengan nilai observasinya, dengan *Hosmer and Lemeshow Test*. Hipotesis dalam pengujian ini adalah :

H0 : Model sesuai dengan nilai observasinya

H1 : Model tidak sesuai dengan nilai observasinya

Model regresi dapat diterima jika berhasil menerima Ho dan dapat dilanjutkan pada tahap uji parameter serentak (*Omnibus Tests of Model Coefficients*), selanjutnya tahap uji parameter parsial (*Uji-Wald*) dan interpretasi nilai koefisien regresi dengan *Odds Ratio (Exp(B))*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pengelolaan Ekonomi Keluarga Miskin Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat

Pola pengelolaan ekonomi keluarga pada keluarga miskin di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat sangat bervariasi. Sebanyak 28% dari total 100 responden mengatakan bahwa pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sisanya sebanyak 25% dari total 100 responden mengatakan bahwa pendapatan mereka sedang, 25% dari total 100 responden mengatakan bahwa pendapatan mereka kurang cukup dan sebanyak 22% dari total 100 responden mengatakan bahwa pendapatan mereka tidak cukup. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu

faktornya karena sebanyak 65% dari total 100 responden memiliki pendapatan perkapita kurang dari 3 juta perbulan. Sisanya sebanyak 35% dari total 100 responden memiliki pendapatan lebih dari 3 juta perbulan. Sebagian besar responden pada penelitian ini juga tidak memiliki rumah milik sendiri. Sebanyak 93% dari total 100 responden menyewa rumah sedangkan sisanya sebanyak 3% memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar responden perlu mengeluarkan uang lebih tidak hanya untuk perawatan rumah, namun juga untuk menyewa rumah.

Sebagian responden pada penelitian ini atau sebesar 55% dari total 100 responden mengeluarkan uang sebanyak Rp50.000 untuk biaya perawatan rumah. Sisanya sebanyak 24% mengeluarkan uang >Rp150.000; sebanyak 15% mengeluarkan uang mulai dari Rp51.000 sampai Rp100.000 dan sebanyak 6% mengeluarkan uang mulai dari Rp100.000 sampai Rp150.000. Responden pada penelitian ini juga sebagian besar tidak berhutang. Karena sebanyak 76% dari total 100 responden tidak memiliki hutang. Sisanya sebanyak 34% dari total 100 responden memiliki hutang mulai dari Rp300.000 sampai >Rp900.000.

Sebagian besar responden yang memiliki hutang, jenis kebutuhan yang mereka hutangi adalah aset berupa barang elektronik. Karena menurut mereka, memiliki aset adalah hal yang paling penting. Jika sewaktu-waktu mereka sedang berada pada keadaan yang sulit, mereka bisa menjualnya terlebih dahulu sebelum meminta pada kerabat dekat maupun berhutang pada pihak lainnya. Oleh karena itu, sebanyak 61% dari total 100 responden memiliki nilai nominal total aset >3 juta rupiah. Sisanya sebanyak 39% dari total responden memiliki nilai nominal total aset < 3 juta rupiah. Responden pada penelitian ini sebanyak 84%

juga memiliki nilai stress finansial yang sedikit yaitu 0-0,1 karena sebagian besar responden memiliki aset yang lebih besar jika dibandingkan dengan memiliki hutang. Namun, responden pada penelitian ini sebanyak 92% dari total 100 responden tidak memiliki tabungan uang tunai. Mereka belum memiliki pemikiran bahwa menabung adalah hal yang paling penting jika sewaktu-waktu membutuhkan uang dalam keadaan sulit. Mereka merasa belum memiliki kecukupan uang untuk disisihkan atau untuk menabung. Karena mereka merasa lebih baik menghabiskan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar responden pada penelitian ini juga memiliki jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan yang layak. Mereka memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan dari pemerintah berupa jaminan BPJS Kesehatan atau KIS. Sehingga responden pada penelitian ini tidak merasa khawatir jika sewaktu-waktu sakit dan ingin berobat maupun terhadap biaya pendidikan anak.

Uji Kecocokan Model

Nilai uji kecocokan model menggunakan uji Hosmer and Lemeshow, yang bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian model dengan nilai observasinya. Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian kesesuaian model.

Tabel 1. Uji Hosmer and Lemeshow Test

Model Regresi	Chi-Square	df	Sig.	Ket
P(Y)= f (X1,X2,X3,X4,X5)	16,300	8	0,038	Tolak Ho (Model tidak sesuai nilai observasi)
P(Y)= f(X1*X3, X2, X4,X5)	12,164	8	0,144	Terima Ho (Model sesuai nilai observasi)

Sumber : output spss

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa model regresi logistik yang tepat digunakan untuk menjelaskan model ketahanan ekonomi keluarga miskin adalah model kedua yaitu : $P(Y) = f(X_1 \times X_3, X_2, X_4, X_5)$ dengan nilai signifikansi 0,144 yang berarti model sesuai nilai observasi.

Terdapat interaksi antara variabel X_1 (tempat tinggal) dan X_3 (Aset dan Liabilitas) sebagai modifikasi perbaikan model.

Analisis Regresi Logistik Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin

Uji Parameter Serentak

Pengujian parameter serentak bertujuan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil pengujian parameter serentak mengikuti *Omnibus Tests of Model Coefficients* pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji *Omnibus Tests of Model Coefficients*

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	77.482	4	.000
	Block	77.482	4	.000
	Model	77.482	4	.000

Sumber : output SPSS

Nilai uji signifikansi diatas menunjukan $0,000 < \alpha$, artinya tolak H_0 . Terdapat minimal satu variabel independen (X) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Sehingga dapat disimpulkan model dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Parameter Parsial

Untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji-wald. Hasil

output koefisien regresi masing-masing variabel independen ditunjukkan pada Tabel 3.

Koefisien variable Pendapatan perkapita (X_2) memiliki nilai P-value uji wald sebesar $0,00 < \alpha$. Artinya terdapat pengaruh signifikan dan positif antara pendapatan perkapita terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Variabel jaminan keluarga (X_5) secara statistik juga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai P-value sebesar $0,042 < \alpha$.

Tabel 3. Uji *Wald* dan *Odd Ratio*

Variables in the Equation						
		B	S.E.	Wald	df	Sig.
Step 1 ^a	X2	3.305	.668	24.483	1	.000
	X4	.015	.372	.002	1	.968
	X5	-.867	.426	4.139	1	.042
	X1X3	.144	.108	1.773	1	.183
	Constant	-8.570	2.210	15.044	1	.000

a. Variable(s) entered on step 1: X2, X4, X5, X1X3.

Sumber : output SPSS

Variabel pembiayaan pendidikan anak, dan tempat tinggal dengan kepemilikan asset dan liabilities berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Berdasarkan Tabel di atas maka diperoleh Persamaan logistik ketahanan ekonomi keluarga miskin = $-8.570x - 0.144X_1 X_3 + 3.305X_2 + 0.015 X_4 - 0.867X_5$

Nilai konstanta -8,570 dapat diartikan bahwa peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat adalah tidak ada (sangat kecil) tanpa memiliki tempat tinggal, pendapatan perkapita, aset dan liabilitas, pembiayaan pendidikan anak dan jaminan keluarga.

1. Analisis Pengaruh Kepemilikan Tempat Tinggal dengan Aset dan liabilitas Terhadap Peluang Keluarga Miskin Memiliki Ketahanan Ekonomi Kuat

Persamaan regresi logistik, koefisien regresi variabel kepemilikan tempat tinggal dengan aset dan liabilitas ($X1 \cdot X3$) adalah sebesar 0,144 dengan tingkat signifikansi (nilai P value Uji wald (sig) sebesar $0,968 > = 0,05$). Artinya kepemilikan tempat tinggal dengan aset dan liabilitas secara bersamaan memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Odd ratio berdasarkan nilai koefisien $\text{Exp}(B)$ pada tabel 3 untuk kepemilikan tempat tinggal dengan aset dan liabilitas adalah sebesar 1,155. Karena koefisien B bertanda positif, maka dapat di tafsirkan peluang keluarga miskin yang memiliki tempat tinggal dengan aset dan liabilitas memiliki ketahanan ekonomi kuat sebesar 1,155 kali dibanding keluarga miskin yang tidak memiliki tempat tinggal dengan aset dan liabilitas. Namun pengaruh variable tersebut tidak cukup signifikan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Hal ini dikarenakan untuk memiliki rumah sendiri sekaligus kepemilikan aset dan liabilitas dibutuhkan uang yang besar, sehingga bagi responden yang memiliki penghasilan kecil akan sulit memiliki tempat tinggal sekaligus aset dan liabilitas dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Akan lebih realistis finansial yang dimiliki dialokasikan bagi keluarga miskin untuk menyewa rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal ini aset yang dimiliki keluarga miskin pada penelitian ini berupa barang elektronik. Keluarga miskin pada penelitian ini juga memiliki aset berupa

barang elektronik dengan cara mencicil. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 92% keluarga miskin yang memiliki cicilan hutang barang elektronik tidak berarti lebih memiliki ketahanan ekonomi yang tidak kuat karena memiliki hutang dan stress finansial yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga miskin yang memiliki aset sedikit dan tidak memiliki hutang untuk membeli aset. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa utang dalam konsumsi rumah tangga memiliki dampak negatif dan membuat ketahanan ekonomi sebuah keluarga menjadi tidak kuat. Menurut (Herispon, 2017) keluarga yang memiliki hutang akan memiliki tingkat stress yang tinggi, terperangkap dalam pelunasan hutang, menanggung beban hutang sehingga dekat dengan kemiskinan. Jika ia tidak mampu melunasi hutang, penindasan dan kucilan dari masyarakat akan ia dapatkan karena dianggap hina tidak mampu membayar hutang.

2. Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Peluang Keluarga Miskin Memiliki Ketahanan Ekonomi Kuat

Persamaan regresi logistik, koefisien regresi variabel pendapatan perkapita ($X2$) adalah sebesar 3.305 dengan tingkat signifikansi (nilai P value Uji wald (sig) sebesar $0,000 < = 0,05$). Artinya pendapatan perkapita memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Odd ratio berdasarkan nilai koefisien $\text{Exp}(B)$ pada tabel 3 untuk pendapatan perkapita adalah sebesar 27,257. Karena koefisien B bertanda positif, maka dapat di tafsirkan peluang keluarga miskin yang memiliki pendapatan perkapita memiliki

ketahanan ekonomi kuat sebesar 27,257 kali dibanding keluarga miskin yang tidak memiliki pendapatan perkapita. Pengaruh variable tersebut cukup signifikan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Hal ini dikarenakan pendapatan merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tanpa adanya pendapatan yang cukup, maka keluarga miskin memiliki kecenderungan ketahanan

Berdasarkan data pada penelitian ini diketahui bahwa jumlah keluarga miskin yang pendapatan perkapita dalam jangka waktu satu bulan dengan nominal sebanyak 0-1 juta rupiah berjumlah 18 keluarga, nominal sebanyak 1,1-2 juta rupiah berjumlah 25 keluarga, nominal 2,1-3 juta rupiah berjumlah 22 keluarga, dan nominal lebih dari 3 juta rupiah berjumlah 35 keluarga. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadilah bahwa pendapatan perkapita keluarga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan serta ketahanan ekonomi keluarga (Fadillah & Dewi, 2016). Fadilah mengatakan jika pendapatan perkapita keluarga meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan menurun (Fadillah & Dewi, 2016). Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi suatu tanda bahwa peningkatan pendapatan perkapita keluarga menjadikan ketahanan ekonomi keluarga menjadi kuat.

3. Analisis Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Anak Terhadap Peluang Keluarga Miskin Memiliki Ketahanan Ekonomi Kuat

Persamaan regresi logistik, koefisien regresi variabel pembiayaan pendidikan anak (X4) adalah sebesar 0.015 dengan tingkat signifikansi (nilai P value Uji wald (sig) sebesar $0,968 > = 0,05$). Artinya

pembiayaan pendidikan anak memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Odd ratio berdasarkan nilai koefisien $\text{Exp}(B)$ pada tabel 3 untuk pembiayaan pendidikan anak adalah sebesar 1,015. Karena koefisien B bertanda positif, maka dapat di tafsirkan peluang keluarga miskin yang memiliki pembiayaan pendidikan memiliki ketahanan ekonomi kuat sebesar 1,015 kali dibanding keluarga miskin yang tidak memiliki pembiayaan pendidikan anak. Namun pengaruh variable tersebut tidak cukup signifikan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil data penelitian diketahui 97% dari total 100% memiliki jaminan pendidikan dari pemerintah untuk anak maka responden memiliki kemampuan pembiayaan pendidikan anak yang lainnya selain untuk iuran bulanan sekolah yang telah dijamin gratis dari pemerintah. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa sebanyak 57,7% dengan total presentase 104 keluarga memanfaatkan fasilitas dari pemerintah berupa pembiayaan pendidikan anak yang gratis dalam wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk efisiensi pendapatan keluarga (Aini, Ifa, & Sukamti, 2018). Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan jumlah pendapatan perkapita perbulan yang dimiliki keluarga. Keterbatasan kemampuan pendapatan perkapita keluarga mempengaruhi keluarga untuk merasa cukup terhadap fasilitas pembiayaan pendidikan anak yang gratis. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan anak memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap peluang ketahanan ekonomi keluarga.

4. Analisis Pengaruh Jaminan Keluarga Terhadap Peluang Keluarga Miskin Memiliki Ketahanan Ekonomi Kuat

Persamaan regresi logistik, koefisien regresi variabel jaminan keluarga (X5) adalah sebesar -0,867 dengan tingkat signifikansi (nilai P value Uji wald (sig) sebesar $0,042 < = 0,05$). Artinya pembiayaan pendidikan anak memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Odd ratio berdasarkan nilai koefisien $\text{Exp}(B)$ pada tabel 3 untuk pembiayaan pendidikan anak adalah sebesar 0,420. Karena koefisien B bertanda positif, maka dapat di tafsirkan peluang keluarga miskin yang memiliki pembiayaan pendidikan memiliki ketahanan ekonomi kuat sebesar 0,420 kali dibanding keluarga miskin yang tidak memiliki pembiayaan pendidikan anak. Pengaruh variable tersebut cukup signifikan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Hal ini dikarenakan responden yang memiliki jaminan keluarga sedikit dan mendapatkan jaminan keluarga berupa jaminan kesehatan dari pemerintah dengan kelas paling rendah memiliki ketergantungan hanya kepada pemerintah saja. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian bahwa sebanyak 100% responden mendapatkan bpjs kesehatan dari pemerintah. Sedangkan responden yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan gratis pada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 97% dan sisanya sebesar 3% tidak mendapatkan KJP. Sehingga sewaktu-waktu pemerintah mengurangi atau membatasi akses jaminan tersebut, maka akan berdampak buruk terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Jika mereka memiliki pendapatan yang tinggi dan bisa memiliki jaminan keluarga yang tinggi serta

tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah maka jaminan keluarga yang mereka miliki menjadi jauh lebih baik dan lebih banyak. Hal ini akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin yang bersumber dari kemampuan ekonominya sendiri. Setiyono juga mengatakan bahwa di Indonesia biaya pelayanan kesehatan semakin mahal dan kemampuan pemerintah dalam menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga sangat terbatas (Setiyono, 2018). Sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari sistem pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan serta perlindungan sosial yang cukup bagi keluarga. Pemberian motivasi terhadap keluarga juga diperlukan agar keluarga bisa terus berusaha kerja keras untuk menaikkan standar kualitas hidup melalui edukasi kebijakan tentang minimal standar hidup di Indonesia dan pelatihan ketrampilan kerja.

Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin

Strategi merupakan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa ketahanan ekonomi keluarga merupakan cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimiliki keluarga agar dapat hidup mandiri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016). Selain itu ketahanan ekonomi keluarga juga merupakan kemampuan keluarga dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan pembelian barang dan jasa serta kebutuhan uang yang diperlukan dalam keluarga (Doriza, 2015).

Dengan demikian, strategi ketahanan ekonomi keluarga meliputi cara untuk mengatasi

masalah ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan menyeimbangkan pendapatan serta pengeluaran yang terkait dengan pembelian barang maupun jasa agar dapat hidup mandiri.

Strategi pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga miskin adalah menabung secara periodik. Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada penelitian ini diketahui bahwa hanya 15 responden dari total 100 responden atau hanya sebanyak 15% dari total 100 responden yang memiliki tabungan. Menabung adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Karena menabung dengan cara menyisihkan uang dari penghasilan secara periodik, jumlahnya dapat diakumulasi. Sehingga tabungan yang dimiliki dapat meringankan beban seseorang jika sewaktu-waktu membutuhkan uang tambahan untuk keperluan tertentu.

Selain itu menabung tidak harus berupa uang yang di simpan, namun juga bisa berupa aset berupa barang-barang elektronik maupun non elektronik. Aset berupa barang-barang elektronik bisa berupa TV, Mesin Cuci, Handphone, DVD, dsb. Sedangkan aset barang-barang non elektronik seperti perhiasan, kendaraan bermotor, rumah dsb. Menabung berupa aset berupa barang non elektronik tentunya memiliki nilai jual lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai jual aset berupa barang elektronik. Sehingga menabung dengan membeli aset barang non elektronik seperti perhiasan, kendaraan bermotor, rumah dsb lebih disarankan agar nilai jual yang lebih tinggi.

Menabung dengan cara lainnya juga bisa dilakukan dengan cara mengikuti arisan yang dilakukan secara periodik dalam suatu kelompok tertentu. Mengumpulkan uang pada periode tertentu dalam satu kelompok juga bisa membantu untuk menyisihkan uang secara

periodik. Sehingga uang yang telah dikumpulkan dalam satu kelompok bisa diakumulasi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu jika seseorang sudah mendapat jadwal/giliran untuk mendapatkan uang yang telah dikumpulkan secara periodik.

Strategi kedua yang dapat dilakukan oleh keluarga miskin untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga adalah dengan cara memiliki pola penghasilan ganda yaitu suami-istri masing-masing memiliki pekerjaan (*dual-earner*) maupun suami atau istri memiliki dua pekerjaan sehingga memiliki dua sumber penghasilan pada waktu yang bersamaan (memiliki pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama). Sumber penghasilan ganda yang didapatkan dari suami-istri yang masing-masing bekerja maupun dari suami atau istri yang memiliki dua pekerjaan dalam waktu bersamaan jika diakumulasi memiliki jumlah penghasilan yang lebih besar. Sehingga mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini, jumlah responden yang memiliki pekerjaan sampingan adalah sebanyak 43 responden dari total 100 responden atau sebesar 43% responden. Sisanya sebanyak 57 responden atau sebesar 57% responden dari total 100 responden tidak memiliki pekerjaan sampingan. Sehingga penyuluhan atau edukasi strategi ketahanan ekonomi keluarga dengan cara menyarankan memiliki pekerjaan sampingan sangat dan menyarankan suami-istri memiliki pekerjaan penting untuk dilakukan.

Masalah dan kesulitan yang akan timbul pada istri tidak bekerja karena memiliki anak usia sekolah dapat diatasi dengan cara memanfaatkan potensi atau keahlian yang dimiliki oleh yang bersangkutan yang bisa terjangkau baik fisik maupun modal. Misalnya adalah seorang istri memiliki potensi atau keahlian memasak dalam keluarga, maka seorang istri bisa memulai

berjualan lauk-pauk matang, atau berjualan snack yang dimasak sendiri serta dijual dirumah agar mendapat keuntungan dari hasil penjualan sembari mengawasi, mendidik dan mengasuh anak dirumah. Sehingga keuntungan yang didapatkan bisa digunakan untuk menambah penghasilan untuk pembiayaan kebutuhan sehari-hari. Namun, jika seorang suami/istri pada akhirnya masih memiliki kesulitan keuangan untuk mendapatkan modal usaha. Hal tersebut tentunya dapat dikonsultasikan kepada kerabat dekat maupun instansi pemerintah yang menyediakan dana pinjaman untuk modal memulai usaha. Bagi suami/istri yang memiliki potensi dapat membuktikan potensi yang ia miliki agar kerabat maupun instansi pemerintah mau dan percaya untuk memberikan modal. Selanjutnya, jaminan peminjaman dan pengembalian modal bisa ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku maupun berupa pembagian hasil keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan.

Strategi ketiga yang dapat dilakukan oleh keluarga miskin untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga adalah dengan cara mencari kesempatan untuk memperoleh pekerjaan lainnya sebanyak-banyaknya melalui pekerjaan musiman. Meskipun semakin beragam pekerjaan marjinal dari seseorang maka akan menunjukkan status semakin miskin pula kehidupan keluarganya. Namun hal tersebut akan membantu meningkatkan jumlah akumulasi penghasilan yang dimiliki dalam keluarga. Karena dengan memiliki pekerjaan yang beragam dalam satu waktu memiliki sifat saling menambahkan dan menggenapi bukan menggantikan (Cholilawati & Hasanah, 2015). Sehingga keluarga dapat hidup mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada

penelitian ini diketahui sebanyak 68 dari total 100 responden memiliki pasangan (suami/istri) yang juga sama-sama memiliki pekerjaan. Sehingga dalam keluarga memiliki 2 jenis pekerjaan. Selain itu sebanyak 43 dari total 100 responden memiliki pekerjaan sampingan. Sehingga sebanyak 43 responden dari total 100 responden memiliki tiga jenis pekerjaan dalam keluarga. 43 responden yang memiliki pekerjaan sampingan juga memiliki pasangan (suami/istri) yang juga memiliki pekerjaan.

Strategi keempat yang dapat dilakukan oleh keluarga miskin untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga adalah dengan cara mengoptimalkan apa yang dimiliki dan mereduksi kualitas kebutuhan hidup. Hal ini dilakukan dengan cara meminimalisasi variasi makanan serta meminimalisasi dan menahan diri untuk tidak membeli barang maupun hal yang tidak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya tidak membeli pakaian sampai saat-saat penting atau saat dibutuhkan, tidak membeli rokok, tidak membeli atau mencicil aset dsb yang tidak terlalu dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa seluruh responden mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah namun memiliki jumlah banyaknya bantuan yang berbeda-beda yaitu sebanyak 1 responden mendapatkan 1 jenis bantuan, sebanyak 15 responden mendapatkan 2 jenis bantuan, sebanyak 56 responden mendapatkan 3 jenis bantuan, sebanyak 17 responden mendapatkan 4 jenis bantuan dan sisanya sebanyak 11 responden mendapatkan 5 jenis bantuan sosial dari pemerintah. Bagi 84 responden yang mendapatkan bantuan lebih dari 3 jenis bantuan seharusnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan memiliki ketahanan dalam keluarga. Namun berdasarkan hasil data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 12 responden memiliki persepsi

bahwa pendapatannya yang bersumber dari penghasilan pekerjaan dan bantuan sosial dari pemerintah tidak cukup, sebanyak 60 responden memiliki persepsi belum cukup, sebanyak 13 responden memiliki persepsi kurang cukup dan sebanyak 35 responden memiliki persepsi bahwa pendapatannya yang bersumber dari penghasilan pekerjaan dan bantuan sosial dari pemerintah telah cukup. Selain itu sebanyak 33 responden dari total 100 responden memiliki hutang untuk mencicil pembelian aset berupa barang elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini belum memiliki kesadaran untuk meminimalisasi atau mereduksi keinginan membeli barang-barang lainnya yang kurang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, penyuluhan dan kampanye tentang strategi ketahanan ekonomi keluarga sangat penting untuk disosialisasikan kepada keluarga miskin agar mereka terus mengingat dan berusaha meningkatkan kualitas hidup serta ketahanan ekonomi keluarga. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Trisnawati & Jatiningsih, 2017) penyuluhan dan kampanye rutin tentang strategi ketahanan ekonomi diperlukan oleh keluarga miskin khususnya bagi ibu rumah tangga yang setiap hari memiliki banyak waktu luang akan menumbuhkan kesadaran kritis yang akan menguatkan diri untuk keluar dari segala permasalahan yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi dalam keluarga.

Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Sebagai Upaya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS)

Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) merupakan usaha yang terencana dan melembaga meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-

institusi sosial (Maspaiteella & Rahakbauwi, 2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Ciri utama dari Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah komprehensif atau terpadu dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan untuk menempatkan penerima pelayanan (beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosial kulturalnya (Suharto, 2005).

Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) pada hakikatnya memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan penunjang (Hanifah & Unayah, 2011). Fungsi Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) sebagai (1) pencegahan mencakup kegiatan mencegah timbul, meluas, serta kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat. Sedangkan fungsi yang ke (2) Rehabilitasi merupakan proses refungsionalisasi dan pementapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi yang ke (3) Pengembangan, merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penggalan dan pendayagunaan potensi dirinya; dan fungsi yang ke (4) Penunjang, merupakan fungsi pendorong dan pendukung yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Keempat fungsi Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) dimaksud mencakup upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial melalui peningkatan kemampuan, kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk berperan

aktif dalam tata penghidupan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih sejahtera.

Dengan demikian strategi ketahanan ekonomi keluarga keluarga yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam keluarga seperti menabung secara periodik; memiliki pola penghasilan ganda karena suami-istri masing-masing memiliki pekerjaan (*dual-earner*); memiliki pekerjaan musiman untuk menambah penghasilan; dan mengoptimalkan apa yang dimiliki serta mereduksi kualitas kebutuhan hidup dapat menjadi upaya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) karena mewakili pelaksanaan keempat fungsi untuk mencegah kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial, untuk merehabilitasi atau melaksanakan kembali fungsi sosial keluarga, menggali dan mendayaguna potensi diri dalam keluarga untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga sehingga peningkatan kemampuan dan peran aktif keluarga miskin dalam meningkatkan kesejahteraan sosial keluarganya bisa menjadi penunjang keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS).

KESIMPULAN

1. Pengelolaan ekonomi keluarga miskin kelurahan Tanah Tinggi memiliki pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sumber pendapatan, tidak memiliki tabungan dan memiliki banyak hutang karena ia banyak mencicil pembelian aset berupa barang elektronik.
2. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pendapatan perkapita dan jaminan keluarga terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Sedangkan kepemilikan tempat tinggal dengan aset dan liabilities secara bersamaan, dan pembiayaan pendidikan

anak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Pendapatan perkapita makin tinggi meningkatkan peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi kuat sebesar 27,257 kali dibanding keluarga miskin yang berpendapatan perkapita rendah. Namun, ketergantungan terhadap jaminan keluarga yang bersumber sebagian besar dari bantuan pemerintah berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi keluarga miskin sebesar 0,420 kali dibanding keluarga miskin yang tidak bergantung pada jaminan keluarga yang bersumber dari pemerintah.

3. Ketahanan ekonomi keluarga miskin dapat ditingkatkan dengan strategi menabung secara periodik; memiliki pola penghasilan ganda suami-istri masing-masing memiliki pekerjaan (*dual-earner*); memiliki pekerjaan musiman; dan mengoptimalkan apa yang dimiliki dan mereduksi kualitas kebutuhan hidup. Penyuluhan dan kampanye tentang strategi ketahanan ekonomi keluarga juga menjadi sangat penting untuk disosialisasikan kepada keluarga miskin agar mereka terus mengingat dan berusaha meningkatkan kualitas hidup serta ketahanan ekonomi keluarga.
4. Strategi ketahanan ekonomi keluarga keluarga yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam keluarga dapat menjadi upaya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) karena mewakili pelaksanaan keempat fungsi untuk mencegah kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial, untuk merehabilitasi atau melaksanakan kembali fungsi sosial keluarga, menggali dan mendayaguna potensi diri dalam keluarga untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga sehingga peningkatan kemampuan dan peran aktif keluarga miskin dalam meningkatkan kesejahteraan sosial keluarganya bisa menjadi penunjang keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS).

SARAN

Strategi ketahanan ekonomi keluarga bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial sehingga perlu peran aktif dari pemerintah setempat untuk mendukung dan melakukan kampanye tentang strategi ketahanan ekonomi keluarga kepada keluarga miskin agar mereka memiliki kesadaran kritis yang akan menguatkan diri untuk keluar dari segala permasalahan kesejahteraan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Kemenristek Dikti yang telah mendanai penelitian ini. Terima kasih kepada perangkat Kelurahan Tanah Tinggi, Bapak Lurah beserta jajarannya dan seluruh warga Kelurahan Tanah Tinggi yang telah mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Rejekiingsih, T. W. (2011, Juni). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.
- Rangkuti, F. (2013). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Samputra, P. L., & Munandar, A. (2019). Korupsi, Indikator Makro Ekonomi dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal JEKT*, 12(1).
- Doriza, S. (2015). *Ekonomi Keluarga*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Cahyawan, W., & Machdum, S. V. (2019, Januari-April). Pendekatan Institutional dalam Keuangan Mikro dan Perannya Terhadap Pengentasan Kemiskinan: Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Sosio Informa*, 5(1).
- Habibullah. (2019, Januari-April). Inklusi Keuangan dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. *Jurnal Sosio Informa*, 5(1).
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Jakarta Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Amar, S. (2012). *Ekonomi Dalam Perspektif Kelembagaan*. Padang: UNP Press.
- Usman, W. (2003). *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.
- Suradinata, E. (2005). *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas.
- Tjiptono, F. (2006). *Manajemen Jasa Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi.
- Purnomo, S. H. (1996). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Briguglio, L. (2006). Conceptualizing and Measuring Economic Resilience. *Journal of Economics Department University of Malta*.
- Center of Local Economis Strategis. (2016). *Developing Local Economic Resilience: The Role of Local Enterprise Partnership (LEPs)*. Manchester: CLES.
- Bank of International Settlements (BIS). (2016). *Economic Resilience: A Financial Perspective*. Switzerland: BIS.

- Departement of Family and Community Services. (2000). *Indicators of Social and Family Functioning*. Canberra: Australia Government.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cholilawati, & Hasanah, U. (2015). *Ketahanan Keluarga: Sebuah Tantangan di Era Global*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan.
- Herispon. (2017, Juli-Desember). Utang Konsumtif Rumah Tangga dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2).
- Fadillah, N. S., & Dewi, S. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Eko-Regional*, 11(1).
- Aini, E. N., Ifa, & Sukamti, S. (2018, Agustus). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatria Kota Malang. *Technomedia Journal (TMJ)*, 3(1).
- Setiyono, B. (2018, Oktober). Perlunya Revisi Kebijakan Jaminan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.
- Trisnawati, N. A., & Jatiningsih, O. (2017). Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(3), 485-500.
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, 5(2).
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanifah, A., & Unayah, N. (2011). Kontribusi Organisasi Sosial Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Organisasi Sosial Di Kota Palembang-Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 6(1).
- Banovicnova, A., Levicka, J., & Veres, M. (2014). The Impact of Poverty on The Family System Functioning. *Journal of Procedia - Social Behavioral Sciences*, 132, 148-153.
- Cahyat, A. (2004). *Governance Brief: Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa Model Perhitungan Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: Center For International.
- Cahyat, A. (2007). *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat Indonesia*. Bogor: CIFOR Indonesia.

- Ghazali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Hasanah, U., & Mariastuti, K. (2015). *Ketahanan Keluarga: Sebuah Tantangan di Era Global*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
- kartika, I. N. (2013, Februari). Strategi Pengentas kemiskinan Terhadap Penurunan Rumah Tangga Miskin di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, 18(1).
- Kuncoro, M. (2006). *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Lo, A. Y., Xu, B., Chan, F., & Su, R. (2016). Household Economic Resilience to Catastrophic Rainstorms and Flooding in a Chinese Megacity. *Geographical Research*.
- Mceachern, W. A. (2000). *Makro Ekonomi Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noor, N., & dkk. (2014). Development of Inficators for Family Well-Being in Malaysia. *Journal of Social Indicators research*.
- Oh, S., & Chang, S. J. (2014). Concept Analysis: Family Resilience. *Journal of Nursing*, 4, 980-990.
- Puspitawati, H., & dkk. (2016). *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Timur dan Sumatra Utara (Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor)*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB Bogor.
- Prastyo, A. A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Semarang: UNDIPRESS.
- Rose, A. Z. (2009). Economic Resilience to Disaster. *CREATE Research*, 75.
- Sanderson, T., Carpon, T., & Hertzler, G. (2017). Defining Measuring and Valuing Economic Resilience. *Journal of CSIRO-Data61 Australia*.
- Sumarno, S. (2014, Januari-April). Problema dan Resolusi Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat. *Sosio Konsepsia*, 3(2).
- Suryawati. (2005, September). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal JMPK*, 8(3).

**PROGRAM PENINGKATAN KETRAMPILAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA
(Studi di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur)**

***SKILL IMPROVEMENT PROGRAM FOR PERSONS WITH VISUAL DISABILITY
(Study on Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra in Malang City, East Java)***

Oman Sukmana

Program Studi Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur
E-mail: oman@umm.ac.id;

Diterima: 31 Juli 2019, Direvisi: 2 April 2020; Disetujui: 14 April 2020

Abstrak

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan indera untuk waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesetaraan hak. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas adalah melalui pembinaan yang dilakukan oleh Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang. Pertanyaan penelitian ini adalah apa dan bagaimana program peningkatan kemampuan untuk penyandang disabilitas netra di RSBN Malang?. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana program peningkatan kemampuan untuk penyandang disabilitas netra di RSBN Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara purposif yaitu pengelola Panti RSBN Malang, yang meliputi Kasubag TU, Pekerja Sosial, dan instruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan keterampilan bagi penyandang disabilitas netra yang dilaksanakan di RSBN Malang meliputi: (1) bimbingan fisik mental; (2) bimbingan sosial; (3) Bimbingan keterampilan; (4) Penempatan di komunitas; dan (5) Pelatihan lebih lanjut, sehingga penyandang cacat netra (visual) memiliki keterampilan kerja dan bisnis setelah lulus dari suatu institusi. Secara umum program peningkatan keterampilan ini mampu membuat para penyandang disabilitas netra menjadi lebih mandiri dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari.

Kata Kunci: *program, keterampilan, disabilitas netra.*

Abstract

Persons with Disabilities are anyone who experiences physical, intellectual, mental and sensory limitations for a long time in interacting with the environment that can experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equal rights. One among efforts to increase the capacity of persons with disabilities is through coaching conducted by Rehabilitasi Sosial Nina Netra (RSBN) orphanages in Malang. The research question consist of what and how is the capacity building program for people with visual disability at the RSBN orphanages in Malang? This study aims to find out how the skill improvement program for people with visual disabilities at the RSBN orphanages in Malang. The study used a qualitative approach and qualitative descriptive research. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The subjects of the study were determined purposively that covers the managers of the RSBN orphanages in Malang: administration staff, instructor, and social worker. The results showed that the skill improvement program for people with visual disabilities included: (1) mental physical guidance; (2) social guidance; (3) Skills guidance; (4) Placement in the community; and (5) advance coaching, so that people with visual disabilities have work and business skills after graduating

from an institution. This skill improvement program is able to make clients' visual disabilities become independent in carrying out their lives.

Keywords: *program, skill, visual disability.*

PENDAHULUAN

Menurut pandangan Jaeger and Bowman (2005), disabilitas (*disability*) adalah masalah yang menyentuh kehidupan banyak orang. Dewasa ini diperkirakan ada sekitar 550 juta penyandang disabilitas di seluruh dunia. Kebanyakan orang mengenal seseorang dengan disabilitas, dan banyak juga diantara mereka yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas terus bertambah seiring pertambahan populasi di banyak bagian dunia. Menurut Prakoso (2018), penyandang disabilitas perempuan dan laki-laki dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat normal pada umumnya dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan. Permasalahan penyandang disabilitas secara umum adalah adanya gangguan fisik dan mobilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari, gangguan keterampilan kerja yang produktif, rawan kondisi sosial ekonomi, gangguan mental psikologis, seperti rendah diri, terisolasi dan kurang percaya diri, hambatan melaksanakan fungsi sosial, seperti tidak mampu bergaul, berkomunikasi secara wajar, tidak mampu berpartisipasi dan lebih banyak tergantung pada orang lain. Oleh karena tidak dapat melakukan aktivitas secara selayaknya diakibatkan keterbatasan yang dimiliki maka penyandang disabilitas memerlukan bantuan dan pemenuhan kebutuhannya secara khusus dari pemerintah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera, bebas memilih agama, mendapat perlindungan dan kepastian hukum, memiliki kemerdekaan pikiran, mendapat pendidikan dan layanan kesehatan, serta hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal tersebut mencerminkan bahwa negara menjamin pemenuhan hak-hak dasar seluruh masyarakat, termasuk masyarakat penyandang disabilitas, agar mendapatkan persamaan perlakuan dan pelayanan dalam berkehidupan bernegara. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus ditujukan untuk masyarakat penyandang disabilitas yang dalam menjalani kehidupan memerlukan beberapa bantuan atau sarana khusus untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut ILO (2017), lebih dari satu miliar orang atau 15 persen penduduk dunia adalah penyandang disabilitas (PD) dan lebih dari 70 persen merupakan penduduk dalam usia kerja. Mengacu kepada data dari Badan Pusat Statistik (2018), berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan pada tahun 2015 maka pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 296,9 juta jiwa, yang terdiri dari 135,34 juta jiwa penduduk laki-laki dan 134,27 juta jiwa penduduk perempuan. Dari hasil SUPAS tahun 2015 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas Indonesia sebanyak 21,5 juta jiwa. Pada tahun 2017, sebanyak 414.222 penyandang disabilitas membutuhkan pekerjaan karena masuk dalam data sebagai penganggur terbuka. Berdasarkan data Sakernas 2017, penduduk usia

kerja disabilitas nasional berjumlah 21.930.529 orang. dari total tersebut, yang termasuk angkatan kerja sebanyak 11.224.673 orang atau 51,18 persen. Untuk angkatan kerja disabilitas yang bekerja sebanyak 10.810.451 orang atau sebesar 96,31 dan penganggur terbuka sebanyak 414.222 orang atau sebesar 3,69 persen. Sedangkan yang bukan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10.705.856 orang atau sebesar 48,82 persen.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*” (Disabilitas sebagai pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam kisaran yang dianggap normal untuk manusia, sebagian besar akibat dari gangguan). Dari definisi WHO tersebut bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan. Selain pengertian secara umum, WHO mengemukakan pula definisi disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut: (1) *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki; dan (2) *Disability/handicap* (cacat/ ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.

Menurut Kristiansen, Vehmas, dan

Shakespeare (2009) terdapat dua model interpretasi tentang disabilitas, yakni model medis (*medical models*) dan model sosial (*social models*). Model medis meliputi: (1) *Full-Essentialist Individual Deficiency interpretation* (FEID), dan (2) *Part-Essentialist Individual Deficiency interpretation* (PEID). Sedangkan model sosial, meliputi: (1) *Politics of Disablement interpretation* (POD), dan (2) *Social Construction of Disablement interpretation* (SCOD). Gambaran penjelasan model medis dan model sosial sebagaimana tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Interpretasi Model Medis (*Medical Model*) dan Model Sosial (*Social Model*) tentang Disabilitas

Model	Inter-pretasi	Pemahaman tentang Disabilitas (<i>Understanding of Disability</i>)
<i>Medical Models</i> (Model Medis)	1. <i>Full-essentialist individual deficiency interpretation</i> (FEID).	Disabilitas disebabkan oleh karakteristik medis tetap dimana menjalani kehidupan dengan kekurangan dan ‘abnormalitas’.
	2. <i>Part-essentialist individual deficiency interpretation</i> (PEID).	Disabilitas disebabkan oleh karakteristik medis dimana sebagian dapat dikurangi dan diubah melalui lingkungan sosial sehingga memungkinkan untuk menjalani kehidupan yang normal.
<i>Social Models</i> (Model Sosial)	3. <i>Politics of disablement interpretation</i> (POD).	Disabilitas disebabkan oleh praktek sosial yang secara sistematis mengecualikan penyandang disabilitas dari aktivitas kewarganegaraan normal
	4. <i>Social construction of disablement interpretation</i> (SCOD).	Disabilitas disebabkan kekurangan yang didefinisikan dan dihubungkan dengan karakteristik pemenuhan, perkembangan, dan identitas personal.

Sumber: Kristiansen; Vehmas; and Shakespeare, 2009: 22.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dinyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Clement dan Read (2008), salah satu pendekatan untuk memahami disabilitas adalah pendekatan hak asasi. Di Indonesia, hak penyandang disabilitas diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2016 menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hak penyandang disabilitas secara umum meliputi: Hak hidup, Hak bebas dari stigma, Hak privasi, Hak keadilan dan perlindungan hukum, Hak pendidikan, Hak pekerjaan kewirausahaan dan koperasi, Hak kesehatan, Hak politik, hak kebudayaan dan pariwisata, Hak kesejahteraan sosial, Hak aksesibilitas, Hak pelayanan publik, Hak perlindungan dari bencana, Hak habilitasi dan rehabilitasi, Hak konsesi, Hak pendataan, Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, Hak berekspresi, Hak berkomunikasi, dan memperoleh informasi, Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan, dan eksploitasi.

Selain itu anak penyandang disabilitas memiliki hak: (a) mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; (b) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; (c) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; (d) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; (e) Pemenuhan kebutuhan khusus; (f) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan (g) mendapatkan pendampingan sosial.

Penyandang Disabilitas dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: (1) Penyandang disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil; (2) Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*; (3) Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif; dan (4) Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Terdapat penyandang disabilitas ganda atau multi yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicaraan disabilitas netra-tuli. Baik penyandang disabilitas fisik, mental ataupun

ganda memiliki hak (Prawestri, 2017; Reefani, 2013).

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah peraturan perundangan, kebijakan, standard dan prakarsa terkait penyandang disabilitas. Namun, banyak pasal-pasal dari peraturan perundangan ini masih berbasis sumbangan (*charity-based*). Berikut adalah peraturan perundangan utama:

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016, menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak: (a) hidup, (b) bebas dari stigma, (c) privasi, (d) keadilan dan perlindungan hukum, (e) pendidikan, (f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, (g) kesehatan, (h) politik, (i) keagamaan, (j) keolahragaan, (k) kebudayaan dan pariwisata, (l) kesejahteraan social, (m) Aksesibilitas, (n) Pelayanan Publik, (o) Pelindungan dari bencana, (p) habilitasi dan rehabilitasi, dan (q) Konsesi;

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999): Pasal 41(2) menyatakan bahwa setiap orang dengan disabilitas memiliki hak atas fasilitas dan perlakuan khusus;

Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik: Pasal 29 menyatakan bahwa penyedia layanan umum harus memberikan layanan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan;

Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung mengatur secara jelas bahwa fasilitas harus aksesibel bagi penyandang disabilitas. Pasal 27 menyatakan fasilitas harus mudah, aman dan menyenangkan, terutama bagi para penyandang disabilitas;

Kelima, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-205/MEN/1999: Pasal 7 menyatakan orang dengan disabilitas berhak atas sertifikat pelatihan kejuruan; dan

Keenam, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 01.KP.01.15.2002 mengenai penyaluran pekerja dengan disabilitas di sektor swasta.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 mengisyaratkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan sosial, perlindungan sosial dan pendampingan kepada penyandang disabilitas agar hak-hak mereka terpenuhi. Dalam aspek pendidikan, Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; (b) mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (c) mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan (d) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Mengacu kepada hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Penyandang Disabilitas, khususnya dalam bidang pendidikan bahwa negara mengakui hak para penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama. Negara harus menjamin system pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang diarahkan untuk: (a) pengembangan penuh potensi manusia dan rasa martabat dan harga diri, dan penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan dan keanekaragaman manusia; (b) pengembangan kepribadian, bakat

dan kreativitas, serta kemampuan mental dan fisik, serta potensi penyandang disabilitas; dan (c) memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan hak pendidikan ini, negara harus memastikan bahwa: (a) Orang dengan disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum atas dasar disabilitas, dan bahwa anak-anak penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari pendidikan dasar gratis dan wajib, atau dari pendidikan menengah, atas dasar disabilitas; (b) Orang dengan disabilitas dapat mengakses secara inklusif dan gratis pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berkualitas atas dasar kesetaraan; (c) Penyediaan akomodasi yang layak sesuai persyaratan individu; (d) Orang dengan disabilitas menerima dukungan yang diperlukan, di dalam sistem pendidikan umum, untuk memfasilitasi pendidikan mereka yang efektif; (e) Tindakan dukungan individual yang efektif disediakan di lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial, konsisten dengan tujuan inklusi secara penuh.

Sedangkan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; (b) memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; (c) memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; (d) tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; (e). mendapatkan program kembali bekerja; (f). penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; (g) memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan (h) memajukan usaha, memiliki

pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Sebagai wujud kewajiban pemerintah, maka dibentuk suatu lembaga pelayanan penyandang disabilitas yakni Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Netra (UPT-RSBN) Malang. Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang secara khusus melaksanakan tugas pelayanan dan rehabilitasi untuk disabilitas netra. Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di bidang pelayanan, rehabilitasi, bantuan, bimbingan, pengembangan dan resosialisasi penyandang disabilitas netra, dengan pemberian bimbingan fisik, mental dan sosial serta pelatihan keterampilan, untuk mengembangkan kemampuan sosial penyandang disabilitas netra agar menjadi warga negara yang mampu dan berguna. Visi Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang adalah terwujudnya klien penyandang disabilitas netra yang mandiri dan mampu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran program yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang dalam meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas netra. Rumusan pertanyaan penelitian yakni bagaimanakah program peningkatan keterampilan bagi penyandang disabilitas netra yang dilakukan oleh RSBN Malang?

METODE

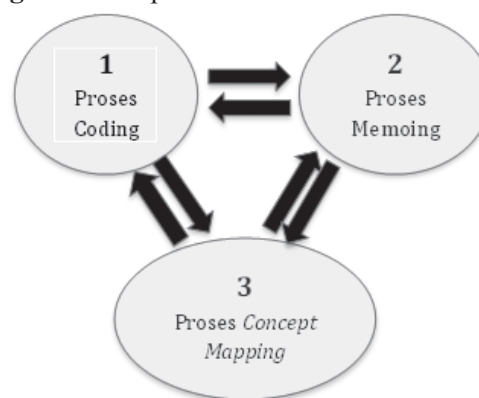
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (2009), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat

atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Sedangkan jenis penelitiannya merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi (*Setting*) penelitian dilakukan di lembaga Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang, Jawa Timur, mengingat bahwa RSBN Malang merupakan satu-satunya RSBN yang ada di wilayah Malang Raya. Subjek dan informan penelitian ditentukan berdasarkan teknik *purposive or judgemental sampling* (Babbie, 2008; Neuman, 2007). Teknik *purposive sampling* digunakan dalam situasi di mana seorang peneliti menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan yang khusus, yakni mereka yang memahami dan terlibat dalam pengelolaan program di RSBN Malang. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi subjek dan informan dalam penelitian ini adalah meliputi pengelola lembaga RSBN Malang: Kaibag Tata Usaha, Instruktur, dan Pekerja Sosial, dan klien penyandang disabilitas. Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (*Interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*Documentation*).

Mengingat data yang dihasilkan berupa data kualitatif, maka untuk menganalisisnya digunakan pendekatan interpretif (*interpretive approach*). Tahap-tahap proses data kualitatif mengacu kepada pendapat Babbie (2008), yakni: (1) Proses *Coding*, yaitu proses melakukan klasifikasi dan kategorisasi data, yang meliputi: *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*. Menurut Kalof, Dan, dan Dietz (2008), *coding* adalah proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan data, yakni melakukan pemetaan data ke dalam seperangkat kateori-kategori dimana peneliti akan menjadikanya sebagai teks kesimpulan dan pernyataan teoritik; (2) Proses *Memoing*, yaitu proses menulis memo atau catatan untuk

diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam proyek (*writing memos or notes to yourself and others involved in the project*). Strauss dan Corbin (Babbie, 2008) menyatakan bahwa proses *memoing* meliputi tiga jenis, yakni: *Code Notes*, *Theoretical Notes*, dan *Operational Notes*; dan (3) Proses *Concept Mapping*, yaitu proses pemetaan relasi antar berbagai konsep. Pemetaan ini bisa berupa: alur, diagram, tabel, grafik, dsb.

Bagan 1: Tahap Proses Analisis Data Kualitatif



Sumber: Dikonstruksi dari Pemikiran Babbie, 2008.

Untuk pengujian keabsahan data, peneliti memfokuskan pada criteria kredibilitas (*credibility*) dan kepastian (*confirmability*). Teknik kredibilitas (*credibility*) yang digunakan adalah ketekunan pengamatan dan kecukupan referensial. Sedangkan teknik kepastian (*confirmability*) menggunakan teknik uraian rinci (Moleong, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang

Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang (RSBN) terletak di Kota Malang, merupakan organisasi sosial yang berada dibawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Panti RSBN Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Provinsi Propinsi Jawa Timur di bidang pelayanan, rehabilitasi,

bantuan, bimbingan, pengembangan dan resosialisasi penyandang disabilitas netra, dengan pemberian bimbingan fisik, mental dan sosial serta pelatihan keterampilan, untuk mengembangkan kemampuan sosial penyandang disabilitas netra agar menjadi warga negara yang mampu dan berguna.

Gambar 1: Peta Lokasi Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra di Kota Malang



Panti RSBN Malang memiliki Visi terwujudnya klien penyandang disabilitas netra yang mandiri dan mampu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan misi Panti RSBN adalah: (1) Memberikan bimbingan mental dan sosial agar klien mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sehingga meningkat harga diri dan kepercayaan dirinya; (2) Memberikan bimbingan fisik agar meningkat kondisi fisik dan kesehatan klien selama berada di dalam Unit Pelaksana Teknis (UPT); (3) Memberikan latihan ketrampilan kerja untuk meningkatkan kemampuan klien sebagai bekal untuk persiapan bekerja; (4) Menyalurkan klien kembali ke keluarganya, membentuk kelompok kerja, bekerja mandiri, bekerja di Klinik Pijat atau bekerja di instansi kerja (*workshop*); dan (5) Mengadakan bimbingan lanjut.

Sasaran garapan yang dapat memperoleh pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) RSBN Malang adalah seluruh penyandang disabilitas netra baik yang total (*blind*)

maupun berpenglihatan rendah (*low vision*) dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai daya tampung UPT RSBN Malang. Persyaratan Calon Klien, meliputi: (1) Calon klien disabilitas netra tidak mempunyai disabilitas ganda yang lain (seperti disabilitas tubuh, mental, tuna rungu/wicara); (2) Tidak menderita penyakit menular dan sedang penyandang penyakit kronis; (3) Mampu didik dan mampu latih; dan (4) Usia: Usia produktif; Diutamakan yang berusia antara 15 hingga 35 tahun (toleransi usia bisa lebih dari 35 tahun, tapi pada kasus-kasus tertentu yang diputuskan melalui Tim Pembahasan Kasus terlebih dahulu).

Penyandang disabilitas netra yang bisa menjadi klien RSBN Malang adalah yang memenuhi persyaratan administrasi, meliputi: (1) Surat keterangan sehat dari dokter secara umum, khususnya menyatakan tentang jenis dan tingkat kedisabilitasan bila ada; (2) Foto copy surat identitas diri (Kartu Tanda Pengenal); (3) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm beserta klisenya, sebanyak 5 (lima) lembar; (4) Membawa Kartu JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) atau KIS (Kartu Indonesia Sehat) bila ada; (5) Foto copy ijazah terakhir bila ada; dan (6) Mengisi bio data atau pernyataan (formulir), yang meliputi: (a) Surat pengantar dari Dinas Sosial atau instansi terkait selaku pengirim calon klien yang bersangkutan; (b) Pernyataan sanggup mengikuti bimbingan dan pelatihan keterampilan di RSCN Malang, dengan jangka waktu sekitar 3 (tiga) tahun; (c) Membawa pakaian sehari-hari, seperti baju, rok, hem, kaos, celana, handuk, selimut, perlengkapan ibadah, sandal, sepatu dan lain sebagainya; (d) Surat Pernyataan dari orang tua/wali tentang kesanggupan menerima kembali klien jika sudah selesai direhabilitasi dan jika tidak dapat mengikuti dan melanjutkan program rehabilitasi, karena kasus tertentu.

Prosedur untuk menjadi klien RSBN, meliputi: **Pertama**, Petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) RSBN Malang datang ke lokasi tempat tinggal calon klien, melakukan assesmen deteksi dini disabilitas, seleksi, motivasi dan jika memenuhi syarat, calon klien akan diberi formulir/bio data untuk pengurusan surat pengantar dari Dinas Sosial setempat. UPT RSBN Malang akan mengirimkan surat pemanggilan calon klien melalui Dinas Sosial setempat. Setelah menerima surat pemanggilan dan menyelesaikan semua persyaratan administrasi, calon klien dapat diantar ke UPT RSBN Malang oleh Dinas Sosial/keluarga/kerabat. **Kedua**, Calon Klien yang ditemukan oleh masyarakat, Calon klien rujukan dari instansi terkait, dapat datang langsung ke UPT RSBN Malang, dan akan dilakukan asesmen deteksi dini disabilitas, seleksi, motivasi dan jika memenuhi syarat, calon klien akan dibantu mengisi formulir/bio data untuk pengurusan surat pengantar dari Dinas Sosial setempat. Calon klien akan mendapatkan intervensi krisis sementara dan ditempatkan di wisma sebelum calon klien secara resmi diputuskan dapat diterima di UPT RSBN atau harus dirujuk ke lembaga lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan klien melalui case conference. **Ketiga**, Calon Klien yang melakukan penjangkauan melalui media social dan telephon, akan di assesment melalui jaringan nir kabel, mendapatkan penjelasan tentang persyaratan administrasi yang harus diselesaikan, pengisian formulir/bio data serta kelengkapan yang harus dibawa. Setelah menerima surat pemanggilan dan menyelesaikan semua persyaratan administrasi, calon klien dapat diantar ke UPT RSBN Malang oleh Dinas Sosial/keluarga/kerabat.

Program dan kegiatan rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam jangka waktu antara 2 hingga 3 tahun sesuai dengan kemampuan

masing-masing klien. Tahap-tahap program kegiatan rehabilitasi sosial meliputi :

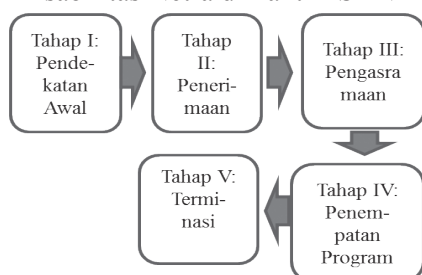
1. Tahap Pendekatan Awal. Tahap ini ditujukan untuk melakukan orientasi dan konsultasi baik bagi calon klien yang berada di masyarakat maupun calon klien yang datang langsung ke UPT RSBN Malang. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi calon klien, penumbuhan minat dan motivasi calon klien serta untuk melakukan seleksi penerimaan klien. Bagi klien yang berada di masyarakat, setelah proses ini mereka akan dibekali dengan formulir pendaftaran/bio data untuk dapat memohon surat rekomendasi dari Desa, Kelurahan serta Dinas Sosial Kota/ Kabupaten setempat. Untuk selanjutnya klien dapat diantar keluarga / Dinas Sosial setempat/pamong desa/ Relawan ke UPT RSBN Malang;
2. Tahap Penerimaan. Tahap ini meliputi kegiatan registrasi klien, penggalan, penelaahan masalah klien melalui assesmen, pembahasan dan pengungkapan masalah melalui *case conference* dilanjutkan dengan penempatan kelayan pada program. Pada tahap ini calon klien yang datang ke UPT RSBN Malang akan diseleksi secara administrasi, mengikuti proses assesmen untuk mengetahui tingkat kecacatan, kondisi fisik sosial ekonomi dan kesiapan klien mengikuti rehabilitasi sosial, dilanjutkan pembahasan (*case conference*) hasil assesmen calon klien dan diakhiri dengan penempatan klien dalam wisma. Jika klien ternyata tidak memenuhi syarat karena tidak mampu didik atau tidak mampu latih, maka klien akan dikembalikan kepada instansi pengirim/keluarga atau dapat ditempatkan sementara untuk kemudian dirujuk ke lembaga yang lebih sesuai dengan kebutuhan klien;
3. Tahap Pengasramaan. Calon klien yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan pelayanan pengasramaan. Layanan ini

meliputi tempat tinggal di wisma , alat kebersihan diri, alat makan dan makan dengan menu seimbang 3 kali sehari dan snack. Klien juga memperoleh pakaian seragam serta alat belajar yang meliputi petak braille, reglate dan stilus, kertas duplek untuk mencatat materi bimbingan, tongkat OM). Klien juga akan memperoleh alat-alat kebersihan wisma. Bila sakit, Klien memperoleh pelayanan kesehatan baik melalui obat-obatan ringan yang disediakan di UPT, pemeriksaan kesehatan mata maupun kesehatan umum di Poliklinik UPT setiap hari Jum'at, serta pemeriksaan rujukan ke instalasi kesehatan yang ditunjuk (Puskesmas, Rumah Sakit);

4. Tahap Penempatan dalam Program (Pelaksanaan Program). Pada tahap ini, klien dapat mengikuti seluruh jenis layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kondisi dan kemampuan klien. Program ini terbagi dalam 5 (lima) kelas berjenjang yang meliputi: Kelas Persiapan A, Kelas Persiapan B, Kelas Dasar, Kelas Kejuruan, dan Kelas Praktis; dan
5. Tahap Terminasi Program. Pada tahap ini klien sudah bisa dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat. Tahap ini meliputi resosialisasi, pemberian bantuan modal kerja, penempatan kerja, pembinaan lanjut dan monitoring (*home visit*).

Secara umum alur tahapan proses pelayanan sosial klien disabilitas netra di panti RSBN Malang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2. Alur Tahapan Proses Pelayanan Sosial Klien Disabilitas Netra di Panti RSBN Malang



Sumber: Hasil penelitian 2019

Selanjutnya gambaran kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahap proses pelayanan sosial di panti RSBN Malang tersebut dapat dijelaskan dalam table 2 sebagai berikut:

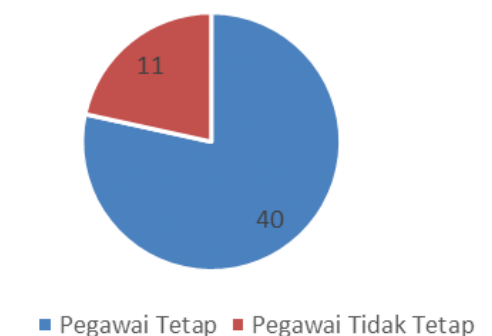
Tabel 2. Kegiatan Tahap Proses Pelayanan Sosial Klien Disabilitas Netra di Panti RSBN Malang

No.	Tahap Proses Pelayanan Sosial	Uraian Kegiatan
1.	Pendekatan Awal	Merupakan tahap orientasi dan konsultasi bagi calon klien, dimana dalam tahap ini dilakukan assessment kelayakan klien.
2.	Penerimaan	Merupakan tahap proses administrative dan assessment kebutuhan klien.
3.	Pengasramaan	Merupakan tahap proses penempatan di asrama, dimana klien disedikan kamar dan fasilitas pendukung lainnya.
4.	Penempatan Program	Merupakan tahap pelaksanaan program, dimana klien diberikan berbagai program pelatihan secara berjenjang, meliputi: Kelas Persiapan A, Kelas Persiapan B, Kelas Dasar, Kelas Kejuruan, dan Kelas Praktis
5.	Terminasi	Merupakan tahap terminasi program bagi klien, dimana dalam tahap ini dilakukan kegiatan resosialisasi klien kepada keluarga dan masyarakat, pemberian bantuan modal kerja, penempatan kerja, pembinaan lanjut dan monitoring (<i>home visit</i>).

Sumber: Hasil Penelitian, 2019.

Pada tahun 2018 Panti RSBN memiliki 51 staf, yang terdiri dari 40 staf sebagai pegawai tetap (pegawai negeri), dan 11 staf sebagai pegawai tidak tetap. Komposisi 40 staf pegawai tetap, meliputi 24 staf administrasi, 8 staf pekerja sosial, dan 8 staf instruktur.

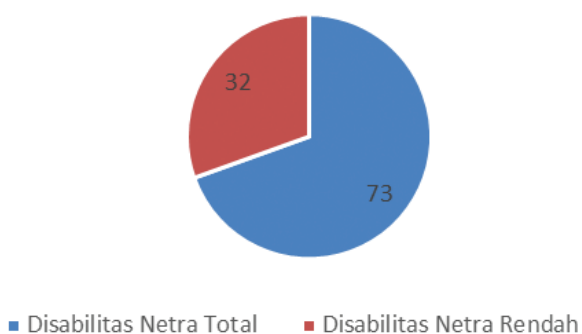
Diagram 1:
Jumlah Staf Panti RSBN



Sumber: Hasil penelitian 2019

Sedangkan jumlah klien penyandang disabilitas netra yang dibina di panti RSBN sebanyak 105 klien, yang terdiri dari 73 klien dengan kategori disabilitas netra total dan 32 klien dengan kategori disabilitas netra rendah. Berdasarkan jenis kelamin, dari 105 klien penyandang disabilitas netra tersebut laki-laki sebanyak 78 klien dan perempuan sebanyak 27 klien. Sementara dari kondisi ekonomi sebanyak 95 klien berasal dari keluarga miskin dan 10 klien berasal dari keluarga ekonomi cukup.

Diagram 2:
Jumlah Klien



Sumber: Hasil penelitian 2019

Program Peningkatan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Netra

Pemerintah Indonesia penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi Penyandang

Disabilitas yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Proses Rehabilitasi Sosial diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan Aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan. Sementara proses Jaminan Sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan. Selanjutnya proses Pemberdayaan Sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai dasar, pemberian akses, dan pemberian bantuan usaha. Proses Pemberdayaan Sosial diberikan dalam bentuk: diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan dan pendampingan, pemberian stimulant, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, penguatan kelembagaan dan kemitraan, dan bimbingan lanjut. Sedangkan proses Perlindungan sosial dilakukan melalui pemberian: bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas penyandang disabilitas agar bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan kepada orang lain, panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang melaksanakan berbagai program, yang meliputi: (1) Program Bimbingan Fisik dan Mental; (2) Program Bimbingan Sosial; dan (3) Program Bimbingan keterampilan Usaha/kerja.

Pertama, Program Bimbingan fisik dan mental. Program bimbingan fisik dan mental ditujukan untuk membina ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta terwujudnya kemauan dan kemampuan klien agar dapat memulihkan harga diri, kepercayaan diri, serta kestabilan emosi agar tercipta suatu kematangan pribadi. Program ini meliputi: (a) Bimbingan Agama, dimana bimbingan ini bertujuan agar klien menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia sebagai pribadi dan anggota masyarakat; (b) Olahraga, agar klien mempunyai fisik yang sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit; (c) Orientasi Mobilitas, agar klien mampu melakukan gerakan dari satu tempat ke tempat lain tanpa bantuan orang lain; dan (d) *Activity Daily Living* (ADL), yakni bimbingan yang diberikan kepada klien agar klien mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan secara mandiri.

Kedua, Program Bimbingan Sosial. Program ini ditujukan untuk membentuk sikap sosial yang berlandaskan pada kesetiakawanan dan kebersamaan serta tanggung jawab sosial. Bentuk program ini meliputi: (a) Latihan Baca Tulis huruf Braille, yakni berupa pengenalan huruf braille sebagai media komunikasi bagi disabilitas netra; (b) Latihan berbahasa Indonesia, dengan tujuan agar klien dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; (c) Latihan berhitung, bertujuan agar klien dapat melakukan perhitungan secara sederhana, mudah, dan cepat; (d) Pendidikan Kewarganegaraan, bertujuan agar dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) Latihan Kewiraswastaan, yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat dan jiwa wirausaha melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian sesuai kapasitas.

Ketiga, Program Bimbingan Keterampilan Usaha (Kerja). Program ini ditujukan agar para penyandang disabilitas netra memiliki keterampilan kerja dan usaha untuk menjamin masa depannya yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi lingkungannya. Bentuk kegiatan bimbingan keterampilan usaha/kerja ini meliputi: (a) Kerajinan Tangan, dimana bentuk keterampilan usaha yang diberikan kepada klien dalam bidang pembuatan keset; (b) Industri Kerumahtanggaan, dengan tujuan untuk memberikan bekal ketrampilan usaha produktif sebagai usaha menambah penghasilan rumah tangga; (c) Program keterampilan Pijat, berupa: Message, yakni suatu teknik pijatan yang menggunakan teori dari Jerman yang bertujuan untuk memberikan pijat penyegaran (capek-capek dan pijat penyembuhan bagi penderita yang indikasi message); Shiatsu, yaitu teknik pijatan yang mengutamakan tekanan untuk membenahi keadaan tubuh dari ketidaknormalan kearah normal sekaligus untuk meningkatkan fungsi peredaran darah dan meningkatkan daya tahan tubuh; dan Refleksi, yakni keterampilan Pijat penyembuhan yang ditekankan pada titik-titik sarat tertentu terutama pada daerah kaki, tubuh dan tangan; (d) Keterampilan kesenian musik Band dan Karawitan; (e) Keterampilan seni baca Al-Quran (Qiro'at); dan (f) Program penempatan dalam masyarakat.

Untuk mempersiapkan para lulusan di masyarakat, pihak panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (a) Resosialisasi, yang dilaksanakan selama 4 bulan menjelang rehabilitasi sosial dan latihan keterampilan kerja selesai. Kegiatan ini berupa Praktek Belajar Kerja; (b) Setiap lulusan diberi modal kerja sebagai bekal kerja yang sesuai dengan jenis keterampilan yang dimiliki; dan (c) Pembinaan Lanjut yang dilaksanakan

melalui cabang Dinas Sosial setempat, *Home Visit* (kunjungan rumah) oleh petugas panti RSBN, Korespondensi dalam huruf Braile, Pelatihan Pengembangan, dan Reuni (Temu Karya). Pembinaan lanjut tersebut bukan hanya mengenai penajagan lapangan kerja saja, tetapi juga penyesuaian sikap para lulusan lebih lanjut di masyarakat. Diharapkan dengan rehabilitasi sosial dan latihan keterampilan usaha (kerja) selama dalam Panti yang bersangkutan akan memenuhi masa depannya dengan penuh tanggung jawab dan mampu menyesuaikan tantangan hidupnya.

Tabel 3. Jenis dan Bentuk Program Peningkatan Keterampilan Bagi Disabilitas Netra di RSBN Malang

No.	Jenis Program	Bentuk Kegiatan
1.	Program Bimbingan Keterampilan Fisik dan Mental	a) Bimbingan Agama, b) Olahraga, c) Orientasi Mobilitas, dan d) <i>Activity Daily Living</i> (ADL)
2.	Program Bimbingan Keterampilan Sosial	a) Latihan Baca Tulis huruf Braile, b) Latihan berbahasa Indonesia, c) Latihan berhitung, d) Pendidikan Kewarganegaraan, dan e) Latihan Kewiraswastaan.
3.	Program Bimbingan keterampilan Usaha (kerja)	a) Kerajinan Tangan, b) Industri Kerumahtanggaan, c) Program keterampilan Pijat, d) Keterampilan kesenian musik Band dan Karawitan; e) Keterampilan seni baca Al-Quran/Qiro'at; dan f) Program penempatan dalam masyarakat.

Sumber: Hasil Penelitian 2019

Selanjutnya, hasil evaluasi keberhasilan program peningkatan keterampilan bagi klien penyandang disabilitas netra di panti RSBN Malang, dapat dijelaskan dalam table 4.

Berdasarkan data dari table 4 menunjukkan

bahwa sebanyak 7 (tujuh) jenis program atau sebesar 46,67% telah dilaksanakan secara baik, sedangkan 3 (tiga) program atau sebesar 20% telah dilaksanakan dengan cukup baik, dan sebanyak 5 (lima) program atau sebesar 33,33% pelaksanaannya masih kurang baik sehingga perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang merupakan panti milik pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga pelayanan sosial bagi klien penyandang disabilitas netra. Dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kemampuan penyandang disabilitas netra, RSBN melaksanakan berbagai tahapan proses yang meliputi tahap: pendekatan awal, penerimaan, pengasramaan, penempatan dalam program, dan terminasi yang meliputi: resosialisasi, penempatan kerja, dan pembinaan lanjut (*home visit*). Sedangkan program yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan keterampilan (kapasitas) klien penyandang disabilitas netra agar bisa hidup secara mandiri, meliputi tiga bentuk program, yakni: Program Bimbingan Keterampilan dalam hal kemampuan Fisik dan Mental, Program Bimbingan Keterampilan Sosial; dan Program Bimbingan keterampilan Usaha (kerja). Program yang dilaksanakan oleh RSBN tersebut telah berhasil dalam mendidik klien penyandang disabilitas netra untuk bisa hidup secara mandiri tanpa ketergantungan kepada orang lain.

Namun demikian, program atau upaya yang dilakukan oleh RSBN dalam meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas netra masih bersifat konvensional sehingga belum memenuhi standar pendidikan sebagaimana dimatkan oleh UU Nomor 8 tahun 2018 dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Tabel 4. Evaluasi Program Peningkatan Keterampilan Klien Disabilitas Netra di RSBN Malang

No	Jenis Program	Target Keterampilan	Evaluasi Pencapaian		
			Baik	Cukup	Kurang
1.	Program Bimbingan Fisik dan Mental	Bimbingan Agama: Keterampilan membaca Al-Quran Braille,	√		
		Olahraga: Senam	√		
		Orientasi Mobilitas: Keterampilan pemetaan arah lingkungan	√		
		<i>Activity Daily Living</i> (ADL)	√		
2.	Program Bimbingan Sosial	Latihan Baca Tulis huruf Braile,		√	
		Pendidikan Kewarga-negaraan: Pengenalan Pancasila	√		
		Latihan berbahasa Indonesia	√		
		Latihan berhitung		√	
		Latihan Kewiraswastaan.			√
3.	Program Bimbingan keterampilan Usaha (kerja)	Kerajinan Tangan,			√
		Industri Kerumahtanggaan			√
		Program keterampilan Pijat	√		
		Keterampilan kesenian musik Band dan Karawitan		√	
		Keterampilan seni baca Al-Quran (Qiro'at)			√
		Program penempatan dalam masyarakat.			√
		Jumlah	7	3	5

Sumber: Hasil Penelitian 2019

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, selanjutnya peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi lembaga Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang agar meningkatkan sarana dan prasarana, anggaran biaya, daya tampung, serta jumlah sumberdaya manusia pengelola khususnya pekerja sosial. Selain itu juga perlu dilakukan pemantauan pasca terminasi program.
2. Bagi pemerintah, agar dapat menyelenggarakan sistem pendidikan khusus yang efektif dan tepat guna bagi penyandang disabilitas dalam upaya meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.
3. Bagi kalangan dunia usaha agar turut berperan serta dalam upaya memfasilitasi penyandang disabilitas netra yang telah

memiliki keterampilan untuk bisa diterima (direkrut) sebagai tenaga kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada pihak RSBN Malang, Prodi Kesejahteraan Sosial, FISIP UMM, serta mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial, FISIP UMM yang melaksanakan praktikum I di RSBN Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Babbie, E. (2008). *The Basics of Social Research*. Belmont, USA: Thomson Wadsworth.
- Clements, L., & Read, J. (eds.). (2008). *Disabled People and the Right to Life: The Protection and Violation of*

- Disabled People's Most Basic Human Rights. Oxon: Routledge.
- Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ILO. (2014). Panduan Peliputan Disabilitas di Indonesia. Jakarta: ILO.
- ILO. (2017). Memetakan Penyandang Disabilitas (PD) Di Pasar Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: LPEM FEB UI.
- Jaeger, P.T., & Bowman, C.A. (1974). *Understanding Disability: Inclusion, Access, Diversity, and Civil Rights*. London: Praeger.
- Kalof, L., Dan, A., & Dietz, T. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- Kristiansen, K., Vehmas, S., and Shakespeare, T. (eds.). (2009). *Arguing about Disability: Philosophical perspectives*. Oxon: Routledge.
- Neuman, W. L. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prakoso, A.P. (2018). Pemberdayaan Tunagrahita Dalam Perspektif Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial KalijudanN (UPTD Ponsos KALIJUDAN) Dinas Sosial Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 6, Nomor 3, September-Desember 2018.
- Prawestri, A.. (2017). Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. *Jurnal ERA HUKUM*, Volume 2, No. 1, Juni 2017.
- Reefani, N. K. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244.

UPAYA TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN MENANGGULANGI KEMISKINAN

INTEGRATED EFFORTS OF THE GOVERNMENT OF PASAMAN DISTRICT TO POVERTY ALLEVIATION

Hari Harjanto Setiawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: hari_harjanto@yahoo.com

Diterima: 324 Agustus 2019, Direvisi: 6 Nopember 2019; Disetujui: 14 April 2020

Abstrak

Kemiskinan di Kabupaten Pasaman, saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan bersumber dari pemahaman dalam mengatasi masalah masih bersifat sektoral, belum terarah kepada sasaran dan belum berkelanjutan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) “SAIYO” sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Supaya dapat menggambarkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman dengan detail, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial penanggulangan kemiskinan. Informan yang berkontribusi dalam memberikan data secara langsung: penerima manfaat, petugas SLRT dan stake holders yang terlibat dalam SLRT. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, *focus group discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya terpadu Pemerintah Kabupaten Pasaman diselenggarakan melalui SLRT yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta menghubungkan dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan. SLRT sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi. Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: situasi kemiskinan di Kabupaten Pasaman, program penanggulangan kemiskinan, upaya terpadu menanggulangi kemiskinan dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “SAIYO”.

Kata Kunci: terpadu; penanggulangan kemiskinan; SLRT.

Abstract

Poverty in Pasaman Regency, is still one among problems that needs attention. Poverty alleviation has not been optimally stemmed from an understanding in overcoming problems that are still sectoral, not targeted yet and not sustainable. The “SAIYO” Integrated Services and Referral System (SLRT) as an effort to tackle poverty. In order to describe poverty reduction efforts in Pasaman Regency in detail, this study uses a qualitative approach that is a research process and understanding based on methodology that investigates a social phenomenon of poverty alleviation. Informants who contribute in providing data cover: beneficiaries, SLRT officers and stake holders involved in SLRT. Data collection was carried out by interview, observation, *focus group discussion* (FGD) and documentatary study. The results of this study indicate that the integrated efforts of the Pasaman Regency Government were carried out through the SLRT which helped to identify the needs of the poor and vulnerable, and linked them to social protection and poverty reduction programs according to their needs. SLRT as a front line that is engaged in direct social services, namely the accessibility of social services, social services for referral, social services for advocacy, as well as data and information providers. Specifically, this study aims to provide information about: the poverty situation in Pasaman District, poverty alleviation programs, integrated efforts to reduce poverty and the “SAIYO” Integrated Service and Referral System.

Keywords: integrated; poverty reduction; SLRT.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pasaman adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota kabupaten Lubuk Sikaping. Kemiskinan di Kabupaten Pasaman, saat ini masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian. Upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera sangat dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan di daerah, karena tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021, bahwa kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam setiap perumusan arah dan kebijakan pembangunan (Padang Ekspres, 2018).

Kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan pertama Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi harus diakhiri dengan memberantas kemiskinan ekstrim di tahun 2030 (Hoelman 2016). Hal ini merupakan tantangan global terbesar dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Target SDGs yang terkait kemiskinan antara lain bertujuan mengakhiri kemiskinan dimaksud bagi semua orang di manapun mereka berada. Pada tahun 2030 setidaknya mengurangi separuh proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak segala usia yang hidup dalam kemiskinan, serta menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang berlaku untuk semua orang, termasuk yang miskin dan rentan.

Percepatan penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Pasaman ke depan memprioritaskan kepada upaya peningkatan ketepatan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi

beban pengeluaran serta mengupayakan penurunan tingkat pengangguran di tengah masyarakat. Hal ini didasarkan pada angka kemiskinan Kabupaten Pasaman di tahun 2018 masih tinggi dibanding rata-rata di Sumatera Barat yaitu sebesar 7,31 persen atau 20.310 orang (BPS Sumatera Barat, 2019).

Pemerintah Kabupaten Pasaman merumuskan program dan kegiatan pembangunan demi terwujudnya percepatan penanggulangan kemiskinan tentunya tidak terlepas dari ketersediaan data kemiskinan, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terus menerus (konsisten) untuk memerangi kemiskinan dalam berbagai dimensi, termasuk dimensi kesehatan dengan kebijakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin (Suryawati, 2005).

Memandang Kemiskinan merupakan suatu fenomena utuh yang memerlukan pendekatan pada tingkat individual, kultural, dan struktural. Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Sulit ditemukan bahwa kemiskinan hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena PHK, tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas (Aneta, 2012). Meskipun demikian tidak bisa di generalisir bahwa seseorang yang mengalami seperti tersebut diatas kondisinya miskin.

Program-program untuk penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di Kabupaten Pasaman. Strategi pembangunan yang dikembangkan selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat (Prawoto, 2008).

Penanggulangan kemiskinan yang dimobilisasi oleh pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Melalui pola partisipatif lebih memungkinkan proses pembelajaran masyarakat, sekaligus perubahan perilaku untuk hidup yang lebih bermartabat. Pola ini juga memungkinkan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan lebih mendasar, menguatkan komitmen kebersamaan diantara masyarakat bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi justru menjadi tanggung jawab bersama (Yasa, 2008).

Studi literatur dan observasi lapangan menunjukkan bahwa konsep kemiskinan memiliki banyak sisi, misalnya sisi ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, kultural, kelembagaan dan politik. Sisi-sisi kemiskinan itu lahir dari penggalian mendalam faktor-faktor penyebab kemiskinan. Aspek ekonomi dari sisi kemiskinan adalah kekurangan pangan yang berakibat kelaparan. Kekurangan pangan dapat terjadi karena produksi rendah, teknologi yang tidak berkembang dan pendapatan rumah tangga yang pas-pasan dan tidak menentu. Oleh karena itu tidak ada satu definisi kemiskinan yang tunggal dan berlaku mutlak untuk semua orang di semua tempat. Konsekuensinya, memahami kemiskinan memerlukan berbagai perspektif sudut pandang (Pattinama, 2009).

Salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Pasaman adalah karena faktor

budaya. Laki-laki di Minangkabau memiliki kebiasaan yang suka duduk/nongkrong di lapau. Budaya balapau merupakan budaya tertua di Ranah Minang ini, sehingga dengan suka balapau, laki-laki di Minangkabau bisa menghabiskan waktu di lapau/warung berjam-jam, tidak mengenal waktu, terkadang telah terpakai waktu produktif untuk bekerja, yang seharusnya waktu produktif tersebut bisa dimanfaatkan ke ladang, ke sawah, berkebun, beternak, dll. Sehingga, waktu produktif yang tersedia tidak mendatangkan penghasilan/uang (Wempi, 2013).

Di samping itu kemiskinan yang terjadi di Minangkabau disebabkan juga oleh prosesi adat istiadat pernikahan/perkawinan yang rumit dan berlebihan. Prosesi yang dimaksud di sini adalah adanya tekanan dan tuntutan adat istiadat kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan untuk memberikan uang hilang/uang jemputan/uang dapur/uang seisi kamar atau “maisi adai salangko-langkoknyo untuk perkawinan” dan mengadakan acara pesta yang berlebih-lebihan tanpa mempertimbangan manfaat dan mudaratnya. Sehingga, dengan adanya prosesi adat istiadat yang seperti itu, menyebabkan orang tua terpaksa menjual semua harta benda. Terkadang menggadaikan pusaka tinggi untuk mendapatkan uang. Selesai perkawinan/pernikahaan semua harta benda sudah tidak adalagi. (Wempi, 2013)

Strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata dengan proyek atau program-program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga hendaknya merupakan kolaborasi antara aktor yang ada antara lain negara, swasta, dan masyarakat. Sehingga diperlukan kolaborasi sinergis yang nantinya akan dapat terjalin pola kemitraan strategis guna memberdayakan masyarakat. Hubungan kemitraan ketiga

aktor tadi mempunyai posisi tawar yang sama, sehingga pemerintah bukanlah sebagai aktor yang super power tetapi bagaimana membagi powernya sehingga aktor swasta dan masyarakat dapat mengambil posisi yang tepat dalam pembangunan yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tidak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun (Putra, 2007).

Pendekatan pemberdayaan sudah familiar dan telah diterapkan dalam banyak kasus, namun pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, program kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat menjalankan program rutin yang usianya sepanjang project itu dijalankan. Berbagai program yang telah ditetapkan cenderung tidak berkelanjutan secara sistematis dan kurang dievaluasi secara kontinyu. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kemana kebijakan pengentasan kemiskinan akan lebih difokuskan (Fatony, 2017).

Namun demikian, dalam setiap program penanggulangan kemiskinan perlu adanya pendamping. Perlunya tenaga pendamping yang kapabel dalam mengelola program, untuk membantu upaya penyelesaian terhadap berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan persoalan birokrasi yang rumit (Murdiansyah, 2014). Pemberdayaan komunitas dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umumnya dilihat dari pendapatan (income). Oleh karena itu sering kali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas. Pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi peningkatan pendapatan (income) saja tidak

mampu memecahkan permasalahan komunitas, karena pemberdayaan komunitas bukan hanya masalah ekonomi, namun meliputi berbagai masalah yang kompleks (Utami, 2014). Program daya fisik dan daya sosial lebih berhasil dibandingkan dengan program daya ekonomi (Taufiq, 2010).

Akselerasi penurunan tingkat kemiskinan harus difokuskan pada 40 persen penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah dan wilayah-wilayah kantong kemiskinan melalui optimalisasi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyediaan data kemiskinan yang akurat dan menjangkau wilayah terkecil dapat berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas program-program dan penurunan kemiskinan. Dibutuhkan semangat kerja sama antar K/L, antara pusat dan daerah, dan antar para pihak lainnya dalam berbagi data, informasi, sumberdaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan yang berarti. Cukup banyak dari penduduk Indonesia yang sudah keluar dari jurang kemiskinan. Bank Dunia mencatat selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang sekarang berada di bawah 10%. Selama periode itu kelas menengah Indonesia tumbuh dari 7% menjadi 20% dari total penduduk atau sekitar 52 juta orang. Namun yang perlu diperhatikan adalah masyarakat miskin yang baru saja keluar dari garis kemiskinan (rentan miskin). Jumlahnya mencapai 45% dari penduduk Indonesia atau sebanyak 115 juta orang. (Heri CS, 2020)

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan menjadi salah satu agenda utama Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menjalankan agenda tersebut, memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat.

Penanganan kemiskinan yang belum optimal bersumber dari cara pemahaman dalam yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya. Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.

One stop services terobosan pemerintah sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan warga miskin, khususnya dalam aspek: kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi, dapat menginspirasi daerah lain dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan warganya sesuai karakteristik daerah masing-masing (Muhtar & Huruswati, 2015)

Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan turut sertanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui SLRT di tingkat Kabupaten dan Puskesmas di desa/kelurahan. SLRT dan Puskesmas berkedudukan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi,

serta penyedia data dan informasi.

Dasar hukum dalam mengoperasionalkan SLRT dan Puskesmas adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018. Definisi SLRT menurut aturan tersebut adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 35 Sarana dan prasarana salah satunya adalah Puskesmas. Undang-undang tersebut di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab VI Standar Sarana dan Prasarana pada Pasal 37 Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial salah satunya Puskesmas. Pasal 44 Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Puskesmas bertujuan untuk mensinergikan berbagai potensi dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sosial di tingkat lokal, kedudukan puskesmas berkedudukan di tingkat desa/kelurahan.

Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, definisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/

atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. BAB II Hak dan Tanggung Jawab Pasal 3 UU 13/2011 disebutkan bahwa Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 5 UU 13/2011 disebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan pada Pasal 6 Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha,

bantuan hukum, pelayanan sosial, dilakukan melalui: pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan, koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana situasi kemiskinan di Kabupaten Pasaman? Dan Bagaimana program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman melalui SLRT “Saiyo”?

Diharapkan temuan kajian ini akan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi program penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak kewarganegaraan. Lebih jauh lagi tulisan ini dapat memberikan masukan pada pemerintah Kabupaten Pasaman pada khususnya dalam menangani kemiskinan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama 14 hari di lapangan, sehingga selama penelitian berlangsung peneliti dapat merasakan tinggal dan hidup di Kabupaten Pasaman. Supaya hasilnya dapat menggambarkan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Pasaman dengan detail, maka pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif. Peneliti memulai dengan a self-assesment and reflections about them selfs as situated in a sociohistorical context (Rubin & Babbie, 2008). Proses penelitian kualitatif dilakukan melalui tujuh tahapan secara simultan, antara lain Acknowledge Social Self, Adopt Perspektif, Design Study, Collect Data, Analyze Data, Inform Other (Neuman, 2006). Penelitian ini akan mengungkap secara mendalam Pemerintah Kabupaten

Pasaman dalam menanggulangi kemiskinan. Lingkup studi ini adalah “Upaya Terpadu Menanggulangi Kemiskinan” yang berada di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Penentuan lokasi penelitian ini secara purposive didasarkan bahwa di Pemerintah Kabupaten Pasaman mendapatkan penghargaan inovasi daerah melalui SLRT Keliling.

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian (purposive) yaitu keterwakilan mereka yang mengetahui informasi tentang permasalahan tersebut. Informan yang dipilih harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut: mengetahui kondisi SLRT, kebijakan penanggulangan kemiskinan dan mengetahui pelaksanaan penanganan yang telah dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, informan yang dapat berkontribusi dalam memberikan data pada penelitian secara langsung antara lain: penerima manfaat, petugas SLRT dan stake holder yang terlibat dalam SLRT. Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi, focus group discussion (FGD) dan studi dokumentasi. Peserta FGD adalah penentu kebijakan penanggulangan kemiskinan pada dinas terkait dengan tujuan untuk mengungkap kebijakan masing-masing dinas dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Data kualitatif disajikan secara diskriptif, sedangkan analisa data observasi disajikan secara kualitatif menggunakan kutipan verbatim dari partisipan sebagai data. Selain kutipan verbatim, yang dimaksud data adalah transkrip wawancara, catatan lapangan observasi, jurnal, dokumen literatur, foto, website, email dan lain sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu: hanya untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan pada lokasi yang lain. Sangat sulit untuk mengukur konsistensi hasil penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda. Objektivitas yang berhubungan dengan generalisasi tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, apabila kondisinya hampir sama maka penelitian ini bisa digunakan. Reliabilitas berkenaan dengan dapat tidaknya penelitian ini diulangi dengan hasil yang sama, mengingat situasi sosial pada hakekatnya bersifat unik dan tidak stabil, maka sangat sulit mengukur konsistensi hasil penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

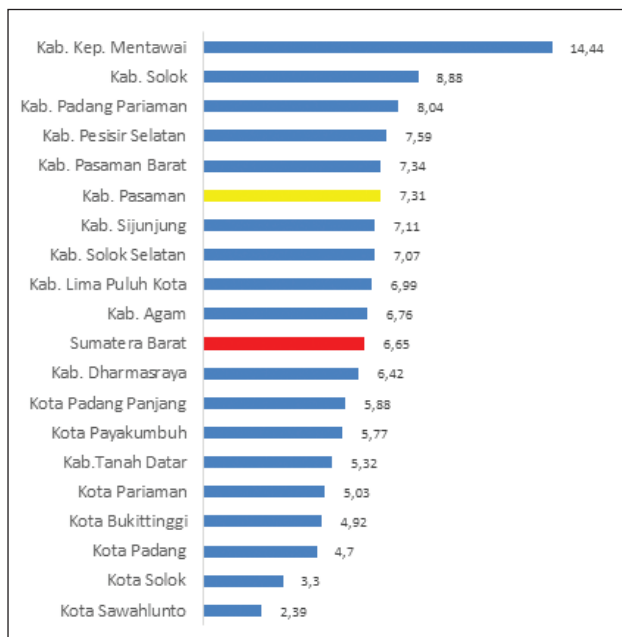
Situasi Kemiskinan di Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 7,41 persen atau 20.380 orang di tahun 2017 menjadi 7,31 persen atau 20.310 orang di tahun 2018 (BPS Sumatera Barat, 2019). Namun demikian tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman masih lebih tinggi dibandingkan jumlah rata rata di Sumatera Barat.

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman dilakukan oleh berbagai pihak selama ini, banyak pihak yang berpendapat masih bersifat parsial, meskipun sebenarnya pemerintah melalui TNP2K telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif (Purwanto, 2016). Sehingga kebijakan dan program pemerintah dalam menangani kemiskinan harus mencakup dalam tiga level yaitu makro, meso dan mikro karena ketiganya saling berkaitan satu sama lain (Adi, 2012). Pada level *macrosystem*, merupakan suatu sistem yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan. Pada level ini pemerintah telah menetapkan

beberapa undang-undang dan aturan tentang penanganan fakir miskin.

Diagram 1. Situasi Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018



Sumber: Kabupaten Pasaman Dalam Angka Tahun 2019

Angka tersebut akan menjadi koreksi bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam upaya mewujudkan tingkat kemiskinan sebesar 5,2 persen di akhir tahun 2021. Sehingga perlu peningkatan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan baik dalam perumusan kebijakan maupun sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan.

Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara program menjadi permasalahan tersendiri dalam penerapan kebijakan. Pada level *echosystem*, *mesosystem*, dan *microsystem* dapat dilihat sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi yang membuat keputusan bersama. Pada level *Echosystem*, menunjukkan kondisi sosial dimana anak tidak terlibat secara aktif, tetapi akan mempengaruhi individu tersebut. Pada level *Mesosystem*, menunjukkan hubungan

antara dua atau lebih mikrosistem atau hubungan beberapa konteks. Pada level *Microsystem*, menunjukkan setting dimana individu hidup, memiliki aktivitas, peran, dan interaksi dengan orang-orang.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman termasuk juga program yang berasal dari pemerintah pusat. Program pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pasaman antara lain program perlindungan sosial yang mencakup 40% masyarakat berpendapatan terendah, diantaranya Program Rastra (sekarang BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Di Kabupaten Pasaman, PKH dipandang efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Namun demikian permasalahan ketepatan sasaran masih jadi kesulitan dalam menyelesaikan. Pada waktu pendataan memang masyarakat tergolong miskin, namun seiring berjalannya waktu, berubah menjadi mampu secara ekonomi. Meskipun secara ekonomi masyarakat sudah mampu, namun tidak mau melepaskan program dan masih mengaku menjadi miskin. Menurut kepala Dinas Sosial cara yang diterapkan adalah dengan memberikan ceramah agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bagi yang mampu untuk keluar dari program, sehingga dapat digantikan oleh masyarakat yang lainnya. Pada jangka pendek program memberikan tambahan pendapatan (*direct effect*) Keluarga Penerima. Untuk jangka lebih panjang terjadi perbaikan perilaku melalui kondisionalitas yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak (*price effect*).

Peningkatan kualitas pelayanan melalui complementary perbaikan akses pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah daerah. Mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menangani kemiskinan, akses pendidikan, kesehatan ibu hamil dan balita, peningkatan kesetaraan gender, dan ketimpangan. Penyaluran PKH secara non tunai dan terintegrasi dengan bantuan lainnya mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan keuangan lainnya. Perluasan membutuhkan dukungan lintas sektor dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dasar.

Pemerintah Kabupaten Pasaman juga membayarkan premi iuran masyarakat miskin dan rentan kepada BPJS Kesehatan Sinkronisasi Basis Data Terpadu (BDT) dengan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Integrasi verifikasi PBI dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melengkapi dan menjaga konsistensi data melalui NIK. Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya promotif dan preventif dalam hal kesehatan. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah dengan jangkauan yang sulit. Memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas. Pada tanggal 1 maret 2019 cakupan peserta iuran 96.71% yang belum 3.3 %, atau dari 132.000 data, 114.000 adalah data BDT 21.000 PBI, dimana perbandingan Data pada tanggal 1 januari 2019. 65.000 peserta iuran dan 14.000 dari data BDT, dan kevalidan data masih tidak ditemukan dilapangan, SLRT sangat membantu untuk mendapatkan data yang valid dilapangan seperti nama alamat yang jelas, dan tanggal 1 Agustus 2019 *Universal Health Coverage* (UHC) open system yang bekerjasama dengan SLRT. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk cadangan data dalam pengurusan UHC dan PBI daerah terbatas.

Kegiatan verifikasi data tersebut juga dilakukan secara bersamaan.

Program Bantuan Siswa Miskin/Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan. Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan, antara lain pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, dan lainnya. Mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Penerima Manfaatnya adalah anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan, baik di satuan pendidikan swasta maupun negeri, (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Seiring dengan diberlakukannya KIP sejak tahun 2015, penerima manfaat program ini juga diperluas untuk siswa/santri pada pendidikan keagamaan dan siswa yang tidak bersekolah untuk dapat memasuki sistem pendidikan. Selain itu penerima manfaat program ini juga diperluas juga untuk masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C). Manfaat program ini adalah anak/siswa dari keluarga kurang mampu dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

Pemerintah Kabupaten Pasaman juga menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perlindungan sosial

dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari diselenggarakannya program tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan. Diharapkan pemerintah tidak berhenti mengeluarkan kebijakan bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan bantuan sosial dari pemerintah diharapkan dikelola dengan baik secara efektif dan efisien oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatur berjalannya program bantuan sosial. Agar bantuan tersebut dapat sampai kepada masyarakat miskin tanpa dikurangi sedikitpun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Laluhang, 2015).

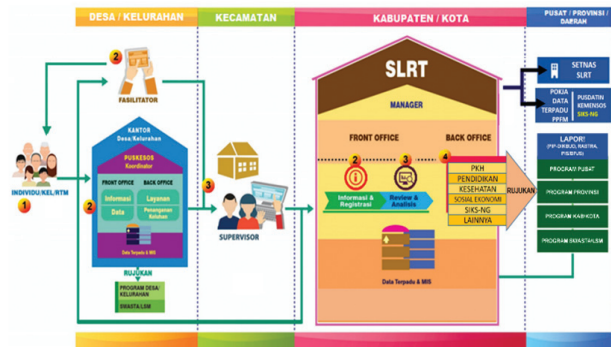
Mengoptimalkan capaian hasil dari berbagai program terkait dengan pengentasan kemiskinan telah diambil langkah berupa integrasi program. Diharapkan dengan integrasi program tersebut, penanggulangan kemiskinan dapat mencapai sasaran (Royat, 2007).

Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui SLRT “SAIYO”

Kabupaten Pasaman membangun SLRT sesungguhnya mengacu pada Permensos RI No. 15 tahun 2018, bahwa yang dimaksud dengan SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat

dan daerah. Secara umum SLRT bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan.

Bagan 1. Struktur Skema Pelayanan SLRT



Sumber: Pedoman Umum SLRT 2018

Sekretariat SLRT Kabupaten

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman sebelumnya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Selain Pemerintah Daerah, ada beberapa lembaga tumbuh dari masyarakat yang menangani kemiskinan antara lain Badan Amil Zakat (BAZ) dan Sedekah Seribu Sehari (S3). Dengan adanya SLRT dapat menyatukan baik lembaga pemerintah maupun gerakan masyarakat tersebut. Sekretariat SLRT Saiyo berada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. Saiyo merupakan slogan daerah yang berarti seiya atau senasip. Namun sebagai slogan daerah Saiyo merupakan singkatan dari Sopan Amanah Inovatif Yakin dan Optimal. Sedangkan dalam memberikan pelayanan, SLRT ini mempunyai motto; “Melayani dengan sepenuh hati”. Sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan hasilnya dapat maksimal dan bukan hanya berorientasi pada materi semata.

Pasaman menerima penghargaan SLRT dari Kementerian Sosial tahun 2018. Penghargaan ini diterima berkat Dinas Sosial Kabupaten Pasaman telah melakukan inovasi baru, bahwa Kabupaten Pasaman adalah satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang menyediakan

mobil keliling SLRT. Mobil keliling SLRT, bisa menjemput aspirasi masyarakat yang kurang mampu hingga ke pelosok Kabupaten Pasaman. Ini adalah inovasi baru Dinas Sosial Kabupaten Pasaman untuk mewujudkan masyarakat Pasaman yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya.

Penghargaan tersebut diperoleh dengan penuh perjuangan. Pada awalnya, SLRT mendapat pembinaan dari Kementerian Sosial pada akhir tahun 2016. Namun sampai bulan maret 2017 kegiatannya masih belum berjalan karena masih mempersiapkan sekretariat. Pada bulan Maret 2017 terpilih tehcnical asistent (TA) yang dilatih dan diberi motivasi untuk segera membentuk SLRT. Selain pembinaan dari Kementerian Sosial, Kabupaten Pasaman juga mengadakan pembinaan yang diselenggarakan pemerintah daerah di tahun 2017 dengan nara sumber dari Kementerian Sosial. Pada tahun 2018 juga menyelenggarakan pembinaan dengan mengundang OPD terkait dalam memberikan pelayanan. Komunikasi dilakukan dengan rapat-rapat dan diskusi online dengan group whatshap (WA). Evaluasi kinerja petugas SLRT dilakukan tiap 3 bulan dan evaluasi setahun sekali yang menentukan apakah petugas tersebut lanjut atau tidak.

Pengembangan kapasitas untuk petugas SLRT sudah cukup baik, namun ada sedikit kekurangan yaitu pembinaan untuk Front Office dan Back Office masih dirasa kurang. Kekurangan tersebut terutama pada aplikasi dan ada beberapa aplikasi yang saling berbenturan terutama dengan SIKS-NG. Selain pertemuan ditingkat kabupaten, juga diadakan pertemuan di tingkat supervisor. Sistem kerja SLRT dengan membagi menjadi 4 wilayah kerja yang dipimpin oleh supervisor. Petugas SLRT bekerja difasilitasi dengan transportasi dan baju seragam. Perkembangan SLRT selalu update terutama melalui group WA. Fasilitator diberi

kesempatan juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan. Kerjasama yang dirasakan paling menonjol adalah dengan BAZNAS karena langsung bisa dirasakan.

Salah satu kendala di lapangan adalah mengenai aplikasi antara lain seringnya perubahan berganti versi, adanya data yang tidak masuk dan munculnya SIKS-NG. Di Kabupaten Pasaman semua tablet ditarik oleh Dinas Sosial dengan alasan penggunaannya sudah tidak efektif karena spesifikasinya kurang dan aplikasinya juga sering lambat. Namun demikian pelayanan masih tetap jalan dengan tidak menggunakan sistem informasi. Pelayanan tetap berjalan dan dicatat secara manual.

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)

Masyarakat sudah tahu kalau mengadu ke fasilitator SLRT, namun wali nagari belum merasa penting untuk membentuk Puskesmas sehingga Kabupaten Pasaman baru membentuk Puskesmas di 5 nagari. Dua nagari diantaranya adalah biaya dari APBN. Kabupaten Pasaman membentuk Puskesmas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan penegasan mengoptimalkan peran masyarakat lokal (desa dan kelurahan) melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (UU No. 11 Tahun 2009, Pasal 35 (1)). Untuk mempertegas terminologi Pusat Kesejahteraan Sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 44 bahwa “Pusat Kesejahteraan Sosial adalah sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”. Pasal selanjutnya, yaitu pasal 45 “Standar minimum sarana dan

prasarana pusat kesejahteraan sosial meliputi: a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama; b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.”

Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Tugas Puskesmas adalah: 1) Pengembangan strategi keterpaduan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan guna menghindari tumpang tindih, pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan. 2) Pengembangan aksi bersama untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial antar warga, tokoh masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. 3) Pengembangan sistem informasi, terutama berkenaan dengan populasi penyandang masalah sosial dan sumber daya kesejahteraan sosial.

Fungsi Puskesmas sebagai berikut: 1) Sebagai pusat data dan informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatannya sendiri, program pemerintah desa/kelurahan. 2) Sebagai pusat pelayanan, baik bersifat pencegahan, penanganan, pengembangan maupun rujukan. Bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan,

seperti ; penyediaan sanggar belajar, distribusi kebutuhan pokok, rumah pintar, pemugaran rumah keluarga miskin, pengobatan lanjut usia, penambahan gizi balita dan sebagainya. 3) Pusat perlindungan dan advokasi untuk membantu warga masyarakat seperti dalam bentuk pemberian fasilitasi perdamaian, bimbingan sosial, mediasi warga dengan pemegang otoritas dan konsultasi.

Struktur kelembagaan Puskesmas di Kabupaten adalah sebagai berikut:

Bagan 2. Struktur Organisasi Puskesmas



Sumber: Pedoman Umum SLRT 2018

Kegiatan yang dilaksanakan puskesmas adalah sebagai berikut : 1) Penyajian data dan informasi 2) Sosialisasi/Kampanye sosial 3) Bimbingan sosial 4) Rujukan 5) Perlindungan dan advokasi sosial. Sarana dan prasarana Puskesmas yaitu: 1) Tempat kegiatan/sekretariat yang akan di jadikan pusat kegiatan bersama dengan ukuran sesuai kebutuhan, tempat ini dapat di peroleh dari bantuan hibah/wakaf, balai desa/balai rakyat atau bangunan lain yang dimiliki oleh warga setempat. 2) Sekretariat ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk ruang pertemuan bersama, ruang data, ruang data dan informasi, ruang pelayanan sosial dan sebagainya sesuai kondisi ruang dan kebutuhan. 3) Sarana operasional sebagai bentuk kegiatan bersama seperti papan data dan informasi, ATK, peralatan kegiatan, perlengkapan pelayanan dan sebagainya yang jenis, jumlah dan kualitasnya di sesuaikan dengan kebutuhan.

KESIMPULAN

SLRT terbukti efektif dalam mempercepat capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman yang secara kelembagaan dari tingkat kabupaten/kota (Sekretariat SLRT) sampai dengan tingkat desa/kelurahan (Puskesmas). Hal ini untuk memudahkan warga miskin dan rentan di Kabupaten Pasaman mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk dihubungkan dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. SLRT di Kabupaten Pasaman tetap akan berlanjut meskipun anggaran dari Kementerian Sosial berhenti setelah tiga tahun. Namun demikian diharapkan pembinaan kepada daerah tetap di lanjutkan.

Pada tingkat Nagari (desa/kelurahan) dikembangkan Puskesmas. Di Kabupaten Pasaman telah dikembangkan 3 Puskesmas untuk memperpendek jangkauan layanan bagi warga miskin. Melalui kelembagaan ini bisa dengan cepat mengidentifikasi keluhan atas program dan layanan yang mereka terima dan memastikan bahwa keluhan-keluhan mereka tertangani dengan baik. Meskipun Kabupaten Pasaman telah mengembangkan mobil SLRT keliling, dirasa perlu untuk mengembangkan Puskesmas di setiap Nagari.

Pelayanan SLRT di Kabupaten Pasaman lebih banyak melayani permasalahan kesehatan dan telah bekerjasama dengan baik dengan BPJS dan Dinas Kesehatan. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang bisa dijadikan lembaga rujukan perlu dikembangkan pada bidang-bidang lain dengan pemererat pelayanan dengan OPD terkait selain bidang kesehatan. Selain itu partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan seperti BAZNAS dan Sedekah Seribu Sehari (S3) masih perlu ditingkatkan. Dari hasil fokus group diskusi, pada pelaksanaannya BAZNAS

dan S3 berkoordinasi dengan SLRT mengenai data masyarakat yang layak mendapatkan bantuan (masuk dalam BDT) tetapi belum tersentuh bantuan. Bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan bahkan modal Usaha.

SARAN

Berdasarkan penelitian tentang upaya terpadu Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam penanggulangan kemiskinan, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan perbaikan sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah pusat, meskipun pembiayaan untuk operasional dari pusat (Kementerian Sosial) sudah tidak ada lagi dan pelaksanaan SLRT di serahkan oleh daerah, namun peran pemerintah pusat masih sangat diperlukan terutama dalam pembinaannya agar daerah tidak berjalan sendiri. Pemerintah pusat diharapkan mempunyai Standar Nasional tentang SLRT yang bisa dijadikan media kontrol pusat dan dijadikan acuan daerah. Selain itu Kementerian Sosial bisa berperan dalam memberikan pembinaan atau penguatan kepada petugas.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, bahwa beban SLRT terlalu berat untuk menangani masyarakat sekabupaten Pasaman, sehingga masih banyak desa/nagari yang belum terjangkau oleh pelayanan SLRT. Sebaiknya dikembangkan Puskesmas agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial terutama penanggulangan kemiskinan di tingkat Nagari (desa/kelurahan). Selain itu harus selalu ditingkatkan fasilitas dan intensif bagi petugas. Dengan demikian kualitas pelayanan diharapkan akan meningkat.
3. Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bawa sebagian besar pelayanan SLRT di Kabupaten Pasaman dilihat dari data pelayanan adalah tentang kesehatan.

Sehingga perlu memperkuat kemitraan dengan OPD yang lain untuk dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan melalui SLRT. Selain itu standar of procedure (SOP) perlu dibuat agar pelayanan tidak terpengaruh oleh perhantian pimpinan.

4. Kepada Masyarakat; Selama ini sudah ada keterlibatan masyarakat seperti BAZNAS dan komunitas Sedekah Seribu Sehari (S3). Namun keterlibatan masyarakat perlu untuk ditingkatkan sehingga masyarakat juga berperan aktif dalam membantu penanggulangan kemiskinan. Partisipasi masyarakat ini merupakan potensi-potensi sosial yang bisa dikembangkan sampai pada tingkat Nagari dan bahkan sampai tingkat Jorong.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan artikel ini berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, disampaikan terima kasih kepada Puslitbangkesos yang memfasilitasi penelitian di Kabupaten Pasaman. Ucapan terima kasih kepada pejabat pada OPD dan secara khusus kepada para pejabat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman serta tim SLRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat : Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Badan Pusat Statistik (2019), Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, BPS Sumatera Barat, Tahun 2019.
- Fatony, A. (2017). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessment: Kasus Yogyakarta. *Sosio Konsepsia*, 16(2), 123-142.
- Heri CS, (2020), *Mencari Terobosan agar 115 Juta Rakyat Rentan Tak Kembali Miskin*, Idola 92.6 FM Semarang, <https://www.radioidola.com/2020/mencari-terobosan-agar-115-juta-rakyat-rentan-tak-kembali-miskin/>.
- Hoelman dkk, Sustainable Development Goals (SDGs), Panduan Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah, INDFID, Edisi Revisi tahun 2016
- Kementerian Sosial RI (2018), Pedoman Umum Sistem Layanan dan rujukan Terpadu (SLRT) tahun 2018
- Laluhang, S. M. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(7).
- Muhtar, M., & Huruswati, I. (2015). Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan Di Sragen. *Sosio Konsepsia*, 5(1), 277-291.
- Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada program gerdu-taskin di kabupaten Malang). *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 4(1), 71-92.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods Qualitatif and Quantitative Approaches* (Sixth ed.). USA: PEARSON.
- Padang Ekspres (2018) https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/cetak/berita/104662/Angka_Kemiskinan_di_

- Pattinama, M. J. (2009). Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat). *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 13(1), 1-12.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu.
- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- Prawoto, N. (2008). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. JESP: *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.
- Purwanto, A. B. (2016). Peran Lembaga Layanan Terpadu Dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh). *Sosio Konsepsia*, 5(3), 205-216.
- Putra, R. E. (2007). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 6(1).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021
- Royat, S. (2007). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. In Materi Assisten Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dalam Penanggulangan Kemiskinan, tanggal (Vol. 21).
- Rubin, A., & Babbie, E. R. (2008). *Research Methods for Social Work* (Sixth ed.). USA: Thomson Brooks/cole.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Taufiq, A. (2010). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak) (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
- Utami, T. (2014). Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (Pkl), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 25(2).
- Wempi, Y (2013). *Kemiskinan Akibat Belenggu Budaya*, KOMPASIANA <https://www.kompasiana.com/wempi/5528b68af17e61357c8b459c/kemiskinan-akibat-belenggu-budaya?page=all>
- Yasa, M. (2008). Penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di Provinsi Bali. *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(2).

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERBATASAN
(Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat)**

***EFFECTIVENESS OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN
IN POVERTY ALLEVIATION IN THE BORDER
(Case Study of Jagoi Babang District, Bengkayang Regency, West Borneo)***

Sabinus Beni dan Blasius Manggu

Program Studi Kewirausahaan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Buana
Jln. Bukit Karmel No.1 Bengkayang, Kalimantan Barat
E-mail: beni@shantibhuana.ac.id

Diterima: 28 Agustus 2019, Direvisi: 27 Nopember 2019; Disetujui: 14 April 2020

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian Sarawak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan Kemiskinan di daerah Perbatasan. Metode penelitian merupakan metode kuantitatif yang menggunakan desain non eksperimental. Permasalahan pokok penelitian adalah tingkat putus sekolah dan partisipasi pemeriksaan kesehatan oleh masyarakat Pra Sejahtera karena ketiadaan biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan di daerah perbatasan yang terlihat dari menurunnya angka putus sekolah, tingginya partisipasi mengunjungi fasilitas kesehatan baik untuk kegiatan posyandu maupun pemeriksaan kesehatan serta kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang bersumber dari penyisihan dana bantuan yang diterima. Walaupun, dari total penduduk miskin di Kecamatan Jagoi Babang berjumlah 882 Kepala Keluarga, sementara Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Jagoi Babang per tahun 2018 sebanyak 357 orang, artinya masih ada 527 keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan. Sebagai saran kepada pemerintah, sebaiknya dilakukan pembaharuan data secara terus menerus dalam Basis Data Terpadu dari data yang digunakan tahun 2015 serta adanya program pemberdayaan bagi masyarakat perbatasan dengan mendirikan Sekolah Lapangan yang dapat meningkatkan *Soft Skill* dan *Hard Skill* dalam ilmu Kewirausahaan agar masyarakat tidak selalu berorientasi untuk bekerja di Malaysia.

Kata Kunci: perbatasan, pemberdayaan, kemiskinan.

Abstract

This research was conducted in Jagoi Babang District, Bengkayang Regency, West Kalimantan, which is borders area with the State of Sarawak, Malaysia. This study aims to see the effectiveness of the implementation of the Program Keluarga Harapan in alleviating Poverty in the Border area. The research method is a quantitative method that uses a non-experimental design. The main problems of the study are the level of school dropout and participation in health checks by the Prosperous community due to lack of funds. The results showed that the program keluarga harapan was very effective in alleviating poverty in the border areas as seen from the dropout rate, the high participation in visiting health facilities both for posyandu activities and health checks as well as the ability to meet basic needs stemming from the provision of aid funds received. Although, of the total number of poor people in Jagoi Babang Subdistrict, there are 882 families, while beneficiary family in Jagoi Babang Subdistrict in 2018 is 357 beneficiary family, meaning that there are still 527 Poor Family who have not involved the program. As a suggestion to the government, it is better to do continuous data updating in the Integrated Database of data used in 2015 as well as an empowerment program for border communities by establishing Field Schools

that can improve Soft Skills and Hard Skills in Entrepreneurship science so that the community is not always oriented working in Malaysia.

Keywords: *borders, empowerment, poverty.*

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki 6.888 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah administrasi Kabupaten Bengkayang dengan sebaran KPM di Kecamatan Jagoi Babang sebanyak 3594 KPM dari keluarga tidak mampu. Istilah Keluarga Sangat Miskin dalam Undang-undang penanganan Fakir Miskin menggunakan istilah Keluarga Pra Sejahtera yang disebut Keluarga Penerima Manfaat yang terdata dalam Basis Data Terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Syarat Kepesertaan PKH adalah memenuhi tiga komponen yaitu: Komponen Kesehatan yang meliputi adanya Ibu Hamil, Mempunyai anak Balita dan Anak Usia Sekolah. Komponen kedua yaitu Komponen Pendidikan yakni memiliki anak yang bersekolah di SD, SMP, dan SMA. Komponen Ketiga yakni Komponen Kesejahteraan Sosial yakni memiliki anggota keluarga penyandang Disabilitas Berat, dan memiliki anggota keluarga lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas. Basis Data Terpadu (BDT) yang digunakan berasal dari hasil pendataan tahun 2011 oleh BPS dan dimutakhirkan kembali pada tahun 2015.

Kecamatan Jagoi Babang merupakan salah satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang menjadi sasaran PKH dimana Kecamatan Jagoi Babang berbatasan secara langsung dengan Negara Malaysia bagian Sarawak dalam rangka mengentaskan kemiskinan dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan atau Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Apando Ekardo, Firdaus, dan Nilda Elfemi yang

berjudul Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Kabupaten Pesisir Selatan disimpulkan bahwa tujuan Program Keluarga Harapan di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah tercapai jika dilihat dari segi bidang pendidikan dan kesehatan. Jika dilihat di bidang pendidikan minat anak-anak RTSM sudah tinggi untuk sekolah karena pakaian dan semua perlengkapan sekolah sudah memadai jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang belum mendapat PKH. Dan juga dilihat di bidang kesehatan ibu rumah tangga miskin sudah sering membawa anaknya untuk berobat ke Puskesmas dan belita tidak lagi kekurangan gizi, ini terungkap dari data primer yang peneliti dapatkan dari petugas Puskesmas.

Satrio Widiyanto dalam artikel yang dipublikasikan pada harian Pikiran Rakyat tanggal 14 November 2014 berjudul Sukses Menekan Kemiskinan, Belasan Negara Pelajari Program Keluarga Harapan Indonesia, menyatakan bahwa PKH atau *Conditional Cash Transfer* (CCT), sebagai penanggulangan kemiskinan dengan adanya tim yang sangat solid dalam menjalankan program ini. Selain itu, CCT ini mendapatkan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah. salah satu keberhasilan PKH adalah dengan adanya kontrol dan bimbingan yang ketat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang dilakukan oleh pendamping PKH dan Peksos Supervisor.

Penelitian tentang Perlindungan Sisoal dan Pengentasan Kemiskinan yang dilakukan oleh Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty dalam penelitiannya yang berjudul Program Keluarga Harapan (PKH):

Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menyediakan bantuan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.

Sabinus Beni dan Blasius Manggu dalam penelitian yang berjudul Program Keluarga Harapan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan efektif dalam mengentaskan kemiskinan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (keluarga pra sejahtera).

Kemiskinan merupakan salah satu dari masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Masalah sosial adalah suatu ketidak-sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. (Soerjono Soekanto 2012: 406-407). Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Manusia dilahirkan ke dunia adalah untuk bahagia, sejahtera, makmur dan sukses (Sabinus Beni, 2017).

METODE

Penelitian dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat berbatasan darat dengan Sarikin Malaysia Bagian Sarawak dengan waktu penelitian Bulan Januari hingga Juni 2019. Metode penelitian merupakan metode kuantitatif yang menggunakan desain non eksperimental. Untuk melengkapi temuan dan kredibilitas penelitian, metode kualitatif sebagai metode pelengkap dengan teknik pengumpulan data berupa

Observasi dan wawancara terhadap Ibu Rumah Tangga yang menjadi responden. Data primer merupakan data yang diambil dari Pendamping Sosial PKH, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan dokumentasi serta memanfaatkan kepustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menggambarkan dan memaparkan suatu keadaan gejala sosial yang berupa kata-kata atau lisan dalam masyarakat di wilayah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kecamatan Jagoi Babang

Kecamatan Jagoi Babang merupakan kecamatan yang terletak paling utara Kabupaten Bengkayang yang dibentuk pada tahun 1999. Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Jagoi Babang adalah:

Utara : Serawak-Malaysia Timur

Selatan: Kecamatan Seluas

Timur : Kecamatan Siding

Barat : Kabupaten Sambas

Kecamatan Jagoi Babang membawahi 6 Desa yang terdiri dari 14 Dusun dan 41 Rukun Tetangga (RT). Dengan kondisi alam dan pembangunan yang belum memadai, pelayanan prima dari pemerintah kecamatan belum dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena jumlah pegawai kecamatan yang belum ideal. Di tingkat desa, seluruh desa dipimpin oleh kepala desa dengan latar belakang pendidikan yang masih beragam serta masih perlu mendapat perhatian peningkatan sumber

daya manusia dalam hal aparat pemerintah desa.

Faktor terpenting dalam peningkatan sumber daya manusia di Kecamatan Jagoi Babang adalah melalui penyediaan fasilitas Pendidikan. Sampai saat ini baru tersedia 18 Sekolah Dasar, 6 SMP, 1 SMA dan 1 SMK semua fasilitas pendidikan tersebut masih belum bisa diharapkan karena semuanya masih serba kekurangan. Selain fasilitas pendidikan, Fasilitas Kesehatan juga turut menjadi permasalahan dimana saat ini terdapat 1 puskesmas yang seharusnya dapat dimaksimalkan dengan penyediaan Tenaga Dokter Umum dan Dokter Spesialis atau bahkan bisa ditingkatkan sebuah rumah sakit pratama agar masyarakat tidak selalu berobat ke Malaysia.

Sektor Perdagangan yang paling banyak di Jagoi Babang adalah pedagang eceran sembako, keberadaan fasilitas pasar yang memadai sangat didambakan oleh masyarakat untuk mempercepat peningkatan ekonomi. Karena letak kecamatan Jagoi Babang berada tepat pada lintasan yang memiliki ciri khusus dengan wilayah lain dikarenakan sebagian masyarakat berbelanja dan bekerja ke Negara Malaysia yang menyebabkan adanya kegiatan ekonomi yang tidak terlihat secara nyata di Kecamatan Jagoi Babang.

Program Keluarga Harapan

Penduduk Kecamatan Jagoi Babang berjumlah 10.560 Jiwa dengan luas wilayah 655 KM². Masyarakat Pra Sejahtera yang menerima dana Program Keluarga Harapan mulai masuk di Kecamatan Jagoi Babang pada tahun 2014 sampai sekarang yang tersebar pada 6 desa di Wilayah Kecamatan Jagoi Babang, Yaitu Desa Jagoi 101 KK, Desa Kumba 57 KK, Desa Sekida 70 KK, Desa Gersik 77 KK, Desa Sinar Baru 32 KK, Desa Semuning Jaya 19 KK, Dengan total 349 Keluarga Penerima

Manfaat PKH. Tahun 2014-2017 Pendamping PKH Kecamatan Jagoi Babang didampingi oleh 1 (satu) orang Pendamping PKH, pada tahun 2018 sampai sekarang pendamping PKH Kecamatan Jagoi Babang berjumlah 2 (dua) orang. Secara umum kondisi KPM dan nominal bantuan PKH di Kecamatan Jagoi Babang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rekap Jumlah KPM dan Total Bantuan PKH di Kecamatan Jagoi Babang Tahun 2014-2018

Tahun	Jlh. KPM (Org)	Jlh. Bantuan (Rp)
2014	151	285.390.000
2015	179	338.310.000
2016	211	398.790.000
2017	211	398.790.000
2018	357	674.730.000
Total		2.096.010.000

Sumber: Laporan Pendamping PKH Kecamatan Jagoi Babang, Tahun 2014-2019

Tujuan Bantuan Sosial bersyarat tersebut adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, agar di gunakan untuk keperluan pendidikan anak, kesehatan dan lain-lainnya. Adapun tujuan PKH secara umum antara lain:

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Tabel 2. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Jagoi Babang tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa KM ²)
Jagoi Babang	655	10.560	16

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2019 (data diolah)

Dukungan Pemerintah Daerah

Dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan cukup baik, hal tersebut tercermin dari tersedianya ruang Sekretariat UPPKH Kabupaten Bengkayang di salah satu ruangan pada kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Memfasilitasi kegiatan Rakor Kabupaten baik yang dilaksanakan di Aula Kantor maupun di Bank Mandiri Bengkayang selaku Bank HIMBARA penyalur Bantuan PKH.

Dukungan pemerintah juga terlihat dari berbagai dukungan baik moril maupun materi kepada seluruh Pendamping PKH yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Baik berupa bantuan subsidi transportasi, fasilitasi rakor di tingkat Kecamatan maupun Kecamatan serta bantuan pendampingan langsung ke KPM di Desa-desa berupa penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) KPM Program Keluarga Harapan.

Kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagoi Babang merupakan Keluarga Pra Sejahtera yang memiliki komponen bidang Pendidikan: memiliki anak usia SD, SMP, dan SMA Sederajat yang masih mengenyam pendidikan formal. Bidang kesehatan: memiliki anak Usia Dini

yang secara rutin mengikuti kegiatan posyandu serta Ibu Hamil yang selama masa kehamilan secara rutin melakukan pemeriksaan kehamilan pada Fasilitas Kesehatan Terdekat. Bidang kesejahteraan sosial: memiliki keluarga batih yang tercatat pada Kartu Keluarga sebagai Lanjut Usia (lansia dengan usia diatas 60 tahun).

Data lapangan menunjukkan bahwa data Keluarga Pra Sejahtera penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagoi Babang menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan dan peningkatan angka partisipasi sekolah serta partisipasi mengunjungi fasilitas kesehatan. Data terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Data Perbaikan Kesejahteraan, Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, dan Partisipasi Mengunjungi Fasilitas Kesehatan

Tahun	Perbaikan Kesejahteraan (%)	Partisipasi Sekolah (tingkat kehadiran)	Partisipasi mengunjungi Fasilitas Kesehatan
2014	45	55	57
2015	50	90	85
2016	55	95	89
2017	65	100	92
2018	76	100	98

Sumber: Laporan Pendamping PKH Kecamatan Jagoi (Data Diolah)

Perbaikan kesejahteraan tergambarkan melalui adanya peningkatan taraf hidup dilihat dari konsumsi rumah tangga, dimana konsumsi rumah tangga sebelum dan sesudah menerima bantuan PKH terjadi peningkatan yakni peningkatan kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok melalui penyesihan uang bantuan setelah pemenuhan biaya sekolah anak.

Partisipasi dalam bidang pendidikan terlihat dari menurunnya angka putus sekolah bagi anak-anak keluarga penerima manfaat PKH serta semakin meningkatnya tingkat kehadiran di sekolah dilihat dari presensi kehadiran. Dalam bidang kesehatan terjadinya

peningkatan kunjungan pada fasilitas kesehatan baik di PUSKESMAS maupun di POSYANDU, khususnya bagi keluarga pra sejahtera penerima manfaat PKH. Tingkat partisipasi tiga bidang: bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Peningkatan Kesejahteraan KPM PKH

Bidang	Sebelum menerima PKH	Sebelum menerima PKH
Ekonomi	55%	60%
Pendidikan	60%	100%
Kesehatan	50%	75%

Sumber: Data Lapangan (diolah)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh sangat signifikan dalam meningkat kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Terutama pada bidang pendidikan, rata-rata anak-anak KPM PKH mengikuti kegiatan pendidikan dan tingkat kehadiran di sekolah mencapai 100% dikarenakan biaya untuk keperluan sekolah telah terpenuhi dari dana bantuan PKH serta hal tersebut dapat menekan keinginan orang tua dan anak untuk melibatkan anak dalam bekerja pada saat jam sekolah.

Temuan data di lapangan dan pengakuan dari masyarakat dan tokoh masyarakat (Ketua RT, Kepala Dusun, Kepala Desa, dan Pihhak Kecamatan) yang dikuatkan oleh pendamping PKH Kecamatan Jagoi Babang serta dikonfirmasi kepada UPPKH Kabupaten Bengkayang melalui Koordinator Kabupaten (KORKAB) bahwa masih banyak masyarakat pra sejahtera yang tidak ataupun belum mendapatkan bantuan PKH dikarenakan data PKH diambil dari data BPS tahun 2011 dan diperbaharui tahun 2015 yang terdapat pada Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial. Sementara pada tahun setelah pembaharuan (tahun 2015) karena faktor ekonomi dan kurang stabilnya harga komoditi pertanian (karet) dan

perkebunan (sawit) menyebabkan banyak masyarakat yang masuk kategori pra sejahtera yang tidak tersentuh oleh program PKH baik yang memiliki komponen PKH maupun tidak.

Kondisi Sosial

Salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pendidikan. Indikator pembangunan pendidikan dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada. Pada tahun 2017 di Kecamatan Jagoi Babang, terdapat 18 Sekolah Dasar, 6 Sekolah Menengah Pertama, dan 1 Sekolah Menengah Atas dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan. Jumlah murid selama tahun ajaran 2017/2018 adalah sebanyak 1.955 siswa untuk tingkat SD, sebanyak 562 siswa untuk tingkat SMP, sebanyak 211 siswa untuk tingkat SMA, dan sebanyak 80 siswa untuk SMK. Tenaga guru yang ada pada tahun ajaran yang sama untuk tingkat pendidikan SD sebanyak 128 orang, guru SMP sebanyak 53 orang, sebanyak 14 orang untuk tingkat pendidikan SMA, dan 11 orang untuk tingkat pendidikan SMK.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Jagoi Babang belum cukup memadai. Pada tahun 2017, jumlah puskesmas yang ada sebanyak 1 unit, puskesmas pembantu sebanyak 5 unit, dan Poskesdes/Polindes sebanyak 6 unit, bidan sebanyak 13 orang, perawat sebanyak 13 orang, setelah di perhatikan data petugas kesehatan dikecamatan Jagoi Babang masih sangat dibutuhkan Tenaga Dokter yang harus ditempatkan di daerah Jagoi Babang, petugas kesehatan yang ada belum tersebar di desa-desa yang ada. Pembangunan di bidang kesehatan juga masih perlu ditingkatkan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat semakin baik.

Berikut ini data rumah tangga sasaran

dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kecamatan Jagoi Babang menurut desa Tahun 2015.

Tabel 5. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Di Kecamatan Jagoi Babang Menurut Desa 2015

Desa	Rumah Tangga
Jagoi	244
Kumba	133
Sinar Baru	91
Gersik	138
Semunying Jaya	50
Jagoi Sekida	226
Jumlah	882

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, 2015

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan, terutama dilihat dari aspek pendidikan. Tingkat putus sekolah semakin kecil yang terjadi pada anak-anak KPM PKH serta tingkat kehadiran di sekolah semakin membaik.
2. Bidang kesehatan, KPM PKH semakin rajin mengunjungi fasilitas kesehatan terutama dalam mengikuti dan memberikan imunisasi lengkap bagi Bayi dan Balita serta pemeriksaan ibu hamil minimal 3 (tiga) kali selama periode kehamilan.
3. Terjadinya perbaikan taraf hidup, dengan adanya bantuan PKH dapat menjadi sarana edukasi pentingnya menabung di lembaga keuangan seperti Bank dan Credit Union (CU) dalam mempersiapkan kehidupan untuk dimasa yang akan datang.
4. Jangka pendek belum terlihat secara signifikan pengaruh program keluarga harapan dalam meningkatkan taraf hidup KPM PKH mengingat output dari bantuan berupa investasi Sumber Daya Manusia usia SD, SMP, dan SMA Sederajat.

5. Belum ada program pemberdayaan yang berbasis pengembangan dan peningkatan *Hard Skill* dan *Soft Skill* untuk meningkatkan taraf hidup serta perbaikan ekonomi rumah tangga yang bisa membuat masyarakat menjadi mandiri dan tidak bersandar pada Negara tetangga. Baik untuk keperluan sehari-hari maupun pekerjaan untuk mengatasi pengangguran.
6. Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan PKH dikarenakan data PKH berasal dari data BDT Kementerian Sosial Tahun 2015. Yang mengakibatkan masyarakat miskin setelah tahun 2015 tidak terakomodir.
7. Belum adanya perhatian pemerintah untuk membuka atau meningkatkan kualitas Fasilitas Pendidikan baik Infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia yang bertaraf Internasional agar setara dengan Negara Malaysia.
8. Belum adanya perhatian pemerintah dalam Bidang Kesehatan untuk meningkatkan Layanan Kesehatan dengan mendirikan Rumah Sakit bertaraf Internasional agar masyarakat Indonesia tidak berobat ke Kuching bahkan sebaliknya masyarakat Malaysia yang berobat ke Jagoi Babang.
9. Belum adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi pembangunan yang masih jauh dari harapan kemerdekaan, dimana masih banyak Jalan yang rusak dan belum diaspal tidak seperti perkampungan di Malaysia yang status jalannya sangat baik.

SARAN

Dalam penelitian ini, masih banyak kekurangan yang menurut peneliti harus diperbaiki oleh pemerintah, terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Indonesia, Khususnya Perbatasan Jagoi Babang. Beberapa saran yang dapat kami sampaikan, antara lain:

1. Program Keluarga Harapan sebaiknya dilakukan pembaharuan data secara terus menerus dalam Basis Data Terpadu (BDT). Terakhir data yang digunakan data tahun 2015.
2. Adanya program pemberdayaan lebih untuk masyarakat perbatasan, bisa mendirikan Sekolah Lapangan yang dapat meningkatkan *Soft Skill* dan *Hard Skill* dalam ilmu Kewirausahaan masyarakat agar tidak selalu berorientasi untuk bekerja di Malaysia sebagai TKI baik yang legal maupun illegal.
3. Besaran bantuan sebaiknya tidak bervariasi, dan akan berdampak pada kecemburuan sosial. Hal tersebut juga berdampak pada proses graduasi Mandiri sehingga muncul ide dari Pendamping PKH untuk membuat stiker ataupun sejenisnya yang menandakan masyarakat penerima bantuan PKH yang menurut hemat peneliti akan menambah anggaran yang sia-sia.
4. Anggaran-anggaran yang tidak terlalu bermanfaat seperti pada poin 3 sebaiknya untuk proses pendampingan dan pelatihan bagi KPM PKH terkait Usaha Produktif.
5. Perlunya perhatian pemerintah untuk membuka atau meningkatkan kualitas Fasilitas Pendidikan baik Infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia yang bertaraf Internasional agar setara dengan Negara Malaysia.
6. Perlunya perhatian pemerintah dalam Bidang Kesehatan untuk meningkatkan Layanan Kesehatan dengan mendirikan Rumah Sakit bertaraf Internasional agar masyarakat Indonesia tidak berobat ke Kuching bahkan sebaliknya masyarakat Malaysia yang berobat ke Jagoi Babang.
7. Kondisi pembangunan yang masih jauh dari harapan kemerdekaan, dimana masih banyak Jalan yang rusak dan belum diaspal tidak seperti perkampungan di Malaysia yang status jalannya sangat baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai ucapan terima kasih atas kontribusinya dalam penelitian ini baik secara materi maupun moril, antara lain:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI melalui DRPM Ristekdikti dalam mensupport pendanaan penelitian melalui Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2018,
2. LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan dalam kapasitasnya sebagai Pembina dan menjembatani proses penandatanganan kontrak penelitian,
3. Pusat Riset Penelitian dan Pengabdian STIM Shanti Bhuana Bengkayang yang terus menerus mendukung kegiatan penelitian ini dengan tanpa pamrih,
4. Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai UPPKH Kabupaten Bengkayang yang selalu mendukung dalam kegiatan penelitian,
5. Pendamping PKH dan KPM PKH di Kecamatan Jagoi Babang yang sudi bekerjasama dalam mendukung kegiatan penelitian ini.

Serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). Bengkayang Dalam Angka Tahun 2019. Bengkayang: BPS Kabupaten Bengkayang.
- Beni, S., & Manggu, B. (2018). Program Keluarga Harapan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha. *Jurkami* Vol. 3 No.2 Tahun 2018. Sintang: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada Khatulistiwa.

- Badan Pusat Statistik. (2018). Kecamatan Jagoi Babang Dalam Angka 2018. Bengkulu: BPS Kabupaten Bengkulu.
- Beni, S. (2017). *Pembangunan Manusia Melalui Pendidikan Dasar Credit Union*. Jakarta: Mer-C Publishing.
- Beni, S., Manggu, B. & Sadewo, Y.D. (2019). Counseling Of Family Financial Management Literacy Program Keluarga Harapan Beneficiaries. Diseminasi: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.1 No.2 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka Tangerang.
- Ekardo, A., Firdaus & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan atau Program Penanggulangan Kemiskinan. *Mamangan* Vol.3 No.1, Januari-Juni 2014. Padang: Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang.
- Suleman, SA., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 4 No. 1. Tahun 2017. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
- Soekanto, S. dan Sulistyowati, B. 2012. *Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widianto, S. (2014). Sukses Menekan Kemiskinan, Belasan Negara Pelajarai Program Keluarga Harapan Indonesia. dalam artikel yang dipublikasikan pada harian *Pikiran Rakyat* tanggal 14 November 2014 Pukul 15.53 WIB.

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN MENGGUNAKAN
BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN MASYARAKAT DESA**

***THE EMPOWERMENT OF WOMEN GROUPS USING THE VILLAGE-OWNED
ENTERPRISE IN INCREASING VILLAGE COMMUNITY INCOME***

Saftri Endah Winarti, Herawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Jl. Timoho No 317, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta
E-mail: saftriendahwinarti@apmd.ac.id

Fajar Sidik

Program Studi Kebijakan Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo No 1, Karangmalang, Yogyakarta
E-mail: fajarsidik@uny.ac.id

Diterima: 25 September 2019, Direvisi: 12 Maret 2020; Disetujui: 14 April 2020

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan kemitraan antara kelompok perempuan (PKK) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Pemerintah Desa Ponggok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Penelitian kualitatif dengan pendekatan metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena pendirian dan pengembangan BUM Desa setelah kebijakan dana desa ditetapkan mulai tahun 2014 pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Hanya dalam beberapa tahun berjalan, jumlah BUM Desa yang berdiri meningkat signifikan, namun banyak BUM Desa yang tidak mampu aktif dan produktif dalam menjalankan bisnis usaha. Desa Ponggok menjadi desa berprestasi dan percontohan nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, sehingga dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk dipelajari lebih mendalam. Dalam konteks penelitian ini, BUM Desa dipahami dengan menggunakan teori *social enterprise* sesuai dengan kedudukan, peran, dan fungsinya sebagai lembaga sosial-ekonomi di pedesaan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Dalam kegiatan eksplorasi permasalahan, data primer dan sekunder dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dan sekunder yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, tim peneliti dalam penelitian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) berbasis BUM Desa dalam mengembangkan bisnis usaha kecil produk lokal khas desa di area desa wisata telah mampu meningkatkan pendapatan tambahan bagi kelompok-kelompok perempuan, namun faktanya menunjukkan hasil keuntungan bisnis usaha yang diperoleh masih cenderung didominasi oleh PKK induk (pusat) dari pada kelompok-kelompok perempuan yang dibina di tingkat paling bawah. Rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan/perbaikan bagi Pemerintah Desa Ponggok agar melakukan pemberdayaan masyarakat dari akar rumput, sehingga optimalisasi upaya untuk mereduksi masalah kemiskinan di pedesaan dapat diakselerasi dengan tindakan kongkret dan tepat sasaran.

Kata Kunci : *pemberdayaan, kelompok perempuan, BUM Desa, kesejahteraan sosial, social enterprise, desa ponggok.*

Abstract

This article aims to explain the obstacles in implementing partnerships between women's groups (PKK) and Village-Owned Enterprises (BUM Desa) by the Ponggok Village Government to improve the welfare of the community in Ponggok Village, Klaten Regency. Qualitative research with a case study method approach is used to explore problems that occur in the field. This research is motivated by the phenomenon of the establishment and development of BUM Desa after the village funding policy was set to begin in 2014 during the administration of President Jokowi. In just a few years running, the number of BUM Desa that stands significantly increased, but many BUM Desa are unable to be active and productive in running a business. Ponggok Village has become a village of achievement and national pilot designation designated by the Central Government so that it is used as a research location for further study. In the context of this study, BUM Desa is understood by using Social Enterprise theory in accordance with its position, role and function as a socio-economic institution in rural areas. The study was conducted qualitatively with the case study approach method. In problem exploration activities, primary and secondary data are collected using interview, observation, and documentation techniques. Primary and secondary data obtained are then analyzed using qualitative data analysis techniques according to Miles and Huberman. Based on the results of data analysis that has been done, the research team in this study can conclude that the empowerment of BUM Desa-based women groups (PKK) in developing small businesses that are typical local products of villages in the tourist village area has been able to increase additional income for women's groups, however, the fact is that the results of the business profits obtained still tend to be dominated by the parent PKK (central) rather than the groups of women fostered at the lowest level. The recommendations that can be given from this research are: the results of this study can be used as input/improvements for the Ponggok Village Government to empower communities from the grassroots so that the optimization of efforts to reduce the problem of poverty in rural areas can be accelerated with concrete and targeted actions.

Keywords: *empowerment, women's group, BUM Desa, social welfare, social enterprise, ponggok village.*

PENDAHULUAN

Sejak kebijakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ditetapkan oleh pemerintah pusat, transformasi pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dari berbasis komunitas menjadi berbasis kelembagaan formal (BUM Desa). Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata) telah melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas melalui PNPM Pariwisata Desa untuk mengembangkan desa wisata alam sejak tahun 2009-2014 membentuk 1500-an unit desa wisata dengan jumlah total anggaran mencapai Rp 406 Milyar (Kementerian Pariwisata, 2014). BUM Desa diperkenalkan tahun 2009 oleh pemerintah pusat di bawah masa Presiden SBY, namun belum menjadi prioritas. Setelah Presiden SBY diganti Presiden Joko Widodo-Kalla, BUM Desa dijadikan sebagai prioritas pemerintah pusat untuk pembangunan di wilayah perdesaan.

Secara konseptual, BUM Desa memiliki peran dan fungsinya secara ekonomi dan sosial dapat dimaknai sebagai lembaga *social enterprise* (Borgaza, Galera, & Nogales, 2008) yang dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan di pedesaan untuk menyelesaikan masalah sosial-kemiskinan (Eversole, Barraket, & Luke, 2014).

UNDP dan EMES European Research Network mendefinisikan *social enterprises* yaitu “*may be defined as private, autonomous, entrepreneurial organizations providing goods or services with an explicit aim to benefit the community. They are owned or managed by a group of citizens, and the material interest of capital investors is subject to limits. Social enterprises place a high value on their autonomy and on economic risk-taking related to ongoing socioeconomic activity. Social enterprises are either prohibited legally from distributing profits, or are structured in order to exclude profit as the main goal* (Borgaza dkk, 2008).

EMES European Research Network telah menjelaskan dua kriteria utama *social enterprise* yaitu dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi, meliputi; (1) *a continuous activity, producing and selling goods and/or services*, (2) *a high degree of autonomy*, (2) *a significant level of economic risk*, dan (4) *A minimum amount of paid work*. Dimensi sosial, meliputi; (1) *an explicit aim to benefit the community*, (2) *an initiative launched by a group of citizens*, (3) *decision-making power not based on capital ownership*, (4) *a participatory nature, which involves the various parties affected by the activity*, dan (5) *limited profit distribution* (Nyssens, Adam, & Johnson, 2006).

Dalam konteks Indonesia, suatu lembaga/ organisasi dapat dikatakan sebagai wadah *social enterprise* jika memenuhi “kriteria dasar”, antara lain; *social mission/goal, empowerment, etical bussiness principles, social impact, dan sustainability* (Hariyanti, Hati, Wirastuti, & Susanto, 2015). UNDP menjelaskan *social enterprise* dapat mengekspediasi pembangunan di wilayah pedesaan/rural karena terciptanya kerjasama antara negara, masyarakat, dan swasta dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis usaha komersial (barang dan jasa) sekaligus kontribusi terhadap upaya menyelesaikan masalah social. Dengan kegiatan tersebut, *social enterprise* berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi-sosial di wilayah pedesaan, antara lain; menyediakan layanan dasar (kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan) bagi warga desa miskin, mendayagunakan sumber daya lokal desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai aktor, mendorong terciptanya pemerintahan inklusif dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan strategis, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga yang kurang mampu, dan meningkatkan modal sosial di tingkat lokal (Borgaza dkk., 2008).

BUM Desa dapat dikatakan sebagai *social enterprise* karena BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan publik, dan berbagai usaha untuk sebesar-besarnya kesejahteraan sosial masyarakat Desa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Pasal 5 Ayat 1). Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa (Pasal 5 Ayat 3).

BUM Desa dijadikan sebagai lembaga *social enterprise* yang menjalankan bisnis usaha desa untuk pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi dari keuntungan bisnis usaha yang dihasilkan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah pedesaan. BUM Desa difungsikan sebagai penggerak perekonomian di pedesaan (Sidik & Nasution, 2018). Prabowo telah menunjukkan bahwa unit usaha keuangan mikro yang dikelola BUM Desa dapat membantu keluarga miskin (Prabowo, 2014). Di Desa Pekraman (Kota Denpasar), BUM Desa dan pedagang di Pasar Desa saling menguntungkan dan menguatkan dalam menjalankan bisnis simpan pinjam (Wiagustini, 2015). BUM Desa dapat menjalankan bisnis usaha simpan-pinjam berbasis modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Purwakerti (Kabupaten Karangasem) (Suastika, 2017). Di Desa Bleberan (Kabupaten Gunungkidul), BUM Desa

sebagai lembaga sosial-ekonomi di pedesaan sebagai wadah modal sosial untuk kolektivitas kelompok usaha (Sidik, 2015), meskipun secara internal kelembagaan BUM Desa terjadi konflik dalam pengelolaan pendapatan berbagai usaha desa (Sidik, Raharjo, & Parwoto, 2018) karena terjadi inefisiensi dalam realisasi pendapatan yang diperoleh dari usaha desa wisata (Sidik, 2017).

Sementara itu, kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam kebijakan tersebut, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pasal 1 Ayat 2). Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan

6. Meningkatkan kualitas manajemen dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (pasal 3).

Lembaga sosial ekonomi (BUM Desa) dapat difungsikan sebagai instrumen untuk melakukan kegiatan pemberdayaan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas di desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. BUM Desa menjadi wadah kolektivitas usaha bersama warga desa yang mensinergikan berbagai potensi lokal desa dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan mengatasi permasalahan sosial di desa/kelurahan. Pemberdayaan sosial dilakukan pemerintah desa sebagai upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga desa yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 10).

Dalam menjalankan fungsinya, BUM Desa menjadi wadah produktif warga desa bersama dengan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Buktinya, BUM Desa telah mampu menunjukkan manfaat ekonomi-sosial secara langsung dan tidak langsung di Desa Tamansari, Kabupaten Banyuwangi (Setyobakti, 2017). Dalam menjalankan berbagai jenis usaha, BUM Desa mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa di Desa Cagak (Kabupaten Subang), (Sumaryadi & Saputra, 2017). Tidak hanya secara sosial dan ekonomi, BUM Desa juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa dari berbagai usaha bisnis yang dijalankan di Desa Rawang Pasar V dan Air Joman Baru (Sumatera Utara), (Suriadi, Rudjiman, Mahalli, Achmad, & Muda, 2015), dan Desa Ketindan, Wonorejo, dan Gondowangi di Malang (Hardijono, Maryunani, Yustika, & Ananda, 2014).

Di bawah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUM Desa dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan usaha desa wisata alam dengan Dana Desa (Viva, 2016). Dari tahun 2015-2019, Dana Desa diberikan kepada 74.958 oleh Pemerintah Pusat dengan rata-rata sebesar Rp 1 Milyar setiap desa (Kementerian Keuangan, 2018). Kementerian Desa mendorong agar Dana Desa dimanfaatkan untuk mendirikan dan mengembangkan BUM Desa sebagai upaya akselerasi dalam mereduksi kemiskinan desa (Kompas, 2015). Sebab, Kementerian Desa mencatat jumlah desa tertinggal mencapai 40-45 persen dari total 74.958 desa (Kompas, 2017a).

Hanya dalam kurun waktu dua tahun berjalan, BUM Desa meningkat signifikan, yaitu dari 1.022 unit pada tahun 2014 menjadi 21.811 unit pada tahun 2017 (Kompas, 2017b; The Jakarta Post, 2017a). BUM Desa menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat dan berkomitmen membentuk 40.000 unit BUM Desa (Kompas, 2015). Namun, masalah utama yang dihadapi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak BUM Desa (sekitar 65 persen dari jumlah total 12.848 unit pada tahun 2016 yang telah berdiri) belum mampu aktif-produktif, normatif, dan formalitas (Yulianto, 2017). Dilatarbelakangi permasalahan serius ini, penelitian kemudian dilakukan pada BUM Desa di Desa Ponggok.

BUM Desa di Desa Ponggok dijadikan sebagai lokasi penelitian karena menjadi desa percontohan nasional (Kompas, 2016; The Jakarta Post, 2017b) dalam pemberdayaan masyarakat menurut Pemerintah Pusat (Tempo, 2017). Banyak peneliti terdahulu mencermati BUM Desa Ponggok dari berbagai aspek dan sudut pandang. Para peneliti terdahulu tersebut mencermati aspek kajian, sebagai berikut: (1) BUM Desa secara konseptual dapat disebut sebagai *hybrid institutions* dalam mengelola

unit usaha berupa umbul ponggok (sumber daya milik bersama) untuk pemberdayaan masyarakat desa (Sidik, Abisano, & Herawati, 2018), (2) strategi pengembangan BUM Desa dalam mengelola unit usaha wisata pemandian umbul ponggok (Danaresa & Herawati, 2018), (3) strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi BUM Desa (Nursetiawan, 2018), strategi BUM Desa dalam mengelola objek wisata umbul ponggok (Apriyani, 2016), partisipasi pemuda dalam mengembangkan unit usaha BUM Desa (Kasila & Kolopaking, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, tim peneliti mencoba mencermati aspek kemitraan antara BUM Desa dengan kelompok perempuan (PKK) dalam mengembangkan produk pangan lokal khas desa dan unit usaha desa wisata pemandian umbul ponggok. Berdasarkan literatur review di atas, tim peneliti mencermati aspek tersebut untuk mengisi *gap* dan menjadikannya sebagai *State of The Art* (kebaruan) dari hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini sangat penting dilakukan di Desa Ponggok sebagai salah satu desa terbaik dan percontohan nasional karena mendapat kritik yang mendasar terhadap tujuan idealnya (Sidik, Nasution, & Herawati, 2018), sehingga perlu dilakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap aspek yang diteliti disini untuk mengungkap dinamika yang terjadi di lapangan.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu; bagaimana pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) berbasis Badan Usaha Milik Desa sebagai *social enterprise* di Desa Ponggok dilakukan? dan apa kendala yang dihadapi BUM Desa Ponggok sebagai lembaga *social enterprise* dalam pemberdayaan sosial kepada kelompok perempuan (PKK)?

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pelaksanaan strategi kemitraan antara

kelompok perempuan (PKK) dan Badan Usaha Milik Desa sebagai *social enterprise* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat diketahui proses- mekanisme kerja dan kendala yang dihadapi.

Kontribusi hasil penelitian ini, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembelajaran dan arah perbaikan bagi BUM Desa-BUM Desa di seluruh Indonesia agar mampu aktif-produktif dalam pemberdayaan masyarakat desa, terutama pada aspek pemberdayaan sosial bagi kelompok-kelompok perempuan (PKK) guna mendorong mewujudkan ketahanan sosial bagi mereka yang rentan/miskin di pedesaan agar mampu hidup lebih layak/sejahtera.

Ketahanan sosial yang dimaksud disini adalah suatu kondisi kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik yang telah mengelilinginya. Suatu komunitas memiliki tingkat ketahanan sosial bila: pertama, mampu melindungi secara efektif anggotanya, termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang pengaruh atas perubahan sosial yang telah terjadi. Kedua, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan. Ketiga, mampu mengembangkan mekanisme kerja yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan (Syawie, 2007). Ketahanan sosial semacam ini dapat diwujudkan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya potensi lokal dan aset lokal untuk pemberdayaan masyarakat desa (Muchtar, 2012) menggunakan organisasi sosial lokal yang terlembaga sebagai wadah kerjasama warga untuk pembangunan kesejahteraan sosial (Sitepu, 2017), dalam konteks ini: BUM Desa.

METODE

Tim peneliti secara mendalam mengeksplorasi pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) dalam mengembangkan

produk pangan lokal khas desa melalui badan usaha milik desa sebagai wadah *social enterprise* di Desa Ponggok. Desa Ponggok dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan akademis bahwa BUM Desa yang ada merupakan salah satu percontohan nasional dalam pemberdayaan masyarakat menurut Pemerintah Pusat. Dalam proses penelitian, tim peneliti menggunakan penelitian kualitatif (Moleong, 2002) dengan metode studi kasus (Yin, 2012) karena dirasa relevan dan tepat untuk mengeksplorasi masalah lebih terperinci, mendalam, dan kontekstual (Bungin, 2006) sesuai dengan fokus masalah yang diteliti.

Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Observasi dilakukan pada desa wisata Umbul Ponggok, home industri, dan tempat pemasaran produk. Wawancara dilakukan dengan stakeholder yang terlibat aktif dalam pemberdayaan perempuan; Perangkat Desa, BPD, Pengurus BUM Desa, Karyawan BUM Desa, Para Pedagang Umbul Ponggok, dan Kelompok Perempuan (PKK). Data sekunder yang digunakan meliputi: jurnal publikasi, peraturan perundang-undangan (UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Permendes No 4 tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang BUM Desa, Peraturan Desa Ponggok tentang BUM Desa Tirta Mandiri, AD/ART BUM Desa Tirta Mandiri, RPJMDes, dan Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Tirta Mandiri (2014-2016), dan monografi Desa Ponggok. Penelitian dilakukan mulai Februari-Juni 2019.

Data primer dan sekunder yang diperoleh diatas kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif menurut (Miles & Huberman, 1994) dengan tiga tahapan, yaitu; *data reduction*, *data display*, dan *conclusion/kesimpulan*. Setelah data tersebut dianalisis, uji keabsahan data dilakukan menggunakan teknik

triangulasi (Moleong, 2002) dengan mengecek kembali antara hasil analisis data primer dan sekunder agar saling mendukung-menguatkan satu dengan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Desa dan BUM Desa di Desa Ponggok

Pemerintah Desa Ponggok membentuk BUM Desa sejak tahun 2009. Pemerintah Desa Ponggok bersama BPD dan melibatkan unsur tokoh masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa telah sepakat mendirikan BUM Desa dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2009 dengan nama BUM Desa Tirta Mandiri untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset desa. Tepatnya 15 Desember 2009, BUM Desa Tirta Mandiri resmi mengelola usaha Pelayanan Air Bersih (PAB) dan Keuangan Mikro (Simpan-Pinjam).

Pada tahun 2009, pembentukan BUM Desa didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan UU No 8 tahun 2005, pada BAB VII bagian kelima mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Tindaklanjut dari peraturan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Setelah PP No 72 tahun 2005 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Klaten kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang BUM Desa untuk dijadikan pedoman bagi desa-desa di wilayah Klaten, salah satunya Pemerintah Desa Ponggok.

Pada tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, BUM Desa Tirta

Mandiri kemudian menyesuaikan dasar hukum yang diberlakukan, yaitu Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa. Ketika masyarakat Indonesia ramai membicarakan pembentukan atau mengembangkan BUM Desa dengan Dana Desa, Pemerintah Desa Ponggok melakukan komunikasi untuk menegosiasikan dengan kelompok sadar wisata yang mengelola pemandian umbul ponggok agar dikelola di bawah manajemen BUM Desa.

Desa Ponggok merupakan salah satu desa di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas desa; sebelah Utara (Ds. Cokro, Kecamatan Tulung), sebelah Timur (Ds. Nganjat, Kecamatan Polanharjo), sebelah Selatan (Ds. Njeblog, Kecamatan Karanganom), dan sebelah Barat (Ds. Dalangan, Kecamatan Tulung). Desa Ponggok memiliki luas mencapai 77,2255 Ha, yang terbagi menjadi 4 (empat) pedukuhan (dusun) dan terbagi menjadi 6 RW dan RT, yaitu Pedukuhan Ponggok, Jeblogan, Kiringan, dan Umbulsari. Secara administrasi wilayah, Umbul Ponggok berada di Desa Ponggok namun bukan aset milik Desa Ponggok, sebab umbul ponggok adalah sumber mata air yang fungsi utamanya untuk irigasi pertanian di bawah Kementerian PU Pusat. BUM Desa Tirta Mandiri saat ini mengelola unit usaha pemandian umbul Ponggok, umbul ciblon, toko desa, penyewaan kios, penyewaan kolam ikan, dan pelayanan air bersih (PAB). Dari unit-unit usaha yang dijalankan, unit usaha pemandian umbul ponggok merupakan penghasil pendapatan paling besar yang diperoleh BUM Desa.

Desa Ponggok secara geografis memiliki lokasi strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena berada di posisi segitiga emas JOGLOSEMAR (Jogja-Solo-Semarang). Desa Ponggok mengambil keuntungan dari Solo sebagai kota Vokasi dan Jogja sebagai kota

pelajar dan budaya, sebagai pusat pendidikan dan tujuan wisatawan. Dengan potensi desa yang dimiliki, Desa Ponggok mengembangkan potensi unggulan desa di sektor pertanian, perikanan, budaya dan sumber daya milik bersama berupa sumber mata air (meliputi; Ponggok, Kajen, Besuki, Sigedang, dan Kapilaler) sebagai destinasi desa wisata.

Pemerintah Desa dan BUM Desa mampu mengembangkan Umbul Ponggok menjadi destinasi desa wisata yang menyajikan berbagai keunikan, seperti; *snorkling*, berfoto dalam air bersama ikan-ikan maupun dengan perlengkapan unik (seperti; sepeda motor, sepeda, televisi) dan terdapat wahana ninja warior yang menjadi daya tarik para pengunjung/wisatawan. BUM Desa Ponggok kemudian menjadi viral dan dikenal secara nasional serta mendapat apresiasi sebagai salah satu BUM Desa terbaik dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa) karena menghasilkan milyaran rupiah dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban BUM Desa dari tahun 2013 hingga tahun 2016, BUM Desa Tirta Mandiri memiliki pendapatan Rp 211,267,700,00 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, setelah mengelola umbul ponggok, BUM Desa Tirta Mandiri telah mampu meningkatkan pendapatan dalam setiap tahunnya, yaitu Rp 1,153,075,730,00 pada tahun 2014, meningkat lagi menjadi Rp 5,181,507,251,00 pada tahun 2015, dan naik dua kali lipat pada tahun 2016 menjadi Rp 10,300,000,000,00.

Ketentuan BUM Desa Ponggok Menjalankan Bisnis Usaha Desa

Kebijakan UU No 6/2014 tentang Desa telah mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memprioritaskan BUM Desa dalam

pengelolaan sumber daya alam di Desa (Pasal 90 huruf c). BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 87 Ayat 1, tambahan dalam penjelasan).

Spesifik, Permendesa No 4/2015 tentang BUM Desa sebagaimana tindak lanjut UU No 6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa (Pasal 2). Kegiatan ekonomi yang dijalankan BUM Desa antara lain; pemanfaatan sumber daya lokal (Pasal 19), bisnis penyewaan (renting) barang (Pasal 20), usaha perantara (brokering) (Pasal 21), usaha bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) (Pasal 22), bisnis keuangan (financial business) (Pasal 23), usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan (Pasal 24). Pada konteks ini, BUM Desa menjalankan fungsi usaha bersama dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (desa wisata alam) antara individu, kelompok, dan pemerintah desa (negara) untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Pasal 5 Ayat 1). Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa, meliputi: pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; organisasi pengelola BUM Desa; modal usaha BUM Desa; dan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa (Pasal 5 Ayat 2). Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa (Pasal 5 Ayat 3). Secara struktur, organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa (Pasal 9). Kepengurusan organisasi yang mengelola BUM Desa merupakan warga desa setempat.

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis (Pasal 2), salah satunya yakni pembentukan BUM Desa (Pasal 2 huruf e). Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa (Pasal 5 Ayat 1). Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat (Pasal 5 ayat 1). Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, diantaranya; mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa (Pasal 3 Ayat 3 huruf a), dan melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan pengambilan keputusan perihal kebijakan publik (Pasal 3 Ayat 3 huruf e).

Dalam ketentuan ideal peraturannya, mekanisme kerja aturan yang diberlakukan untuk semua sektor unit usaha sebagai akumulasi hasil pendapatan yang diperoleh

BUM Desa Tirta Mandiri berdasarkan AD/ART yang ditetapkan Pemerintah Desa Ponggok. Pembagian hasil usaha berdasarkan AD/ART yang telah ditetapkan, yaitu (1) hasil usaha dari pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto (bersih) dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. (2) pembagian hasil usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban dengan realisasi sebagai berikut; (a) Disetor ke APBDes sebesar 30%, (b) Pemupukan Modal BUM Desa sebesar 25%, (c) Insentif Komisaris, Dewan Komisaris, dan Pengurus 15%, (d) Cadangan modal sebesar 10%, (e) Dana pendidikan dan pelatihan pengelolaan sebesar 10%, dan (f) Insentif Badan pengawas sebesar 10 %, (3) insentif diberikan kepada karyawan sebesar 1 % dari nilai pendapatan kotor dan menjadi biaya insentif dikeluarkan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan Kelompok Perempuan Berbasis BUM Desa di Desa Ponggok

Pemerintah Desa Ponggok membuka akses untuk pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) melalui kemitraan untuk menjalankan bisnis usaha kecil mikro lokal khas desa di area umbul ponggok. Atas prakarsa Pemerintah Desa setempat, BUM Desa bermitra dengan kelompok perempuan (PKK) mengembangkan Usaha Kecil Mikro berupa makanan ringan olahan berbahan ikan nila untuk dijual kepada para pengunjung. Produk makanan ringan olahan berbahan ikan nila yang dihasilkan oleh kelompok perempuan (PKK) dimasukan pada tiket masuk pemandian Umbul Ponggok (Wawancara dengan IFSR, April 2019).

Desa Ponggok terbagi menjadi 4 (empat) pedukuhan (dusun) dan terbagi menjadi 6 RW dan RT, yaitu Pedukuhan Ponggok,

Jeblogan, Kiringan, dan Umbulsari. Kelompok Perempuan yang aktif dan produktif dalam produksi makanan ringan hanya 4 kelompok dan 2 kelompok tidak aktif (Wawancara dengan IFRN, April 2019). Produk makanan lokal khas desa yang dikembangkan Kelompok Perempuan, antara lain: pangsit, prastel, dan stik ikan nila. Produk makanan khas desa ini dijual menjadi satu paket dengan tiket masuk umbul ponggok dengan harga satuan per snack Rp 3.000,00. (Wawancara dengan IFRT, April 2019).

Masing-masing Kelompok Perempuan menyetor hasil olahan produk makanan yang dihasilkan kepada PPK Induk (Pusat) untuk dikepak dan dipasarkan untuk dijual di tempat tiket di umbul ponggok (Wawancara dengan IFRN, April 2019). PPK induk ini menghargai setiap kilo hasil produk makanan yang disetor dengan harga Rp 55.000,00 dan menjual satu bungkusnya Rp 3.000,00 setelah dikepak dan dijual di pintu masuk (tiket) umbul ponggok (Wawancara dengan IFRT, April 2019). Tahun 2017, penjualan hasil produk makanan olahan lokal khas Desa Ponggok ini diperkirakan pernah mencapai Rp 1 Miliar dengan melihat jumlah pengunjung yang masuk ke objek wisata Umbul ponggok (Wawancara dengan IFKR, April 2019).

“Kemitraan” Antara Kelompok Perempuan (PKK) dan BUM Desa di Desa Ponggok

Ketentuan ideal peraturan Pemerintah Desa Ponggok bahwa mekanisme kerja aturan yang diberlakukan untuk semua sektor unit usaha sebagai akumulasi hasil pendapatan yang diperoleh BUM Desa Tirta Mandiri berdasarkan AD/ART yang ditetapkan Pemerintah Desa Ponggok. Pembagian hasil usaha berdasarkan AD/ART yang telah ditetapkan, yaitu (1) hasil usaha dari pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri

ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto (bersih) dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, (2) pembagian hasil usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban dengan realisasi sebagai berikut; (a) Disetor ke APBDes sebesar 30%, (b) Pemupukan Modal BUM Desa sebesar 25%, (c) Insentif Komisaris, Dewan Komisaris, dan Pengurus sebesar 15%, (d) Cadangan modal 10%, (e) Dana pendidikan dan pelatihan pengurusan sebesar 10%, dan (f) **Insentif** Badan pengawas sebesar 10 %, (3) insentif diberikan kepada karyawan sebesar 1 % dari nilai pendapatan kotor dan menjadi biaya insentif dikeluarkan pada tahun berikutnya.

Dalam prakteknya, keuntungan yang besar dari hasil usaha kemitraan antara BUM Desa dengan kelompok perempuan di umbul ponggok belum sama sekali memberikan kontribusi yang signifikan (pembagian pendapatan hasil usaha yang diperoleh) kepada BUM Desa (Wawancara dengan IFKR, April 2019). Situasi dan kondisi seperti ini, BUM Desa secara kelembagaan tidak diuntungkan sama sekali dalam bermitra karena tidak mendapatkan kontribusi tambahan bagi pendapatan BUM Desa dan secara khusus terhadap SHU yang akan disetor ke PADes (Wawancara dengan IFSR, April 2019). Tidak hanya itu, hasil keuntungan usaha kecil produk lokal khas desa yang dilakukan oleh kelompok perempuan bermitra dengan BUM Desa lebih cenderung didominasi oleh PPK induk (pusat) dari pada kelompok-kelompok perempuan yang dibina di tingkat paling bawah yang dilokasikan di dukuh. PPK induk mengontrol pembelian dan penjualan hasil produk olahan makanan mereka, sehingga kelompok perempuan paling bawah tidak secara langsung bisa mengemas dan mendistribusikan sendiri untuk dipasarkan di tempat desa wisata pemandian Umbul Ponggok (Wawancara dengan IFYN, April 2019).

KESIMPULAN

Pemberdayaan Kelompok Perempuan (PKK) berbasis BUM Desa dalam mengembangkan produk lokal khas desa dan desa wisata di Desa Ponggok belum menempatkan peran dan fungsi secara kelembagaan BUM Desa sebagai *social enterprise*. Pemberdayaan kelompok perempuan berbasis BUM Desa yang telah diterapkan dalam “kemitraan” dapat dikatakan hanya sebatas “tempat pemasaran-lapak” produk olahan khas desa ponggok yang secara otomatis diikuti langsung pada tiket masuk objek wisata umbul ponggok. Artinya, pendapatan hasil usaha yang diperoleh kelompok perempuan sebanding lurus dengan jumlah para pengunjung yang datang ke objek wisata umbul ponggok.

Faktanya, besarnya keuntungan dari hasil usaha yang telah diperoleh kelompok perempuan ternyata belum memberikan kontribusi (bagi hasil pendapatan) kepada BUM Desa. Padahal, sesuai aturan Perdes yang ditetapkan, BUM Desa memiliki tanggungjawab kepada Pemerintah Desa untuk memberikan kontribusi terhadap PADes sebesar 30% dari SHU yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Situasi dan kondisi seperti ini menjadi kendala serius dalam akselerasi kesejahteraan kelompok perempuan rentan lainnya, sebab masih banyak perempuan-perempuan (terutama keluarga rentan/miskin) yang belum dilibatkan dalam mengembangkan produk lokal khas desa yang perlu difasilitasi, dibina, dan diberdayakan secara sosial agar berdaya dan mampu menadiri, sehingga lebih sejahtera dan bisa hidup lebih layak.

SARAN

Pemerintah Desa Ponggok bersama BPD perlu membuat aturan formal bagi hasil

(prosentase) kerjasama (kemitraan) antara BUM Desa dan PKK dalam menjalankan bisnis usaha secara kelembagaan. Dengan adanya aturan kerjasama dalam bermitra, BUM Desa dapat difungsikan sebagai *social enterprise* dalam memberikan tambahan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa yang lebih luas, sehingga dapat mendorong optimalisasi pelayanan dasar yang diselenggarakan (beasiswa pendidikan, BPJS kesehatann, Bantuan Bagi Warga Jompo) sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial warga desa. Ketentuan aturan ini dapat berupa Peraturan Desa (Perdes) sebagai kebijakan yang mengikat dalam pelaksanaan kemitraan antara BUM Desa dan Kelompok Perempuan (PKK).

Setelah Perdes kemitraan ini dibentuk, pemberdayaan kelompok perempuan dilakukan dari akar rumput (bawah), sehingga peran PKK Pusat (Induk) difungsikan sebagai pembina dan fasilitator. Dengan demikian, tindakan kongkret pemberdayaan kelompok-kelompok perempuan harus berpusat pada akar rumput (dari bawah) berbasis BUM Desa akan secara langsung dapat mengakselerasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya dapat menjadi ujung tombak pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga-keluarga miskin yang ada dari pada berpusat pada PKK Induk yang didominasi oleh keluarga-keluarga yang berekonomi mampu dan memiliki kedudukan sosial di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kemenristekdikti atas Dana Hibah Peneliti Dosen Pemula (PDP) Tahun 2019 yang diberikan, sehingga penelitian ini terlaksana dan dipertanggungjawabkan dengan hasil publikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, S. A. (2016). Strategi badan usaha milik desa tirta mandiri dalam pengelolaan objek wisata umbul ponggok di kecamatan polanharjo kabupaten klaten. *Adinegara*, 5(8).
- Borgaza, C., Galera, G., & Nogales, R. (2008). *Social enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation: an examination of the concept and practice in Europe and the Commonwealth of Independent States*. Bratislava, Slovak Republic: UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States.
- Bungin, B. (2006). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danaresa, W., & Herawati, N. R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Ponggok Desa Ponggok Kabupaten Klaten Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(1), 191–120.
- Eversole, R., Barraket, J., & Luke, B. (2014). Social enterprises in rural community development. *Community Development Journal*, 49(2), 245–261. <https://doi.org/10.1093/cdj/bst030>
- Hardijono, R., Maryunani, M., Yustika, A. E., & Ananda, C. F. (2014). Economic Independence Of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3(2), 21–30. <https://doi.org/10.9790/5933-03232130>
- Hariyanti, M., Hati, H., Wirastuti, A., & Susanto, K. (2015). *Berani Jadi Wirausaha Sosial? Membangun Solusi atas Permasalahan Sosial Secara Mandiri dan Berkelanjutan*. Diambil dari <https://www.dbs.com/iwov-resources/pdf/indonesia/social-good/Berani-jadi-SE-24Jun2015-final.pdf>
- Kasila, M., & Kolopaking, L. M. (2018). Participation of Rural Youth in Business Development of BUMDes “Tirta Mandiri.” *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.43-58>
- Kementerian Keuangan. (2018). Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2018. Diambil dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>
- Kementerian Pariwisata. (2014). PNPM Mandiri Pariwisata. Diambil dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=21&id=2504>
- Kompas. (2015). Kementerian Desa Targetkan 40.000 BUMDes Dibentuk Tahun Ini. *Kompas.com*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/03565271/Kementerian.Des.Targetkan.40.000.BUMDes.Dibentuk.Tahun.Ini>
- Kompas. (2016). Contohlah Desa Ponggok, Setahun Hasilkan Rp 6,5 Miliar. *Kompas.com*. Diambil dari <https://regional.kompas.com/read/2016/09/27/06320091/contohlah.desa.ponggok.setahun.hasilkan.rp.6.5.miliar>
- Kompas. (2017a). Dana Rp 1,1 Miliar Untuk Desa Tertinggal Dianggap

- Kurang. *Kompas.com*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/15251321/dana.rp.1.1.miliar.untuk.desa.tertinggal.dianggap.kurang>
- Kompas. (2017b). Jumlah BUMDes Mencapai 18.446 Unit. *Kompas.com*. Diambil dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.bumdes.mencapai.18.446.unit>
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *An Expedited Sourcebook: Qualitative Data Analysis* (Second Edition). USA: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, M. (2012). Pengembangan Masyarakat Dengan Memanfaatkan Aset Lokal: Studi Deskriptif di Desa Mlatirejo & Desa Sendangmulyo Yang Berbatasan Dengan Hutan Jati. *Sosio Konsepsia*, 17(1), 101–115.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDesa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 10.
- Nyssens, M., Adam, S., & Johnson, T. (2006). *Social enterprise: At the crossroads of market, public policies and civil society*. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Prabowo, T. H. E. (2014). Developing Bumdes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia. *World Applied Sciences Journal* 30 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice), 19–26. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.4>
- Setyobakti, M. H. (2017). Identification of Business Enterprises Bumdes Based on Social and Economic Aspect. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)*, 14(2), 10.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sidik, F. (2017). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Unit Usaha, Pendapatan, dan Inefisiensi. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5(3). <https://doi.org/10.31957/jeb.v5i3.498>
- Sidik, F., Abisano, F., & Herawati. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Untuk Memberdayakan Masyarakat Dengan Pendekatan “Hybrid Institutions.” *Jurnal Sosio Konsepsia*, 8(01), 26. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1503>
- Sidik, F., & Nasution, F. G. A. (2018). *Village-Owned Enterprise (BUM Desa) As Economic Driver In Villages (A Case Study of Bumdes Sejahtera In Bleberan Village, Playen District, Gunungkidul Regency*. 8. Diambil dari http://scientific-journals.net/Journal/EKBIS/SEAMOLEC_AIC_1_79_BUSINESS_2016.pdf
- Sidik, F., Nasution, F. G. A., & Herawati, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggunakan Badan Usaha Milik Desa: Desa Pongkok dan Kritik Terhadap Prestasi “Terbaik Nasional.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(2),

80–107. <https://doi.org/10.22146/jps.v5i2.44636>

- Sidik, F., Raharjo, T. P., & Parwoto, P. (2018). Pengelola Unit Usaha Vs Pengurus BUM Desa: Studi Kasus Pengelolaan Potensi Desa Wisata di Desa Bleberan Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 2(2). Diambil dari <http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JPP/article/view/764>
- Sitepu, A. (2017). Organisasi Sosial Lokal: Profil, Peran dan Rekomendasi untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Konsepsia*, 11(2), 11–23.
- Suastika, I. N. (2017). Village Enterprises (A Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital at The Purwakerti Village Community). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 12(4), 4.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N., & Saputra, R. (2017). The Role of The Village Business Agency As Creative Economic Implementation In Order of Community Empowerment of Villages of Cagak Road Subang District West Java Province. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 58(1), 14.
- Suriadi, A., Rudjiman, Mahalli, K., Achmad, N., & Muda, I. (2015). The Applicative Model of The Village_Owned Enterprises (BUMDes) Development In North Sumatera. *European Centre for Research Training and Development UK*, 3(12), 48–62.
- Syawie, M. (2007). Peran Kelompok Sosial dalam Penguatan Ketahanan Sosial (Sebuah Kajian Modal Sosial di Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali). *Sosio Konsepsia*, 12(1), 45–51.
- Tempo. (2017). Ponggok Jadi Desa Wisata Terbaik, Ratusan Warganya Jadi Investor—Nasional Tempo.co.html. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/876100/pongkok-jadi-desa-wisata-terbaik-ratusan-warganya-jadi-investor>.
- The Jakarta Post. (2017a). *Govt announces progress in human development, cultural affairs*. Diambil dari <http://www.thejakartapost.com/adv/2017/10/27/govt-announces-progress-in-human-development-cultural-affairs.html>.
- The Jakarta Post. (2017b). *Ponggok: Example of independent village financially*. Diambil dari <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/24/pongkok-example-of-independent-village-financially.html>.
- Viva. (2016). Desa Wisata Tak Lagi Jadi Fokus Kementerian Pariwisata. *Viva.co.id*. Diambil dari <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/757120-desa-wisata-tak-lagi-jadi-fokus-kementerian-pariwisata>.
- Wiagustini, N. L. P. (2015). Partnership Strategy of Village Owned Enterprises (Village Credit Institutions and Village Markets) In Denpasar City, Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, III(4), 1–20.
- Yin, R. K. (2012). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yulianto, T. (2017). BUMDes dan Ekonomi Kreatif. *Kompas*, hlm. 6.

**PERANAN PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT SEBAGAI AGEN
PERUBAHAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL:
KASUS KOTA BANJARMASIN**

***ROLE OF COMMUNITY SOCIAL EXTENSION WORKERS AS AGENT OF CHANGE
IN DEVELOPMENT LOCAL COMMUNITIES: CASE BANJARMASIN CITY***

Sugiyanto dan Suradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika. 200 Cawang III Jakarta Timur
E-mail: sugiyanto222@ymail.com

Diterima: 4 Oktober 2019, Direvisi: 32 Maret 2020; Disetujui: 14 April 2020

Abstrak

Penyuluh sosial masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat lokal. Artikel ini membahas tentang peranan penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat lokal di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu penyuluh sosial masyarakat, penanggung jawab kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin, serta tokoh masyarakat. Data dihimpun dengan wawancara, dan diskusi kelompok terarah. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk naratif, sehingga diperoleh informasi tentang aktivitas penyuluh sosial masyarakat dan peranan mereka sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat lokal. Hasil penelitian, bahwa penyuluh sosial masyarakat telah melaksanakan peranannya sebagai agen perubahan, dan hasilnya sudah dirasakan oleh masyarakat lokal. Namun demikian, peranan yang dilaksanakan belum optimal disebabkan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur peranan mereka, masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengembangan masyarakat, dan terbatasnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar ada regulasi yang secara khusus mengatur tugas mereka, peningkatan kapasitas, serta pemberian dukungan sarana dalam pelaksanaan tugas mereka.

Kata kunci : *penyuluh sosial masyarakat, agen perubahan, pengembangan masyarakat lokal.*

Abstract

Community social volunteers have an important role in the development of local communities. This article discusses the role of social extension workers as agents of change in the development of local communities in the city of Banjarmasin. This research uses descriptive method with qualitative approach. The data sources are the community social instructor, the person in charge of the activities of the South Kalimantan Provincial Social Service and the Banjarmasin City Social Service, and community leaders. Data collected by interview, and focus group discussions. The data that has been collected is processed and analyzed qualitatively in narrative form, so that information is obtained about the activities of community social volunteers and their role as agents of change in the development of local communities. The results of the study, that the social instructor community has carried out their role as agents of change, and the results have been felt by the local community. However, the roles implemented are not optimal due to the absence of regulations that specifically regulate their roles, the lack of knowledge and skills related to community development, and the limited infrastructure that supports the implementation of tasks. Based on the research findings, suggest that there are regulations that specifically regulate their tasks, capacity building, and providing support facilities in carrying out their duties.

Keywords: *community social volunteers, agents of change, local community development.*

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional, mengembangkan paradigma, di mana peran dan posisi lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku utama. Paradigma ini membawa perubahan secara mendasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang ditandai dengan melembaganya kepedulian dan kesetiakawanan sosial di masyarakat. Pada tingkat lokal dapat ditemukan, gerakan-gerakan sosial baik yang diinisiasi oleh perorangan maupun kelompok sebagai bentuk kepedulian sosial (lihat Affandi, 2002; Suhendi, 2013; .Barlan, 2018).

Gerakan-gerakan sosial tersebut kemudian dikenal dengan pilar-pilar sosial yang sifatnya relawan sosial, seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Taruna Siaga Bencana dan Pemuda Pelopor (Suradi, 2019; Aminah & Prasetyo, 2018; Juliantara, 2014; Indarwati, 2014; Kholisah, 2013; Suyanto, 2006). Kemudian tahun 2016, Kementerian Sosial RI memfasilitasi lahirnya penyuluh sosial masyarakat, menambah pilar-pilar sosial yang sudah ada. Penyuluh sosial masyarakat ini wilayah kegiatannya di tingkat lokal (desa/kelurahan) disiapkan menjadi agen perubahan dalam pengembangan masyarakat lokal (Puslitbangkesos, 2018; Republik Indonesia, 2009).

Pada konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyuluh sosial masyarakat ini merupakan salah satu Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 menegaskan bahwa sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri dari 4 pilar, yakni (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial; (2) Pekerja Sosial; (3)

Relawan Sosial; dan (4) Penyuluh Sosial. Sebagai salah satu pilar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, keberadaan penyuluh sosial masyarakat dapat dikatakan masih relatif baru dibandingkan dengan pilar-pilar sosial yang lain (Susantyo, Sugiyanto, Habibullah, Suradi, Irmayani, Nainggolan & Mujiyadi, 2018; Habibullah, Irmayani, Mujiyadi, Suradi, Susantyo, Nainggolan, 2018).

Keberadaan penyuluh sosial masyarakat ini diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial RI No.10 Tahun 2014 Tentang Penyuluhan Sosial. Pada Bagian Kedua Pasal 14 ayat (1) bahwa Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Penyuluh Sosial Fungsional; dan b. Penyuluh Sosial Masyarakat. Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial pusat maupun daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebelum melaksanakan tugasnya, mereka memperoleh pelatihan dasar agar menguasai materi dan metode penyuluhan sosial.

Keberadaan penyuluh sosial masyarakat ini akan menjadi penggerak terjadinya perubahan dan upaya pengembangan masyarakat di tingkat lokal. Dikemukakan oleh Didik (2019), bahwa penyuluh sosial masyarakat memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam rangkaian pembangunan kesejahteraan sosial. Peran dan fungsi tersebut antara lain sebagai motivator, komunikator dan edukator dalam program pembangunan kesejahteraan sosial.

Berbagai peran tersebut menempatkan penyuluh sosial masyarakat sebagai agen

perubahan dalam pengembangan masyarakat di tingkat lokal bersama-sama dengan Karang Taruna dan pilar-pilar sosial lainnya (Suradi, 2019). Agen perubahan menurut Lunenburg (2010), *is anyone who has the skill and power to stimulate, facilitate, and coordinate the change effort*. Lunenburg (2010) berpendapat, bahwa agen perubahan itu bisa individu, kelompok, dan organisasi, yang memiliki keterampilan dan kekuatan untuk menstimulasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kan upaya perubahan. Kemudian menurut Anwar (2013), bahwa penghubung antara sumber ide perubahan dengan target masyarakat yang diharapkan mengadopsi ide atau teknologi yang ditawarkan oleh produser “ide dan teknologi”. Elemen penghubung termaksud disebut sebagai “agen perubahan/*agent of change*”.

Penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan, diharapkan mampu melaksanakan peranan sebagai stimulator, orang yang memberikan rangsangan kepada masyarakat lokal untuk melakukan perubahan; sebagai fasilitator, orang yang memberikan kemudahan atau akses kepada layanan sehingga terjadinya perubahan; koordinator, orang yang mengkoordinasikan berbagai sistem sumber sehingga mengarah pada tujuan yang sama untuk perubahan; dan mediator, orang yang menghubungkan atau memediasi berbagai kepentingan untuk mencapai perubahan.

Peranan yang dilaksanakan oleh penyuluh sosial masyarakat tersebut akan mengantarkan masyarakat lokal mencapai perubahan sebagaimana dikehendaki. Perubahan dalam arti pengembangan masyarakat dimaksud adalah terjadinya proses peningkatan ke arah kondisi kehidupan masyarakat lokal, baik secara sosial maupun ekonomi. Proses peningkatan ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik itu merupakan kata kunci dari

pengembangan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Flora dan Arnold (2012) bahwa pengembangan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan ekosistem, dan keamanan ekonomi bagi semua orang di wilayah geografis.

Pengembangan masyarakat berhasil apabila berbasis pada kebutuhan masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam proses. Sebagaimana dikemukakan oleh Barr (2014), pengembangan masyarakat yang sukses apabila didukung keterampilan dan pengetahuan yang dikembangkan oleh orang-orang dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peran agen perubahan tidak boleh mematikan sikap kritis masyarakat, dan justru mengelola sikap kritis tersebut untuk mencapai perubahan.

Keberhasilan Saemaul Undong di Korea Selatan, patut menjadi *best practice* keberhasilan pengembangan masyarakat lokal. Pertama, bimbingan dan dukungan pemerintah nasional untuk gerakan ini memainkan peran yang sangat penting. Kedua, ada berbagai partisipasi masyarakat dalam proses implementasi. Ketiga, Saemaul Undong dapat membuat sukses besar dengan memelihara kepemimpinan masyarakat yang dipilih oleh penduduk desa itu sendiri. Akhirnya, sebagai gerakan untuk reformasi spiritual, Saemaul Undong mengilhami orang-orang dengan semangat ketekunan, kemandirian, dan kerja sama (Choe, 2005).

Berdasar pengalaman Korea Selatan di atas, pengembangan masyarakat menghendaki penyuluh sosial masyarakat tidak memasuki area atau aktivitas-aktivitas yang dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Karena hakikat pengembangan masyarakat adalah dari, untuk dan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pelaku utama untuk melanjutkan aktivitas bersama guna mencapai perubahan yang dikehendaki.

Penyuluh sosial masyarakat di Banjarmasin berjumlah 30 orang. Tetapi sampai dengan penelitian ini dilaksanakan (2018), tinggal 23 orang yang aktif, dan 7 (tujuh) orang relawan mengundurkan diri dengan berbagai alasan, antara lain karena alasan pekerjaan dan alasan keluarga.

Penyuluh sosial masyarakat hadir di tengah-tengah masyarakat lokal (desa) pada tahun 2016 yang diinisiasi oleh Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI. Oleh karena itu, penelitian yang membahas tentang peranan penyuluh sosial masyarakat ini masih sangat terbatas. Di sisi lain, Pusat Penyuluhan Sosial memerlukan informasi tentang peranan penyuluh sosial masyarakat sebagai dasar pengembangan kebijakannya. Kebutuhan akan informasi inilah yang menjadi alasan bahwa penelitian tentang Peranan Penyuluh Sosial Masyarakat ini perlu dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan peran penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat di Kota Banjarmasin.

Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah. Sebagai responden dalam penelitian ini yaitu penyuluh sosial masyarakat sebanyak 23 orang, penerima manfaat 10 orang. Kemudian, Informan yang terpilih dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, aparat kecamatan dan aparat kelurahan, masing-masing satu orang. Data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk naratif.

Analisis menghasilkan informasi deskripsi empat aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu: aktivitas penyuluhan dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan penyuluhan yang difokuskan pada aspek: (1) pengetahuan masyarakat tentang masalah dan sumber kesejahteraan sosial; (2) Perilaku/gerakan sosial masyarakat untuk menangani PMKS; (3) kohesi/ketahanan sosial masyarakat; dan (4) kelompok swadaya dan jaringan sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin adalah merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Terdiri dari atas 5 kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang. Pada tahun 2017, jumlah kelurahan di Kota Banjarmasin sebanyak 52 kelurahan yang terbagi menjadi 116 Rukun Warga (RW) dan 1.569 Rukun Tetangga (RT).

Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 692.793 jiwa, terdiri penduduk laki-laki berjumlah 347.408 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 345.385 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 98,46 km². Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, maka kepadatan penduduk Kota Banjarmasin mencapai 7.036 penduduk/Km² (BPS Kota Banjarmasin, 2017).

B. Identitas Responden

Ada dua kategori responden dalam penelitian ini, yaitu penyuluh sosial

masyarakat dan warga masyarakat sebagai penerima manfaat penyuluhan sosial.

1. Penyuluh sosial masyarakat

Responden penyuluh sosial masyarakat berjumlah 23 orang relawan. Dilihat dari jenis kelamin laki-laki 11 orang relawan dan perempuan 12 orang relawan, dengan rentang usia antara 23 tahun sampai 54 tahun. Pendidikan rata-rata SLTA berjumlah 18 orang relawan dan S1 berjumlah 5 orang relawan. Mayoritas bekerja dibidang swasta.

2. Penerima manfaat

Responden penerima manfaat, berjumlah 10 orang, seluruhnya perempuan, rata-rata sebagai ibu rumah tangga, dan berumur antara 32 – 48 tahun.

C. Aktivitas Penyuluh Sosial

Penyuluh sosial masyarakat terbentuk pada tahun 2017, dan pada tahun itu pula diberikan bimbingan teknis sebelum melaksanakan aktivitas penyuluhan sosial di masyarakat. Berbekal atribut yang berupa jaket yang bertulisan “Penyuluh Sosial Masyarakat”, mereka bersemangat untuk melakukan aktivitas penyuluhan sosial di masyarakat.

Sebelum melakukan penyuluhan sosial, penyuluh sosial melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyuluhan

Langkah yang perlu ditempuh untuk mengurangi kegagalan dalam kegiatan apapun adalah melakukan perencanaan yang matang. Berdasarkan temuan penelitian, semua penyuluh sosial masyarakat melakukan persiapan penyuluhan sebelum melaksanakan tugas. Sebagaimana dikemukakan oleh penyuluh sosial (IK) : *“Kami membuat rencana kerja sebelum melaksanakan penyuluhan. Misalnya, materi apa yang*

akan disuluhkan ke masyarakat, kapan waktunya dan di mana penyuluhan sosial dilaksanakan. Pada tahap ini kami secara tim membagi tugas, siapa melakukan apa di lokasi nanti”,

Rencana kerja disusun bersama dalam tim kerja, sehingga setiap orang sudah mengetahui tugas masing-masing di lapangan. Rencana kerja yang dibuat oleh penyuluh sosial masyarakat, ada yang sudah dalam bentuk dokumen rencana, tetapi sebagian besar masih dalam lisan. Rencana kerja tertulis masih terbatas pada *hand phone* atau dalam bentuk tulisan tangan. Kelemahan terkait dengan perencanaan ini, tidak ada pengarsipan, sehingga mengandalkan ingat penyuluh sosial.

Pada tahap persiapan, penyuluh sosial masyarakat melakukan koordinasi dengan aparat desa, pilar-pilar sosial dan tokoh masyarakat calon lokasi kegiatan. Hasil dari koordinasi ini penyuluh sosial masyarakat memperoleh dukungan dari aparat setempat (desa/kelurahan), pilar-pilar sosial lain (Karang Taruna, PSM) dan warga masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak ini dinilai banyak membantu atau meringankan tugas penyuluh sosial masyarakat. Dukungan yang diperoleh penyuluh sosial masyarakat dari kegiatan koordinasi ini, seperti ketersediaan sarana prasarana, dan konsumsi.

Manfaat koordinasi ini sebagaimana dikemukakan oleh penyuluh sosial (AM):” *kami mendapat dukungan dan bantuan dari aparat desa, rekan sesama pilar-pilar sosial, tokoh masyarakat dan warga masyarakat. Bantuan dan dukungan mereka cukup besar kontribusinya persiapan penyuluhan sosial”*.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

Untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan sosial, dihimpun informasi yang berkenaan dengan frekuensi penyuluhan, sasaran, lokasi, metode dan kemitraan.

Dilihat dari frekuensinya, sebesar 63,30 persen penyuluh sosial melaksanakan penyuluhan lebih 6 (enam) kali pada 6 (enam) bulan terakhir atau satu kali per bulan. Frekuensi tersebut menggambarkan, bahwa penyuluh sosial telah secara aktif (proaktif) dan memiliki motivasi yang tinggi dalam memberikan penyuluhan sosial. Mengingat untuk pelaksanaan penyuluhan sosial ini, penyuluh sosial belum memperoleh dukungan biaya operasional dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten.

Sebagai sasaran penyuluhan sosial adalah keluarga (47,62%), perorangan (38,10%) dan masyarakat (14,28%). Data tersebut menggambarkan, bahwa penyuluh sosial masyarakat tidak saja melakukan aktivitas pada tingkat makro (*community*), tetapi juga mezzo (*family*) dan micro (*individual*). Pada tingkat micro, ini berarti penyuluh sosial bukan lagi melakukan sosial, tetapi penyuluh sosial masyarakat sudah melakukan kegiatan konseling. Dikemukakan oleh penyuluh sosial masyarakat (AM): *“sasaran penyuluhan sosial meliputi individu, keluarga dan masyarakat. Sejurnya kami belum memiliki keterampilan yang memadai, tetapi kondisi di lapangan menghendaki kami untuk memberikan informasi dan penjelasan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat”*.

Penyuluh sosial sebaiknya menguasai materi utama penyuluhan sosial. Materi penyuluh sosial secara umum adalah program kesejahteraan sosial, motivasi

dan edukasi. Materi tentang program kesejahteraan sosial, merupakan materi utama yang perlu dikuasai oleh penyuluh sosial, sesuai dengan peran dan tugasnya sebagai pilar-pilar sosial. Sebesar 52 persen penyuluh sosial masyarakat menguasai materi utama, terkait dengan program kesejahteraan sosial. Sedangkan materi di luar kesejahteraan sosial, mereka kembangkan sendiri sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini,

Lokasi yang paling sering digunakan untuk kegiatan penyuluhan sosial adalah rumah warga (80 %) dan warung/pasar (45%). Lokasi-lokasi kegiatan penyuluhan sosial tersebut menggambarkan, bahwa penyuluhan sosial lebih banyak/sering berlangsung dalam suasana informal. Dengan suasana informasi, maka terjalin relasi sosial yang lebih akrab dan penuh rasa kekeluargaan. Sebagaimana dikemukakan oleh penyuluh sosial (TB): *“warga masyarakat menerima kehadiran kami sebagai orang yang bisa memberikan pencerahan. Kami bicara secara informal ..ya bincang-bincang ringan gitulah setiap pertemuan dengan suasana yang akrab dan kekeluargaan.”*

Metode yang digunakan oleh semua penyuluh sosial masyarakat adalah ceramah, diskusi atau dialog dan kunjungan ke rumah. Pemilihan metode tersebut disesuaikan dengan kelompok penerima manfaat dan lokasi kegiatan penyuluhan sosial. Meskipun metode-metode tersebut sudah digunakan, tetapi masih ada penyuluh sosial yang belum menguasai metode yang digunakan. Sebagai jalan keluarnya, mereka melakukan penyuluhan sosial secara tim kerja, tidak sendiri-sendiri.

Penyuluh sosial masyarakat sudah menjalin kerja sama atau memperoleh

fasilitasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan tugasnya. Instansi tersebut, yaitu (1) Dinas Pendidikan, dalam kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah terkait isu pergaulan bebas, narkoba, dan HIV/AIDS; (2) Dinas Kesehatan, dalam kegiatan merujuk klien berobat ke Puskesmas; (3) Dinas Pariwisata, sebagai pemicu (daya ungkit) ekonomi warga masyarakat; (4) Bulog, dalam kegiatan operasi pasar (beras murah).

Kemitraan yang sudah dibangun oleh penyuluh sosial masyarakat tersebut menggambarkan, bahwa (1) keberadaan penyuluh sosial telah memperoleh pengakuan dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi Pemerintah Daerah (OPD), (2) cakupan kegiatan penyuluhan menjadi bervariasi dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, dan (3) bahwa keberadaan penyuluh sosial masyarakat bukan hanya untuk kepentingan sektoral Kementerian Sosial, tetapi semua OPD dapat memanfaatkan penyuluh sosial masyarakat untuk kepentingan program mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh penyuluh sosial (IK): *“Instansi pemerintah daerah sudah mulai memberikan kepercayaan kepada kami. Kami beberapa kali dilihatkan pada kegiatan mereka untuk penyuluhan maupun distribusi bantuan”*.

Penyuluh sosial masyarakat sebagai relawan sosial disebut sebagai penolong masyarakat (*community helpers*), apabila dilihat dari aktivitas yang dilakukan mereka dalam upaya perubahan masyarakat. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam upaya pengembangan masyarakat lokal. Dikemukakan oleh Maymut (2019), bahwa *“community helpers are people who live and work in*

our communities...volunteers” Kekuatan penyuluh sosial masyarakat, bahwa mereka adalah orang setempat yang lebih memahami situasi dan kultur masyarakatnya. Hal ini menyebabkan mereka relatif tidak menghadapi resistensi ketika melakukan perubahan.

D. Hasil yang Dicapai

Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari aktivitas penyuluhan sosial, digunakan 4 (empat) aspek, yaitu (1) pengetahuan masyarakat tentang masalah dan sumber kesejahteraan sosial, (2) perilaku/gerakan sosial untuk menangani PMKS, (3) kohesi/ketahanan sosial dan (4) kelompok swadaya dan jaringan sosial. Setiap aspek memiliki kategori rendah, moderate dan tinggi. Ketiga kategori tersebut digunakan untuk menggambarkan kinerja penyuluh sosial masyarakat.

1. Pengetahuan masyarakat tentang masalah dan sumber kesejahteraan sosial

Penerima manfaat (masyarakat) mengalami perubahan pengetahuan mereka tentang masalah dan sumber kesejahteraan sosial. Ini merupakan pengetahuan dasar yang perlu diketahui masyarakat, karena dengan pengetahuan ini masyarakat memiliki landasan untuk melakukan perubahan lebih baik.

Hasil penelitian sebesar 44 persen masyarakat memiliki pengetahuan tentang masalah, potensi dan sumber kategori tinggi, 45 persen kategori moderate dan 11 persen kategori rendah.

Pengetahuan penerima manfaat tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui hasil pelaksanaan

penyuluhan sosial. Hal ini relevan dengan posisi dan eksistensi penyuluh sosial, di mana kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat difasilitasi oleh Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan itu, PMKS dan PSKS adalah kelompok sasaran program kesejahteraan sosial yang perlu ditemukenali oleh masyarakat.

Setelah dilakukan penyuluhan sosial hingga terjadinya peningkatan pengetahuan masyarakat/penerima penyuluhan sosial. Terjadi pergerakan peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan dari rendah ke arah moderate dan tinggi. Berdasarkan data pada diagram 1 (satu), skor tinggi sebesar 44 persen, moderat sebesar 45 persen, dan rendah sebesar 11 persen.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui perubahan pengetahuan penerima manfaat tentang PMKS adalah mereka dapat menyebutkan dan menjelaskan minimal dua PSKS yang ada di lingkungan sekitarnya, meskipun dengan terminologi yang dibangun sendiri. Misalnya, Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM) dengan istilah orang yang suka membantu mengurus surat keterangan miskin.

2. Perilaku/gerakan sosial masyarakat untuk menangani PMKS

Perilaku/gerakan sosial masyarakat untuk menangani PMKS, merupakan salah satu indikator untuk mengukur hasil pelaksanaan penyuluhan sosial. Setelah masyarakat mengetahui PMKS, maka diharapkan mereka melakukan aksi sosial atau gerakan sosial menangani PMKS yang ada di lingkungannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perilaku/gerakan sosial masyarakat untuk menangani PMKS.

Hasil penelitian sebesar 36 persen masyarakat telah melakukan gerak sosial untuk menangani PMKS, 37 persen kategori moderate dan 27 persen kategori rendah. Hal ini berarti, bahwa masyarakat sebagian besar menunjukkan perilaku/gerakan sosial dalam menangani PMKS di lingkungannya. Terjadinya peningkatan perilaku/gerakan sosial penerima manfaat ini menunjukkan, bahwa kinerja penyuluh sosial sudah baik. Data yang menggambarkan perubahan positif pada aspek perilaku/gerakan sosial penerima manfaat, sebagai informasi bahwa penyuluh sosial sudah memberikan hasil dalam pelaksanaan penyuluhan sosial.

3. Kohesi/ketahanan sosial masyarakat

Kohesi sosial menggambarkan kondisi masyarakat yang diliputi kepedulian sosial satu sama lain. Kondisi ini ketika terlembaga akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Penyuluh sosial memiliki peran penting untuk mewujudkan kohesi sosial dan ketahanan sosial masyarakat sebagai unsur dari kesejahteraan.

Hasil penelitian sebesar 47 persen masyarakat memiliki kohesi sosial yang tinggi, 36 persen kategori moderate dan 14 persen kategori rendah. Hal ini menunjukkan, bahwa terjadi peningkatan kohesi/ketahanan sosial masyarakat dalam menangani PMKS yang ada di lingkungannya setelah menerima penyuluhan sosial. Terjadi pergerakan peningkatan perilaku/gerakan sosial yang cukup signifikan dari rendah (14%) ke arah moderate (36%) dan tinggi (47%).

4. Kelompok swadaya dan jaringan sosial masyarakat

Terjadinya peningkatan kelompok sosial masyarakat dan jejaring sosial

dalam peningkatan kesadaran penerima manfaat, terkait dengan: keikutsertaan dalam mengembangkan kelompok swadaya, dukungan terhadap pilar-pilar sosial, dukungan terhadap tersedianya media/tempat informasi sosial masyarakat, ikut/dukungan mengembangkan jejaring sosial dengan sistem sumber, dan ikut/dukungan setiap kegiatan sosial kemasyarakatan tidak bergantung dari luar.

Hasil penelitian sebesar 69 persen masyarakat sudah membangun kelompok swadaya dan jaringan sosial dalam penanganan PMKS, 21 persen kategori moderate dan 10 persen kategori rendah. Hal ini menunjukkan, bahwa terjadi peningkatan kelompok swadaya dan jejaring sosial, yang dapat terlihat dari aktivitas dalam keikutsertaan mengembangkan kelompok swadaya. Selain itu aktivitas masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pilar-pilar sosial, juga cukup meningkat. Begitu pula aktivitas masyarakat pada dukungan tersedianya media/tempat informasi sosial masyarakat juga cukup meningkat.

Komponen yang mengalami perubahan lebih baik pada masyarakat, adalah aspek kognitif (pengetahuan), afektif (kohesi sosial) dan psikomotorik (tindakan dan jaringan sosial). Ketiga komponen tersebut merupakan kunci dalam pengembangan masyarakat lokal. Pengetahuan, perasaan sosial dan tindakan bersama, akan menjadi modal sosial yang besar dalam upaya pengembangan masyarakat lokal (Bhandari & Yasunobu, 2009), yang akan berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat (Delic, Saric & Osmanovic, 2017).

Perubahan yang dicapai oleh masyarakat setelah memperoleh penyuluhan sosial masyarakat, atau sebagai dampak dari

penyuluhan sosial, menegaskan bahwa penyuluh sosial masyarakat merupakan agen perubahan masyarakat Lunenburg, 2010; Anwar, 2013), dan sekaligus sebagai penolong masyarakat (Maymut, 2019). Hal ini memberikan umpan balik bagi Kementerian Sosial maupun instansi sosial di daerah, perlu mengisi desa/kelurahan yang belum ada penyuluh sosial masyarakat.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

a) Semangat kerja penyuluh sosial

Ini berarti bahwa pasca pelatihan, penyuluh sosial masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menyatakan siap untuk bekerja.

b) Dukungan dari dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota.

Dukungan Dinas sosial diberikan secara kekeluargaan dengan memperlakukan mereka sebagai bagian dari penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.

c) Jaket penyuluh membenatu

Manfaat jaket penyuluh terutama terasa pada awal terjun ke masyarakat. Hanya dengan modal ‘jaket’ penyuluh sosial mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial.

d) Aspirasi warga walau hanya sebatas ucapan terimakasih

Walau sangat sederhana, ucapan terimakasih yang disampaikan individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat ternyata sangat bermakna bagi penyuluh sosial. Kehadiran mereka sudah merasa diakui dan dihargai serta mendapatkan dukungan sosial.

- e) Tersedianya sarana pribadi penyuluh berupa sepeda motor

Ketersediaan sepeda motor dan *hand phone* secara pribadi, sebagai peralatan kerja yang sangat membantu pelaksanaan tugas penyuluhan sosial di lapangan. Meskipun tanpa fasilitas dari pemerintah, penyuluh sosial tetap melaksanakan tugas dengan peralatan yang mereka miliki secara pribadi.

2. Faktor Penghambat

- a) Legalitas (belum ada SK atau surat tugas)

Penyuluh sosial masyarakat belum dibekali dengan Surat Keputusan Menteri Sosial dan Surat Tugas untuk melaksanakan penyuluhan. Meskipun sejauh ini tidak terjadi permasalahan serius di lapangan, namun sebagian penyuluh sosial masyarakat merasa was-was karena tidak memiliki SK dan Surat Tugas tersebut. Mereka merasa kurang nyaman dan takut keberadaan mereka dipersoalkan ketika menyelesaikan masalah sosial di masyarakat.

- b) Dana operasional

Meskipun sifatnya relawan, penyuluh sosial masyarakat perlu dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan operasional hal ini dikarenakan kegiatan penyuluhan sosial di masyarakat memerlukan dana operasional yang tidak sedikit, terutama untuk transportasi dan akomodasi.

- c) Belum diperkenalkan ke pihak terkait

Pihak terkait dimaksud adalah pejabat fungsional penyuluh, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat,

dan pilar-pilar pembangunan kesejahteraan sosial lainnya. Persoalan ini menyebabkan ruang gerak penyuluh sosial kurang leluasa dalam bekerja.

- d) Pendidikan relawan penyuluh sosial masyarakat

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan mereka sangat berbeda berdasarkan tingkat pendidikan dan disiplin keilmuannya. Kemampuan penyuluh sosial masyarakat dengan pendidikan sarjana (S1), jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok penyuluh sosial masyarakat dengan pendidikan SLTA. Bahkan dalam beberapa kasus peneliti menemukan kesalahan penyuluh sosial masyarakat berpendidikan SLTA dalam menjelaskan beberapa konsep PMKS.

KESIMPULAN

Penyuluh sosial masyarakat menempati posisi sangat strategis dalam pengembangan masyarakat lokal. Penyuluh sosial masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya perubahan masyarakat lokal. Dan keberadaan mereka sebagai agen perubahan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal. Empat aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu: pengetahuan masyarakat tentang masalah dan sumber kesejahteraan sosial; perilaku/gerakan sosial masyarakat untuk menangani PMKS;; kohesi/ketahanan sosial masyarakat; dan kelompok swadaya dan jaringan sosial masyarakat. Dari keempat aspek tersebut, aspek pertama, kedua dan ketiga menunjukkan kemajuan yang masih rendah (di bawah 50 persen). Sementara untuk aspek keempat kemajuan terjadi pada di atas 50 persen responden.

Disimpulkan bahwa peranan penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat lokal, belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini menghendaki penguatan pada sisi pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan dalam pengembangan masyarakat lokal.

Faktor yang mendukung pelaksanaan peranana penyuluh sosial masyarakat dalam pengembangan masyarakat berasal dari pemerintah setempat, aseptabilitas masyarakat atas kehadiran penyuluh sosial serta kepiawaian penyuluh sosial memanfaatkan media setempat dalam melaksanakan penyuluhan. Adapun sebagai faktor yang menghmbat adalah belum adanya regulasi yang menguatkan keberadaan penyuluh sosial, jumlah penyuluh sosial yang terbatas, tingkat kemampuan masih rendah serta dukungan sarana dan prasarana yang terbatas

SARAN

Untuk itu, secara rinci direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Sosial cq Pusat Penyuluhan Sosial
 - a. Menerbitkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Penyuluh Sosial Masyarakat.
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis tentang Penyuluh Sosial Masyarakat, yang di dalamnya mengatur secara jelas tentang kriteria, pola rekrutmen, tugas dan fungsi, pola pembinaan, dan apresiasi.
 - c. Melaksanakan pembekalan dan atau peningkatan kapasitas penyuluhan sosial, sehingga memiliki keterampilan khusus yang membedakan dengan pilar-pilar sosial yang lain.
 - d. Memberikan perlengkapan pelaksanaan tugas, seperti rompi, topi, jas hujan, lampu senter dan atribut lainnya yang diperlukan.
 - e. Memberikan dana operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Mempersiapkan penyuluh sosial untuk mengikuti pemilihan pilar-pilar sosial teladan nasional.
 - g. Meskipun sifatnya relawan namun relawan penyuluh sosial masyarakat perlu diberikan apresiasi baik melalui tali asih maupun dukungan pendanaan lain untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Kepada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Tugas.
 - b. Memberikan pembinaan (bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan) dengan alokasi dana APBD I atau APBD II.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas penyuluh sosial.
 - d. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen dengan melibatkan Dinas Sosial Provinsi.
 - e. Memberikan fasilitas pelaksanaan tugas penyuluh sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada reviewer yang telah memberikan kritik dan amsukan untuk pernbaikan artikel ini, dan ketua redaksi yang memberikan kesempatan untuk menerbitkan artikel kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi,O, (2002), Tinjauan Antropologi Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan, https://www.researchgate.net/publication/42320268_Tinjauan_Antropologi_Pelibatan_Masyarakat_Lokal_Dalam_Pembangunan_Kehutanan

- Aminah.S & Prasety.I, (2018), Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Organisasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5 (1), 2018,61-73/<http://dx.doi.org/0.21831/jppm.v5i1.17531>.
- Anwar.S, (2013), Agen Perubahan (*Agent of Change*), https://bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/artikel/2013_Agen_Perubahan.pdf, diakses 23 Jan 2019.
- Badan Pusat Statistik (2017). Kota Banjarmasin Dalam Angka. Banjarmasin: Badan Pusat Statistik.
- Barlan,Z,A., (2018), Local Institutional Role Analysis Of Economic Condition Of Multiethnic Rural Community In Bonegunu District North Buton Regency), *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Vol. 2 (2): 147-154, DOI: <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.2.147-154>.
- Barr.A, (2014) Community Development, Scottish Community Developmetn Centre and Community Developmetn Allience Scotland, <https://static1.squarespace.com/static/>, diakses 20 Jan 2019.
- Bhadari.H & Yasunobu.K, (2009), What is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept / *Asian Journal of Social Science*, Volume 37, Number 3, 2009, pp. 480-510.
- Choe, Ch.S, (2005), Key Factors to Successful Community Development: The Korean Experience (Discussion Paper No 39), 2005, 11, <https://core.ac.uk/download/pdf/10843695.pdf>/diakses 28 Septembr 2019.
- Daymut.J.A, (2019), Community Helpers Help Us Learn!/<https://www.handyhandouts.com/viewHandout.aspx?hh>, diakses 1 Oktober 2019.
- Delic.Z, Saric.H & Osmanovic.N, (2017), Significant of Social Capital in Socio-Ekonomic Development of Bosnia and Herzegovina/ *International Business Research*; Vol. 10, No. 3; 2017.
- Didik, R., (2019) Dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Tribun Lampung* Kamis, 5 September 2019.
- Habibullah, Irmayani, Mujiyadi,B, Suradi, Susantyo, Nainggolan, T, (2018). *Efektivitas Kinerja Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Flora.C & Arnold.N. (2012). Community Development, <https://int.serach.myway.com/search/> diakses 25 Jan 2019.
- Indarwati, (2014), Peranan Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia) Di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Juliantara.K, (2014), Peran Pekerja Sosia Masyarakat dalam Membina Masalah Pekerja Seks Komersial di Tangerang Selatan, Sripsi, Program Studi Kesejahteraan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kholisah.A, (2013), Peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Kegiatan Pra Bencana Untuk Kesehatan Mental

- Korban Bencana (Studi Kualitatif Pada Taruna Siaga Bencana (Tagana) Di Kabupaten Jember), URL: <http://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/2534>, diakses tanggal 30 September 2019.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos), (2018), Efektivitas Penyuluhan Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Jakarta.
- Suhendi, A., (2013), *The Role Of Local Community Leaders In Social Welfare Development*, *Informasi* Vol. 18, No. 02, Tahun 2013.
- Suradi, (2019), Karang Taruna, Agen Perubahan dan Pengembangan Masyarakat, *Sosio Konspesia* Vol 09 No 02, Mei-Agustus 2019.
- Susantyo, B., Sugiyanto, Habibullah, Suradi, Irmayani, Nainggolan, T & Mujiyati, B., (2018), *Optimalisasi Peran dan Fungsi Pendamping Sosial*: Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Suyanto, (2006), Profil WKSMB dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat di Yogyakarta, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 10 No 02, hal 59 – 72.

KERENTANAN REMAJA PEREMPUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI BANDUNG

THE VULNERABILITY OF FEMALE ADOLESCENTS AS VICTIMS OF COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION IN BANDUNG

Santy Yanuar Pranawati, Adriana Soekandar Ginanjar, dan Rudolf Woodrow Matindas

Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

E-mail: santy.yanuar@ui.ac.id

Irwanto

Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,

Jakarta, Indonesia

E-mail: irwanto_i@yahoo.com

Diterima: 17 Nopember 2019; Direvisi: 22 April 2020; Disetujui: 24 April 2020

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam mengenai pengalaman hidup pada remaja korban eksploitasi seksual komersial. Di Indonesia kasus ini semakin menunjukkan kompleksitasnya. Remaja menjadi korban tidak hanya karena terjatuh di dalam lingkaran perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, akan tetapi juga terdapat remaja dengan pengalaman hidup yang membuatnya rentan untuk dieksploitasi secara seksual. Penelitian ini akan fokus pada remaja pada kelompok kedua. Disain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Jumlah partisipan keseluruhan adalah 8 remaja perempuan yang berusia 17-24 tahun yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial sejak usia 14-17 tahun. Hasil penelitian menunjukkan terdapat berbagai faktor kerentanan, yaitu pengaruh lingkungan keluarga dan teman sebaya, serta faktor sosial-psikologis perkembangan tahap usia remaja. Selain itu, terdapat kondisi yang memperkuat kerentanan remaja, seperti perilaku seks bebas dan perasaan kehilangan harga diri, serta kebutuhan akan uang. Sedangkan dampak-dampak yang ditimbulkan meliputi dampak fisik, psikologis, dan pendidikan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pekerja sosial khususnya dalam bidang perlindungan anak dan remaja dalam upaya penanganan dan pencegahan remaja untuk menjadi korban eksploitasi seksual.

Kata Kunci: remaja, rentan, pengalaman hidup, eksploitasi seksual komersial, kualitatif.

Abstract

This study was conducted to investigate the life experiences of adolescents who were sexually exploited. These cases show the complexity of the situation in Indonesia. Adolescents are victimized not only because they are subjected to threats or pressure from commercial sexual exploitation groups, but also due to previous life experiences that make them more vulnerable to sexual exploitation. In this study, we focused on the latter. We carried out a case study utilizing in-depth interviews, participant observation and non-participant observation. The participants of this study were eight girls (17 to 24 years old) who had been sexually exploited between the ages of 14 and 17. Our findings suggest that there are several factors that contribute to their vulnerability, such as the influence of family and peers, adolescent development as a socio-psychological factor, premarital sex, the loss of self-esteem, and the need for money. Moreover, this study also exposes the physical, psychological, and educational impacts of being involved in commercial sexual exploitation. An implication of this study would be to provide social workers with essential information, specifically regarding protection of children and adolescents and also to promote early intervention programs for those who are vulnerable to becoming victims of commercial sexual exploitation.

Keywords: adolescent, vulnerable, life experience, commercial sexual exploitation, qualitative

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data korban perdagangan manusia selama 15 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa 70 persen korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak perempuan. Sementara penelitian yang dilakukan di 110 negara menunjukkan bahwa 59 persen dari perdagangan manusia adalah untuk tujuan eksploitasi seksual komersial (UNODC, 2018). Jumlah anak dan remaja sebagai korban eksploitasi seksual komersial di wilayah Asia Tenggara semakin meningkat dari tahun ke tahun (ECPAT International, 2017). Di Indonesia, praktek perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual komersial merupakan kegiatan melanggar hukum, tetapi seperti dicatat Kuo (2000) implementasi hukum belum berhasil menekan angka tindak kriminal ini, bahkan insiden eksploitasi seksual anak mencapai 54 persen dari seluruh jumlah kasus perdagangan manusia (UNODC, 2016).

Kementerian Sosial mencatat bahwa jumlah anak-anak dan orang dewasa dalam pelacuran menunjukkan peningkatan 34 persen dalam 10 tahun, yaitu dari angka 65.059 pada tahun 1994 menjadi 87.536 pada tahun 2004 untuk seluruh Indonesia (ILO, 2004). Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2018 kasus prostitusi pada anak merupakan kasus paling dominan, yaitu mencapai 93 kasus jika dibandingkan dengan kasus lainnya (KPAI, 2019). Oleh karena itu dalam upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi seksual pada anak, Indonesia, sebagaimana halnya negara-negara di kawasan ASEAN, ikut berperan aktif dan berupaya untuk menekan insiden anak yang dilacurkan, khususnya di wilayah wisata. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri di Bali tahun 2004, Presiden Megawati mendeklarasikan zero tolerance bagi wilayah-wilayah wisata seperti Bali, Batam, dan Bandung (Hasan, 2009).

Tidak hanya dalam jumlah korban yang terus meningkat, kompleksitas kasus eksploitasi seksual komersial yang melibatkan anak dan remaja juga semakin meningkat. Jika dilihat dari faktor penyebabnya, selain paksaan atau intimidasi dari pihak lain, juga disebabkan karena tergiur oleh kemudahan memperoleh uang, serta waktu aktivitas yang sangat fleksibel. Kondisi ini pada akhirnya juga menjadi faktor pendorong seseorang untuk menjadi korban eksploitasi seksual komersial (Satyatama, Rimawati, & Shaluhiah, 2010; Vanwesenbeek, 2013).

Remaja sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial

Fenomena keterlibatan remaja dalam eksploitasi seksual komersial bukanlah hal baru (Koentjoro, 1989; Hull, Sulistyaningsih, & Jones, 1998). Dalam sejarah terkini, tercatat bahwa sejak berusia 12 tahun anak sudah menjadi korban eksploitasi seksual komersial dengan beberapa alasan yang berbeda, diantaranya eksploitasi oleh organisasi kriminal, ajakan teman sebaya, dan pemenuhan gaya hidup modern, termasuk adanya fasilitas komunikasi modern (Suprpto & Martujdi, 2013; Cahya, 2015). Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa penyebab seseorang rentan menjadi korban eksploitasi seksual antara lain lingkungan keluarga, pengalaman yang menyakitkan atau rasa kehilangan yang tidak terduga, kekerasan seksual, gaya hidup (Reed, Kennedy, Decker, & Cimino, 2019; Jonsson, Svedin, & Hyden, 2015; Luty, 2010), serta hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental seseorang (Levine, 2017). Kondisi ini menimbulkan adanya perdebatan yang keras terkait dengan “keputusan” seorang perempuan secara khusus yang berusia anak atau remaja, yaitu penjelasan tentang keterlibatan mereka sebagai pekerja seks komersial (Doezema, 2002; Suhardjo & Irwanto, 2018).

Di dalam konteks kehidupan wanita dewasa, adanya tuntutan kebutuhan pribadi atau keluarga serta kekerasan domestik dapat dilihat sebagai faktor utama mengapa perempuan menjadi pekerja seks komersial (Harsanti & Verasari, 2013; Fathonah, 2016) sehingga apabila memutuskan untuk menjadi pekerja seks tetap dianggap sebagai pilihan yang rasional sebagai alternatif sumber penghasilan (Dewey, Germain, & Germain, 2016). Namun di sisi lain, dalam konteks perempuan remaja dan anak, terdapat juga kondisi bahwa mereka terlibat eksploitasi seksual komersial bukan karena ancaman pihak lain sebagai faktor pendorong utama. Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun tidak mempunyai kapasitas yang rasional dalam mengambil keputusan untuk hidup mereka dan berbagai resiko yang mungkin terjadi (UNICEF, n.d.) Oleh karena itu, persoalan “consent” keterlibatan anak dalam industri seks komersial ditolak dan keterlibatan anak dianggap sebagai eksploitasi dan kekerasan. Keputusan mereka terlibat ke dalam eksploitasi seksual komersial juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti kondisi keluarga, teman (pergaulan), keinginan memiliki uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Mereka sesungguhnya mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah ilegal, beresiko, dan bertentangan dengan moral dan agama (Kurniawan, 2009; Fathonah, 2016). Namun demikian, remaja tetap terlibat dalam eksploitasi seksual komersial walaupun tidak mendapat intimidasi dari pihak manapun.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman hidup remaja yang menjadikan mereka rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Disamping itu, akan digali pula dampak-dampak negatif dari keterlibatan mereka, khususnya dalam aspek psikologis.

Karakteristik Masa Remaja

Masa remaja dianggap merupakan periode yang rentan, misalnya karena rasa ingin tahu yang tinggi, terkadang remaja cenderung mengambil keputusan untuk melakukan tingkah laku berisiko dan bereksperimen terhadap pengalaman baru (Jessor, 2016; Defoe, Dubas, Figner, & van Aken, 2015). Banyak remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal, mengkonsumsi minuman beralkohol, kehamilan yang tidak diinginkan, juga perilaku agresif atau kekerasan (Shulman & Cauffman, 2014; Hansen et al, 2014).

Pada remaja, keputusan yang dilakukan cenderung memiliki karakteristik berorientasi jangka pendek, lebih mementingkan hasil, dan bukan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian keputusan-keputusan yang diambil justru membawa remaja masuk ke dalam permasalahan yang lebih dalam (Leshem, 2016; Blakemore & Robins, 2012; Wolff, 2012; Crone & Dahl, 2012; Hansen et al, 2014; Shulman & Cauffman, 2014).

Banyak faktor internal yang mempengaruhi keterlibatan remaja dalam perilaku berisiko, seperti nilai-nilai dan cara remaja berespon terhadap sesuatu, pembelajaran pada aspek afeksi dan sosial ketika berinteraksi dengan teman sebaya, dan struktur biologis terutama yang menyangkut masalah pengambilan keputusan seperti korteks prefrontal (Blakemore & Robins, 2012; Wolff, 2012; Crone & Dahl, 2012).

Kerangka Teoretik Penelitian

Kerangka analisis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori perkembangan psikososial remaja, dan secara khusus, pendekatan teori tingkah laku bermasalah (problem behavior) (Jessor, 2016) akan digunakan sebagai kerangka teoretik dalam

menemukan kondisi dan berbagai tingkah laku berisiko yang membuat remaja rentan untuk diperdagangkan secara seksual.

Dalam teori tingkah laku bermasalah menurut Jessor (2016) terdapat komponen yang berpengaruh terhadap tingkah laku sosial pada remaja, yaitu kondisi lingkungan, baik keluarga ataupun teman dan komponen sosial-psikologis. Sedangkan beberapa penelitian menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku sosial remaja yaitu lingkungan teman, kontrol diri, dan persepsi remaja terhadap lingkungan sekitar, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga (Maric & Sakac, 2017; Vito, Schafer, Higgins, Marcum, & Ricketts, 2015; Jessor & Turbin, 2014).

Penelitian-penelitian tentang pekerja seksual komersial yang telah dilakukan umumnya lebih berfokus pada korban yang terlibat eksploitasi seksual komersial dibawah paksaan atau terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia. Remaja pada kelompok ini cenderung sulit atau tidak dapat lepas dari jeratan tersebut. Sedangkan studi ini fokus pada remaja yang masih memiliki pilihan untuk terlibat atau tidak ke dalam praktik eksploitasi seksual komersial, dengan melakukan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman hidupnya.

Oleh karena itu, pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadikan seorang remaja perempuan rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial?

METODE

Desain Penelitian

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik dari fenomena dan memberikan jawaban-jawaban dari

pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” (Yin, 2014). Oleh karena itu, disain studi kasus tepat digunakan pada penelitian ini. Pengambilan data dilakukan di kota Bandung, dan sebagai kriteria, partisipan yang direkrut memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) remaja atau dewasa muda berusia 17-24 tahun; (2) berjenis kelamin perempuan; (3) telah terlibat prostitusi sebelum berusia 18 tahun; dan tidak di bawah ancaman atau tekanan orang lain, dan (4) orangtua tidak mengalami kesulitan ekonomi pada saat remaja terlibat prostitusi, (5) bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini (dinyatakan dalam *informed consent*).

Partisipan penelitian ini adalah 8 perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial sejak usia 14-17 tahun (lihat tabel 1). Mereka dipilih setelah peneliti melakukan eksplorasi etnografis selama 3 bulan hidup di antara mereka. Tujuan peneliti melakukan eksplorasi adalah untuk membangun kepercayaan pada kelompok remaja ini. Para remaja cenderung menutup diri terutama terhadap orang asing, oleh karena itu untuk memperoleh kepercayaan dan keterbukaan saat melakukan wawancara mendalam peneliti mengikuti aktivitas mereka sehari-hari baik di lingkungan tempat tinggal maupun pekerjaan. Selain itu, untuk memperoleh informasi tentang keberadaan mereka, peneliti dibantu oleh pekerja sosial dari Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (BAHTERA) Bandung, yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang perlindungan anak.

Disain penelitian ini telah memperoleh ethical clearance dari Tim Kaji Etik Penelitian di Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Sebelum melakukan pengambilan data, peneliti memberikan informed consent sebagai pernyataan persetujuan partisipan untuk melakukan wawancara, proses pencatatan, serta perekaman yang dilakukan dengan alat

perekam. Wawancara dilakukan selama 90-150 menit, dengan jumlah pertemuan 1-3 kali. Seluruh partisipan tidak mendapatkan kompensasi, namun diberikan uang transportasi. Peneliti yang melakukan pengumpulan data penelitian adalah seorang psikolog klinis yang telah memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menangani masalah sosial, termasuk tingkah laku berisiko (seperti kenakalan remaja dan remaja yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial).

Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan pendekatan analisis konten (Vaismoradi, Jones, Turunen, & Snelgrove, 2016; Mayring, 2014). Proses pengkodean dimulai dengan melakukan pengkodean terbuka yang kemudian mengarah pada identifikasi tema-tema penting dan keterkaitan diantaranya (Creswell, 2016). Kode terbuka dilakukan untuk menentukan peristiwa dan waktu yang dialami oleh masing-masing subjek. Kemudian peneliti mencoba untuk mencari tema-tema yang muncul dari transkrip yang ditetapkan sebagai tema-tema yang akan menjadi pembahasan dalam analisis tahap akhir. Peneliti menemukan daftar rangkaian peristiwa dan waktu kejadian yang berkaitan dengan perilaku

yang mengarah pada perilaku berisiko, figur penting dalam hidup partisipan dan kualitas hubungan mereka, serta bagaimana akhirnya mereka terlibat di dalam perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersial.

Studi ini memiliki keterbatasan yaitu pertama, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jumlah partisipan yang sedikit. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan jumlah partisipan yang lebih banyak agar gambaran kerentanan dan dampak dari keterlibatan remaja dalam dunia prostitusi lebih lengkap dan mendalam. Kedua, analisis data dilakukan secara manual, tidak menggunakan bantuan program atau software analisis data kualitatif. Dengan demikian ada kemungkinan analisis yang dilakukan belum secara optimal merefleksikan kompleksitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa terdapat beberapa tema yang menunjukkan kondisi kerentanan remaja menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Faktor (1) lingkungan keluarga dan teman, yaitu iklim keluarga, persaingan saudara kandung, serta penerimaan dan pengakuan dari teman sebaya,

Tabel 1. Identitas partisipan

Partisipan (nama samaran)	Usia saat wawancara (tahun)	Usia saat menjadi korban (tahun)	Jumlah usaha untuk keluar dari eksploitasi seksual	Pendidikan terakhir	Tempat tinggal
Alda	24	16	3	SMK, kelas 2	Tinggal sendiri (kos)
Bella	23	17	1	Tamat SMA	Tinggal sendiri (kos)
Cherry	23	14	1	SMP, kelas 2	Tinggal dengan suami dan anak (kos)
Cimoy	22	14	3	SMK, kelas 1	Tinggal sendiri (kos)
Devi	23	14	1	Kejar Paket C	Tinggal dengan orangtua
Eva	18	16	-	SMA, kelas 2	Tinggal dengan orangtua
Nadya	17	15	-	SMA, kelas 1	Tinggal sendiri (kos)
Vera	20	15	2	Tamat SMA	Tinggal sendiri (kos)

(2) faktor sosial-psikologis, yang terdiri dari kebutuhan kebebasan dan bersenang-senang, serta keinginan untuk mencari pengalaman menantang dan keterlibatan dalam perilaku kenakalan remaja, dan (3) faktor yang memperkuat kerentanan remaja, yaitu perilaku seks bebas dan perasaan kehilangan harga diri serta kebutuhan akan uang.

Secara rinci kerentanan tersebut dijelaskan dalam uraian di bawah ini:

a. Kondisi lingkungan

Iklim keluarga dan perasaan iri terhadap saudara kandung menyebabkan remaja tidak memandang keluarga sebagai sumber kasih sayang dan rasa aman. Akibatnya mereka berusaha mencari sumber kebutuhan psikologis di luar rumah, yaitu teman sebaya yang juga memiliki keluarga tidak harmonis. Ketidaknyamanan suasana di dalam rumah dapat menjadi salah satu alasan remaja untuk meninggalkan rumah dan berpeluang melakukan perilaku berisiko (Tucker, et al, 2011; Brooks, Edelen, & Tucker, 2017). Selain itu, persepsi terhadap saudara kandung juga berpotensi untuk mengganggu perkembangan yang sehat pada diri remaja (Edward, 2013).

1) Iklim keluarga

Kondisi keluarga merupakan faktor pertama yang mengawali keputusan-keputusan remaja menuju tingkah laku berisiko. Partisipan mengeluhkan suasana di rumah yang sangat tidak nyaman, seperti orangtua terlalu mengekang dan tidak ada perhatian dari orangtua maupun saudara sekandung. Disamping itu pada beberapa partisipan melihat tokoh ayah tidak dapat menjadi role model bagi anak-anak karena memiliki kebiasaan mabuk dan berjudi, melakukan kekerasan fisik, serta berselingkuh dengan wanita lain,

akibatnya sering muncul pertengkaran antara ayah dan remaja. Konflik yang terus menerus kemudian berujung pada perceraian orangtua yang semakin membuat remaja tidak betah tinggal di rumah dan lebih sering mencari kenyamanan di luar rumah, terutama dengan kelompok teman sebaya.

“Sering, dilempar pakai remote, pernah kan waktu itu masih sekolah, nah siangnya udah nggak mau sekolah, diguyur air. Kamu sekolah gini-gini-gini, mau jadi apa kamu? Terakhir dilempar sama kranjang, pake kranjang obat. Abis itu Eva kabur, berapa bulan.” (E.57)

2) Perasaan iri terhadap saudara kandung

Para remaja merasa diperlakukan berbeda dari kakak atau adiknya sehingga menimbulkan perasaan iri. Sebagai wujud protes, remaja menampilkan perilaku-perilaku seperti memusuhi saudara, melawan orangtua, bahkan terlibat dalam kenakalan remaja.

“Iya. Sirik gitu. Jadi mentang-mentang si kakak bukan anak nakal terus aku anak nakal gitu ibaratnya ya. Jadi segala kepengenen kakak pengen dibeliin. Ada bahkan kalau aku mau pengen sesuatu harus nagis dulu. Kalau gak nangis kan susah.” (CH.59)

“Saya orangnya suka main, jadi males, adik aja masih SMP udah dikasih motor, handphone udah berapa kali ganti. Coba saya, saya ngga punya. Ngga dikasih handphone. Terakhir dikasih handphone waktu ulang tahun kemarin. Soalnya saya nakal gini-gini-gini (kata orangtua). Buktiin aja, saya bisa cari uang sendiri. Makanya jadi asing banget sama orang tua.” (B.37).

3) Penerimaan dan pengakuan teman sebaya

Keluarga dianggap tidak dapat

memenuhi kebutuhan para remaja akan kasih sayang, perhatian, serta kenyamanan. Kondisi ini membuat remaja berusaha mencarinya di tempat lain, yaitu kelompok teman sebaya. Selama menjalin pertemanan, remaja masuk ke dalam lingkungan yang seolah-olah membuatnya nyaman, akan tetapi kenyataannya justru membawa remaja masuk ke dalam masalah yang lebih kompleks. Lingkungan teman sebaya memberi pengaruh yang signifikan pada remaja untuk melakukan perilaku berisiko (Maric & Sakac, 2017).

Kelompok teman sebaya yang dipilih oleh remaja dipersepsikan sebagai tempat yang dapat menerima dirinya apa adanya dan membuat remaja merasa memperoleh pengakuan dan kasih sayang. Namun lingkungan teman ternyata membawa pengaruh terhadap remaja untuk terlibat ke dalam perilaku berisiko seperti merokok, membolos dari sekolah, mengonsumsi minuman beralkohol dan narkoba.

"...Jadi kan temen aku udah pada ngekos. Jadi kan dunia kayak gitu mah mbak gimana gitu kitanya. Jadi males sekolah males semuanya. Pengeriya mah kayak ngeriung, main. senang-senang gitu." (D.39)

Di sekolah ngerokok pulang sekolah di kamar mandi ngerokok. Ah udah paling nakal. Pernah sampai kelas berapa itu, SMP udah ngerokok... Pulang sekolah suka minum." (B.151; B.177)

"Nakal. Jadi bandel jarang nurut sama orangtua... Cuma semenjak masuk SMP. Pegaulan itu. Si mama teh gak suka. Jadi drastis biasanya dirumah sekarang keliaran wae." (CH.60; CH. 61)

b. Kondisi sosial-psikologis (karakteristik usia remaja)

Faktor sosial-psikologis pada penelitian ini lebih difokuskan pada karakteristik tahap perkembangan pada usia remaja. Faktor karakteristik tahapan remaja merupakan faktor penting yang juga berpengaruh terhadap kerentanan remaja untuk menjadi korban eksploitasi seksual. Persepsi tentang kualitas hubungan antara orangtua-anak menurun pada saat anak berada pada masa transisi menuju remaja.

Pada tahap perkembangan ini, remaja menganggap konflik antara orangtua dan anak terjadi lebih besar dibandingkan masa kanak-kanak. Sedangkan orangtua juga kurang terlibat dalam kehidupan anak (remaja), menganggap remaja kurang memiliki sikap hormat dan menghargai orangtua. Juga sebaliknya remaja menganggap orangtua kurang menghargai mereka (Branje, 2018). Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap iklim keluarga yang menyebabkan remaja merasa tidak nyaman di rumah. Di sisi lain, keluarga (Ewing, Osilla, Pedersen, Hunter, Miles, & D'Amico, 2015; Gault-sherman, 2012) merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan seorang remaja, termasuk juga mencegah remaja untuk terlibat dalam perilaku-perilaku yang berisiko tinggi seperti berhubungan dengan teman sebaya yang memiliki perilaku antisosial, terlibat kenakalan remaja, atau mencoba tentang hal yang berkaitan dengan seksualitas.

1) Kebutuhan akan kebebasan dan bersenang-senang

Remaja dalam penelitian ini memiliki kebutuhan yang besar akan kebebasan dan aktivitas yang menyenangkan. Dalam memilih teman, mereka juga

mencari kelompok yang mengedepankan kesenangan dan kebebasan. Remaja tidak memikirkan akibat jangka panjang dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kebutuhan untuk bersenang-senang selanjutnya membuat mereka selalu ingin memiliki cukup banyak uang dengan cara yang mudah. Remaja terjebak dalam kesenangan dan kenikmatan sesaat yang hanya berorientasi “*here and now*”, serta cenderung membentuk tujuan dan mengadopsi perilaku yang hanya mementingkan kepuasan sesaat (Sholeh, 2017).

“Apa ya, aku apa ya, ngga ngerasain apa-apa si, Cuma pengen seneng-seneng, nikmatin hidup, ngga ada beban... Bebas sih. Kan kalau bisa cari uang sendiri bebas. Gak butuh uang sih. Gak nyaman dirumah aja.” (E.392; E.729)

“Seneng aja mbak di situ. Di situkan seusia saya pergaulan saya sudah kaya gitukan mikirnya yang lain aja masih pada diem di rumah, cuma saya doing kan. Mikirnya gagah gitu, bangga gitu saya.” (CH.454)

2) Mencari pengalaman menantang dan terlibat kenakalan remaja.

Remaja memiliki kebutuhan untuk diperhatikan oleh orang lain, oleh karena itu remaja menunjukkan perilaku-perilaku yang dapat menarik perhatian. Misalnya, dengan membentuk kelompok teman (geng) di sekolah, dengan kriteria-kriteria khusus seperti anggota geng harus cantik dan menarik, selain itu juga harus nakal dan liar. Selain itu, perilaku ingin mendapatkan perhatian juga dilakukan dengan cara menindik di bagian lidah dan bibir.

Perilaku merokok, mengonsumsi minuman beralkohol dan narkoba awalnya dilakukan remaja untuk

memenuhi rasa ingin tahu dan mencari sensasi, dan kesenangan (Byck, Swann, Schalet, Bolland, & Mustanski, 2014), namun perilaku tersebut menjadi aktivitas pelarian bagi remaja ketika menghadapi persoalan hidup. Kebutuhan untuk diterima juga menjadi alasan bagi remaja untuk mencoba perilaku-perilaku berisiko tersebut. Termasuk ketika memutuskan untuk bergabung pada geng motor. Perasaan setia kawan dan kebutuhan yang tinggi untuk diterima menjadikan remaja semakin sulit untuk keluar dari kelompok tersebut yang dirasa dapat menerima dan memberikan tempat untuknya (Lahno & Serra-Garcia, 2015)

“Di sekolah ngerokok pulang sekolah di kamar mandi ngerokok. Ah udah paling nakal. Pernah sampai kelas berapa itu, SMP udah ngerokok... Pulang sekolah suka minum... SMP kelas tiga udah mulai tindik-tindik.” (E.151; E.1630)

“Calmllet, Dumolid, yang bikin nafsu lah.... Kalau Inex itu kan kebanyakan jarang yang hidup, paling untuk temen joget doang kalau on.” (C.17; C.82)

“Jadi dulu nyebrang aja tuh ke sana jalan gitu pertama dibuka dulu satu kancing seragamnya, kan kita mah pake rok kan pendek banget gitu yah pokoknya di atas lutut. Terus nongkrong di depan itu teh. Terus ada mobil Mercedes seri E-lah keren lah dulu ya. Berenti aja tuh mobil di depan kita, dibuka aja tuh jendelanya, terus si om-nya bilang udah ayuk jalan-jalan aja dulu. Terus naik aja tuh kita ke mobilnya. (A.158)

c. Kondisi yang memperkuat kerentanan remaja

Selain kondisi lingkungan dan karakteristik usia remaja sebagai kondisi

sosial-psikologis, terdapat kondisi yang memperkuat kerentanan remaja untuk menjadi korban eksploitasi seksual komersial, yaitu:

1) Perilaku seks bebas dan perasaan kehilangan harga diri

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat komponen penguat yang menjadikan remaja menjadi lebih rentan untuk menjadi korban eksploitasi seksual komersial yaitu hubungan seks bebas yang dilakukan dengan pacar dan munculnya rasa kehilangan harga diri. Walaupun hubungan seksual yang dilakukan dengan pacar berdasarkan rasa saling suka, namun kondisi tidak perawan menyebabkan remaja merasa kehilangan harga dirinya.

Pergaulan dengan teman sebaya juga mempengaruhi gaya berpacaran mereka, termasuk mendorong remaja untuk melakukan hubungan seksual. Namun, perilaku seks bebas yang dijalani membuat remaja merasa sudah tidak berharga, dan hal ini memperkuat kerentanan untuk menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Perasaan tidak berharga karena telah kehilangan keperawanan menjadi salah satu faktor pendahulu yang kuat bagi remaja.

"Tapi mau gimana lagi. Dari situ aku berpikir, ah baru sudah tidak perawan dapat uang, bisa beli-beli. Kalau dari mamah kan paling cuma bisa buat jajan doang. Aku kan masih senang main. Senang nongkrong. Sering di sms, ayo ciw main dari pada di rumah saja." (CH.138)

"Karena aku juga udah ga perawan kan ya udah lah kagok gitu... Devi liat pergaulan sih ga punya uang gitu liat temen-temen punya uang. Karena aku juga udah ga perawan kan ya udahlah

kagok gitu." (DV.157; DV.164)

Bagi remaja perempuan, hubungan seks yang pertama kali dilakukan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis yang dimiliki (Vasilenko, Ram, & Lefkowitz, 2011). Remaja merasa ada sesuatu yang kurang atau hilang sebagai seorang wanita, remaja takut mengecewakan orangtua, bahkan takut tidak dapat menemukan pria yang layak dan mencintai mereka. Remaja merasa harga dirinya berubah karena keperawanannya telah hilang (Stone & Cooper, 2001; Holland, Meertens, & Van Vugt, 2002). Kondisi ini membuat remaja semakin rentan sehingga muncul perasaan 'telanjur basah' dan menjadi faktor pendorong yang kuat untuk menjadi korban eksploitasi seksual komersial.

2) Kebutuhan akan uang

Perilaku bermasalah dimulai dari kenakalan-kenalan yang umum dilakukan oleh remaja seperti membolos sekolah, merokok, minum alkohol, pulang melebihi batas waktu yang ditetapkan orangtua. Dengan berjalannya waktu, kenakalan yang dilakukan semakin meningkat pada penggunaan napza, tawuran, perkelahian antar gang (berurusan dengan polisi). Perilaku-perilaku berisiko yang dilakukan oleh remaja, membuat orangtua semakin tegas dan keras terhadap remaja. Hal ini membuat remaja semakin tidak betah untuk tinggal di rumah, dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah atau lebih banyak tinggal di kos atau rumah teman. Kondisi ini mengharuskan remaja untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, baik untuk keperluan sehari-hari ataupun pemenuhan gaya hidupnya.

Remaja melihat teman-temannya

memperoleh banyak uang dalam waktu singkat dengan menjadi pekerja seks komersial. Oleh karena itulah remaja pada akhirnya terlibat dalam prostitusi, untuk mendapatkan kompensasi berupa uang serta dapat memenuhi segala kebutuhan dan keinginan (Lutya, 2010; Jonsson, Svedin, & Hyden, 2015; Sinacore, Jaghori, & Rezazadeh, 2015).

“Nyaman, aku kan disitu posisi gak punya uang. Kabur gak bawa apa-apa bawa badan doang. Ya ada lah teman yang baik. Tapi mereka yang udah kenal BO (booking order) BO gitu mereka yang BO. Tapi mereka berbaur gitu kan. Mereka kalau dapet BO juga dapet uang makan bareng-bareng gitu.” (DV.44)

“Uang, karena cari uang. Cari uang aja si, cari uang cari kesenangan udah. Seneng bisa hura-hura, bisa happy, ya bisa lepasin semua beban, duit dapet.” (E.415)

Selain faktor penyebab yang kompleks, remaja korban eksploitasi seksual komersial memiliki dampak yang digolongkan menjadi dampak fisik, psikologis, dan juga pendidikan. Remaja merasa takut jika keterlibatannya di dalam prostitusi diketahui oleh orang lain, terlebih keluarga. Selain itu juga timbul perasaan bersalah dan berdosa terhadap orangtua.

“Aku ngelamunin apa, kadang sampai nangis, kadang suka inget ke dosa gimana ya gini-gini. Ya kaya gitu aja gimana ngebohong. Kadang sekarang mikir takut ngebohongin terus sama orang tua dosanya itu. Terus juga kalau kerja kaya gini dosanya gimana ya sampai nangis lah ya.” (N.49)

Secara rinci dampak yang dialami oleh masing-masing partisipan dapat dilihat pada tabel 2. Dampak-dampak ini juga

yang menjadi pertimbangan bagi remaja untuk berusaha keluar dari kondisi eksploitasi seksual komersial tersebut.

Remaja berusaha untuk keluar dari lingkungan yang membuatnya dieksploitasi dan mencari pekerjaan lain yang dianggap “umum” oleh masyarakat. Namun karena keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, maka jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh remaja hanya menghasilkan pendapatan yang rendah.

“Aku masih muda, masih bisa kerja bener tapi kenapa malah kerja ga bener. Menyesal sih. Kenapa dulu aku kenal sama dunia kaya gini. Jadi benar kata orang kalau lingkaran setan itu benar. Muter lagi muter lagi ke situ gitu. Kita mencoba berhenti tapi tetap saja kembali kedunia itu. Kecuali kalau kita sudah punya penyakit atau gimana gitu.” (CH.344)

Selain gaji yang kecil, remaja juga mengeluhkan mengenai waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk bekerja. Berbeda dengan ketika masih menjadi pekerja seks komersial, remaja dapat mengatur waktu sendiri dan uang yang diperoleh juga lebih besar.

“Dari itu pernah dulu sih berhenti bentar jadi SPG kosmetik. Gajinya enggak dipending tapi tips yang dipending. Cuma 7 bulan SPG. Ya pengen kerja bener. Cuma gajinya sedikit. Udah sama target, jam kerja, terus outletnya, peraturannya. Terus balik lagi terima BO.” (B.350)

Seseorang yang telanjur masuk ke dalam industri seksual komersial akan sulit untuk lepas atau keluar dari kondisi tersebut, karena faktor uang menjadi alasan yang kuat untuk tetap tinggal di dalamnya (Kangiwa, 2015; McNeal &

Tabel 2. Dampak-dampak eksploitasi seksual komersial pada remaja.

Dampak	Nama (samaran)							
	Alda	Bella	Cherry	Cimoy	Devi	Eva	Nadya	Vera
Fisik								
1. merokok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. alkohol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. obat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. penyakit menular seksual	-	-	-	-	-	-	✓	-
Psikologis								
1. perasaan bersalah dan berdosa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. menarik dari lingkungan sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. hidup berpisah dari keluarga	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Pendidikan								
1. keluar sekolah	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-
2. keterbatasan ketrampilan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Walker, 2015; Sanders, O'Neill, Pitcher, 2017).

Berada di dalam lingkaran perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersial dipandang sebagai solusi terhadap permasalahan yang dialami, namun remaja juga menyadari bahwa pilihannya tersebut tidak benar. Setelah kehidupan di dunia tersebut terus dijalani mereka mengalami ketakutan bila aktivitas mereka diketahui oleh orangtua, muncul perasaan bersalah, berdosa, dan merasa tertekan (Sinacore, Jaghori, & Rezazadeh, 2015). Namun di sisi lain terdapat situasi yang membuat mereka bertahan, yaitu memperoleh uang sebagai kompensasinya. Uang merupakan salah satu alat pertukaran seks yang umum, oleh karena itu, tingginya kebutuhan akan uang dapat semakin menarik remaja untuk masuk ke dalam industri tersebut (Fredlun, Svensson, Svedin, Priebe, & Wadsby, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai kondisi yang menyebabkan remaja rentan untuk terlibat ke dalam prostitusi yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan teman, karakteristik tahap usia remaja, dan faktor penguat kerentanan yaitu hubungan seks bebas yang menimbulkan perasaan kehilangan harga diri, serta kebutuhan akan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan gaya hidup remaja. Dari sini dapat dilihat, bahwa remaja terlibat ke dalam prostitusi memang bukan karena ancaman atau tekanan pihak lain, namun ada “kondisi-kondisi yang memaksa” dan pada akhirnya membuat remaja rentan untuk menjadi korban eksploitasi seksual komersial.

Berbagai dampak baik secara fisik, psikologis, dan pendidikan yang dialami remaja korban eksploitasi seksual komersial membuat remaja memiliki keinginan untuk keluar dari dunia tersebut. Remaja berusaha meninggalkan lingkungan tersebut dan mencari pekerjaan

lain yang dianggap “wajar” oleh masyarakat. Sayangnya, gaya hidup yang mementingkan kesenangan dan kebutuhan akan uang untuk hidup secara mandiri akhirnya menjadi faktor pendorong bagi remaja untuk kembali masuk ke dalam kondisi yang membuatnya dieksploitasi secara seksual.

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis terutama bagi para pekerja sosial atau para pegiat yang bergerak di bidang perlindungan anak dan remaja. Upaya-upaya penanganan bagi remaja yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial saat ini telah banyak dilakukan, baik dari aspek hukum, kesehatan, ataupun psikososial. Namun dari hasil studi ini menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan perlu juga difokuskan terkait dengan kondisi psikologis remaja tersebut. Misalnya, masalah yang berkaitan dengan pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, dan membuat remaja rentan untuk terlibat tingkah laku berisiko. Membantu remaja mengidentifikasi permasalahan dan mencoba mencari alternatif solusi yang tepat, sehingga tidak mudah untuk terlibat ke dalam kenakalan remaja atau perilaku berisiko, sehingga rentan untuk menjadi korban eksploitasi seksual komersial.

Dalam upaya pencegahan, diperlukan kerja sama dari banyak pihak untuk terlibat, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, bahkan pemerintah. Hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan menerjemahkan kebijakan ke dalam program-program yang bersifat teknis dan dapat diterapkan dengan mudah di lingkungan masyarakat dari keluarga, sekolah, ataupun komunitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga

penelitian ini dapat berjalan dengan baik, yaitu kepada Universitas Indonesia melalui Hibah Tugas Akhir Mahasiswa Doktor. Selain itu, kepada Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (BAHTERA) Bandung, serta kepada Festy Dwi Putri sebagai informan kunci, yang telah membantu mempertemukan peneliti dengan para partisipan.

DAFTAR PUSTAKA

- Blakemore, S.J., & Robbins, T.W. (2012). Decision-Making in the adolescent brain. *Nature Neuroscience*, 15(9), 1184-1191.
- Branje, S. (2018). Development of Parent-Adolescent Relationships: Conflict Interactions as a Mechanism of Change. *Child Development Perspectives*, 12(3), 171-176.
- Brooks Holliday, S., Edelen, M. O., & Tucker, J. S. (2017). Family functioning and predictors of runaway behavior among at-risk youth. *Child & Adolescent Social Work Journal*, 34(3), 247-258.
- Byck, G. R., Swann, G., Schalet, B., Bolland, J., & Mustanski, B. (2014). Sensation Seeking Predicting Growth in Adolescent Problem Behaviors. *Child Psychiatry & Human Development*, 46(3), 466-473.
- Cahya, K.D. (2015). Pekerja seks di bawah umur di kalibata city hamil enam bulan. Diakses dari <http://megapolitan.kompas.com> pada 10 Mei 2015.
- Creswell, J.W. (2016). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches 4th edition*. California: Sage Publication, Inc
- Crone, E.A., & Dahl, R.E. (2012). Understanding adolescence as a period of social-affective engagement

- and goal flexibility. *Nature Reviews Neuroscience*, 13, 636-650
- Defoe, I. N., Dubas, J. S., Figner, B., & van Aken, M. A. G. (2015). A meta-analysis on age differences in risky decision making: Adolescents versus children and adults. *Psychological Bulletin*, 141(1), 48–84.
- Dewey, S., Germain, T.S., & Germain, T.P.S. (2016). *Women of the street: How the criminal justice-social services alliance fails women in prostitution*. New York: New York University Press.
- Doezema, J. (2002). Who gets to choose? Coercion, consent, and the UN Trafficking Protocol. *Gender & Development*, 10(1), 20-27.
- ECPAT International. (2017). Regional overview: Sexual exploitation of children in Southeast Asia. Diakses dari <http://www.ecpat.org/wp-content>, pada 20 April 2020.
- Edward, J. (2013). Sibling discord: A force for growth and conflict. *Clinical Social Work Journal*, 41(1), 77-83
- Ewing, B. A., Osilla, K. C., Pedersen, E. R., Hunter, S. B., Miles, J. N. V., & D'Amico, E. J. (2015). Longitudinal family effects on substance use among an at-risk adolescent sample. *Addictive Behaviors*, 41, 185–191
- Fathonah, R. (2016). Analisis Terhadap Faktor Penyebab Prostitusi Pada Anak. *Jurnal Poenale*, 3(4).
- Fredlund, C., Svensson, F., Svedin, C.G., Priebe, G., & Wadsby, M. (2013). Adolescents' life time experience of selling sex: development over five years. *Journal of Child Sexual Abuse*, 22, 312-325
- Gault-sherman, M. (2012). It's a two-way street: the bidirectional relationship between parenting and delinquency. *Journal of Youth and Adolescence*, 41(2), 121-45
- Hansen, L. O., Tinney, B., Asomugha, C. N., Barron, J. L., Rao, M., Curry, L. A., Rosenthal, M. S. (2014). "You get caught up": Youth decision-making and violence. *Journal of Primary Prevention*, 35(1), 21-31.
- Harsanti, I., & Verasari, D. G. (2013). Kenakalan pada Remaja yang Mengalami Perceraian Orang Tua. *Prosiding PESAT*, 5.
- Hasan, F. (2009). Kasus Paedofil Ancam Bangkrutkan Pariwisata Bali. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/165324/kasus-paedofil-ancam>, pada 10 Juli 2018
- Holland, R. W., Meertens, R. M., & Van Vugt, M. (2002). Dissonance on the road: Self-esteem as a moderator of internal and external self-justification strategies. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 28(12), 1713-1724.
- Hull, T. H, Sulistyaningsih, E, & Jones, G.W. (1998). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah & Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- ILO. (2004). *Child trafficking for prostitution in Jakarta and West Java. A rapid assessment*. Switzerland: International Labour Office.
- Jessor, R. (2016). *The origins and development of problem behavior theory: The collected works of Richard Jessor*. Switzerland: Springer International Publishing
- Jessor, R., & Turbin, M.S. (2014). *Parsing protection and risk for problem behavior*

- versus pro-social behavior among US and Chinese adolescents. *Journal of Youth Adolescence*, 43, 1037–1051.
- Jonsson, L. S., Svedin, C. G., & Hydén, M. (2014). “Without the internet, I never would have sold sex”: Young women selling sex online. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 8(1), article 4
- Kangiwa, A.G. (2015). The socio-economic factors and effects of prostitution in Nigeria. *European Journal of Research in Social Sciences*, 3(5), 70-83
- Koentjoro. (1989). Perbedaan harga diri remaja di daerah miskin penghasil pelacur dan bukan penghasil pelacur. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- KPAI. (2019). Triwulan 2019: Anak dalam pusaran prostitusi. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita>, pada 20 April 2020
- Kuo, M. (2000). Asia’s dirty secret: prostitution and sex trafficking in Southeast Asia. *Harvard International Review*, 22(2), 42-45.
- Kurniawan, T. (2009). Hubungan antara interaksi teman sebaya dan konsep diri dengan intensi perilaku seks pranikah pada remaja. Disertasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lahno, A. M., & Serra-Garcia, M. (2015). Peer effects in risk taking: Envy or conformity? *Journal of Risk and Uncertainty*, 50(1), 73–95.
- Leshem, R. (2016). Brain Development, Impulsivity, Risky Decision Making, and Cognitive Control: Integrating Cognitive and Socioemotional Processes During Adolescence-An Introduction to the Special Issue. *Developmental Neuropsychology*, 41(1-2), 1–5.
- Levine, J.A. (2017). Mental health issues in survivors of sex trafficking. *Cogent Medicine*, 4(1), 1-13
- Lutya, T.M. (2010). Lifestyles and routine activities of South African teenagers at risk of being trafficked for involuntary prostitution. *Journal of Child and Adolescent Mental Health*, 22(2), 91–110
- Maric, M., and Sakac, M. (2017). Personal, environmental and socio-demographic factors of alcohol use in adolescence. *Journal of evidence-based psychotherapies*, 17(2), 105-118
- Mayring, P. (2014). Qualitative Content Analysis: Theoretical Background and Procedures. *Approaches to Qualitative Research in Mathematics Education*, 365–380.
- McNeal, B. A., & Walker, J. T. (2015). Parental effects on the exchange of sex for drugs or money in adolescents. *American Journal of Criminal Justice*, 41(4), 710–731.
- Reed, S. M., Kennedy, M. A., Decker, M. R., & Cimino, A. N. (2019). Friends, family, and boyfriends: An analysis of relationship pathways into commercial sexual exploitation. *Child Abuse & Neglect*, 90, 1–12.
- Sanders, T., O’Neill, M., & Pitcher. J. (2017). *Prostitution: Sex Work, Policy & Politics* 2nd edition. California: Sage Publication, Inc.
- Satyatama, I. P., Rimawati, E., & Shalihiyah, Z. (2007). The phenomenon of student prostitutes “campus chicken” in some universities in Semarang. *Reproductive*

- Health and Social Sciences Research, 5(1), 36-45
- Sholeh, A. (2017). The relationship among hedonistic lifestyle, life satisfaction, and happiness on college students. *International Journal of Social Science and Humanity*, 7(9), 604-607
- Shulman, E. P. & Cauffman, E. (2014). Deciding in the dark: age differences in intuitive risk judgment. *Developmental Psychology*, 50(1), 167-177.
- Sinacore, A. L., Jaghori, B., & Rezazadeh, S. M. (2015). Female university students working in the sex trade: a narrative analysis. *Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy (Online)*, 49(1), 40-56
- Stone, J., & Cooper, J. (2001). A self-standards model of cognitive dissonance. *Journal of Experimental Social Psychology*, 37(3), 228-243.
- Suhardjo, K., & Irwanto. (2018) *Tumbuh bagai ilalang*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Suprpto, H. & Martujdi, T. (2013). Siswa SMP kepergok jual teman ke lelaki hidung belang. Diakses dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/419393-siswi>, pada 3 September 2018
- Tucker, J. S., Edelen, M. O., Ellickson, P. L., & Klein, D. J. (2011). Running away from home: a longitudinal study of adolescent risk factors and young adult outcomes. *Journal of Youth and Adolescence*, 40(5), 507-18.
- UNICEF. (n.d). *The Convention on The Rights of The Children*. Diakses dari <https://www.unicef.org>, pada 21 Januari 2020
- UNODC. (2016). *Global report on trafficking in persons 2016*. New York: United Nations Publication. Diakses: dari <http://www.unodc.org/documents>, pada 26 November 2018.
- UNODC. (2018). *Global report on trafficking in persons 2018*. New York: United Nations Publication. Diakses dari <http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis>, pada 20 April 2020
- Vaismoradi, M., Jones, J., Turunen, H., & Snelgrove, S. (2016). Theme development in qualitative content analysis and thematic analysis. *Journal of Nursing Education and Practice*, 6(5), 100-110.
- Vanwesenbeeck, I. (2013). Prostitution push and pull: Male and female perspectives. *Journal of Sex Research*, 50(1), 11-16.
- Vasilenko, S.A., Ram, N., & Lefkowitz, E.S. (2011). Body image and first sexual intercourse in late adolescence. *Journal of Adolescence* 34: 327–335. doi:10.1016/j.adolescence.2010.04.005.
- Vito, A.G., Schafer, B.P., Higgins, G.E., Marcum, C.D., & Ricketts, M.L. (2015). Juvenile hallucinogen use: what do multiple theories say about it? *American Journal of Criminal Justice*, 40, 116–128.
- Wolff, J.M. (2012). *Adolescent decision making and risk behavior: a neurobiological approach*. Dissertation. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska
- Yin, R.K. (2014). *Case study research: design and methods*, 5th edition. California: Sage Publication, Inc

PEDOMAN BAGI PENULIS

Penulis yang akan mengajukan naskah di Sosio Konsepsia submit melalui *Open Journal System* (OJS) : <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>, template penulisan berikut dapat diunduh di halaman OJS tersebut, dengan ketentuan:

1. Artikel merupakan hasil penelitian lapangan, **Bidang Kesejahteraan Sosial** maksimal 3 tahun terakhir dan belum pernah dipublikasikan di media lain.
2. Artikel menggunakan font Times New Roman (TNR) 12pt, spasi 1, 15-25 halaman (A4). Metode sitasi ditulis menurut American Psychological Association (APA) dan software dapat menggunakan seperti: Mendeley, Zotero, Endnotes, dll. Dengan demikian akan terdapat catatan pada saat menyitasi kalimat (Penulis, tahun).
3. Judul dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (*Italic*) ditulis huruf besar semua (BOLD), Times New Roman, 14 PT.
4. Nama penulis tanpa gelar disertai nama lembaga, alamat lembaga dan email. Jika penulis lebih dari 1 dan lembaga yang sama cukup dicantumkan sekali saja.
5. Abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (*Italic*) berkisar 200-250 kata, yang memaparkan dengan jelas permasalahan pokok yang dibahas, alasan penelitian, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan; dan metode yang digunakan; pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya. Abstrak tidak perlu mencantumkan gambar, tabel, rumus, atau kutipan pustaka. Kata kunci terdiri atas 4-6 kata.
6. Sistematika penulisan :
 - a. **PENDAHULUAN**, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, hipotesis (opsional), rancangan penelitian, serta tinjauan pustaka.
 - b. **METODE**, mencakup penjelasan tentang lokasi dan waktu penelitian, macam/sifat penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.
 - c. **HASIL DAN PEMBAHASAN**, hasil harus jelas dan ringkas. Diskusi harus mengeksplorasi signifikansi dari hasil penelitian, bukan merupakan pengulangan. Tabel, Gambar, dan Persamaan mengikuti ketentuan dalam template.
 - d. **KESIMPULAN**, bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Segitiga konsistensi yang penting untuk dipenuhi (masalah-tujuan-kesimpulan), sebagai upaya cek dan ricek.
 - e. **SARAN**, Apabila diperlukan dapat berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh
 - f. **UCAPAN TERIMA KASIH**, Sebagai wujud penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah atau dalam penelitian dan/atau pengembangan. Disebutkan siapa yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara organisasi/institusi, pemberi donor ataupun individu.
 - g. **DAFTAR PUSTAKA**, Penulisan daftar pustaka mengikuti format APA (*American Psychological Association*). Daftar pustaka sedapat mungkin menggunakan sumber primer (buku atau jurnal), diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama keluarga/penulis. Minimal 80% rujukan berasal dari sumber yang up to date (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir) yaitu **rujukan primer dari jurnal penelitian dan prosiding**. Rujukan dari internet mencantumkan tanggal diakses. Penulisan daftar pustaka sudah menggunakan **aplikasi referensi Mendeley**.

